

Kongres Bahasa Indonesia VIII

Jakarta, 14--17 Oktober 2003



KELOMPOK A RUANG BALI

Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia

Daftar Isi

PERAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DI ERA REFORMASI

Parni Hadi

•

BAHASA MEDIA MASSA :
LARAS BAHASA JURNALISTIK YANG PERLU DIKEMBANGKAN

Mulyadi Eko Purnomo

•

PEMEKARAN FUNGSI BAHASA DAERAH DEMI KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Aron Meko Mbete

•

PEMBALIKAN PERGESERAN BAHASA DAERAH UNTUK
MEMPERKUKUH BUDAYA BANGSA

Asim Gunarwan

•

MENGAJI ULANG PERAN MEDIA MASSA DALAM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Kasmansyah

•

KETERSEDIAAN, KEBERMANFAATAN DAN KEBERMAKNAAN BAHASA
MINANGKABAU DALAM MEDIA SURAT KABAR,
RADIO DAN TELEVISI DI PADANG SUMATERA BARAT DALAM
MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA MINANGKABAU

M. Zaim

•

PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
MELALUI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR:
PEMBERDAYAAN RAGAM BAHASA INDONESIA

Imelda Yance



PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi PB 499-2106 KOM	No. Induk : 0988 Tgl. : 17/2004 Ttd. : Eem

k

PERAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI ERA REFORMASI

Parni Hadi

Wartawan/Anggota Badan Pertimbangan Bahasa

Jika judul naskah ini merupakan sebuah pertanyaan, jawabannya amatlah mudah: "Jelas amat sangat penting!" Sejarah pers (media massa) Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, demikian pula sebaliknya. Bahkan, keduanya, pers nasional dan Bahasa Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing.

Era reformasi di Indonesia, yang dimulai tahun 1998, berlangsung dalam era globalisasi informasi. Era yang penuh dengan hiruk pikuk perubahan di segala bidang kehidupan. Berkat kemajuan teknologi informasi, era ini juga disebut era informasi, yang ditandai dengan membanjirnya informasi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan segala dampak positif dan negatifnya. Media cetak bermunculan tumbuh di berbagai daerah berkat kebebasan pers, tapi sebagian (besar) media cetak baru itu berguguran karena persaingan ketat dan kurang persiapan. Sementara itu, media elektronik, radio dan televisi, yang juga tumbuh pesat tampak lebih stabil. Di antara beberapa alasannya adalah: 1) karena mendengarkan radio dan menonton televisi lebih murah daripada membaca media cetak (praktis tidak perlu mengeluarkan biaya, kecuali untuk membeli pesawatnya), 2) mendengarkan radio dan menonton televisi tidak memaksa orang untuk berpikir seserius ketika membaca dan 3) cocok dengan budaya duduk, mendengarkan dan menonton dari sebagian besar masyarakat kita. Karena itu, era reformasi ini dalam bidang komunikasi dan informasi lebih pas disebut era media elektronik, terutama televisi, jika dilihat dari jangkauan dan dampaknya kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia.

Sebelum membicarakan kondisi umum penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik, kendala dan strategi untuk mengatasinya, izinkanlah saya mengajak Anda menelusuri kilas balik hubungan timbal balik antara wartawan (media massa) dan bahasa Indonesia sejak Kongres Bahasa Indonesia I sampai VII dan keputusan-keputusan penting yang menyangkut hubungan antara keduanya. Saya merasa terhormat diundang untuk membahas topik ini, karena setelah 28 tahun bergiat di media cetak sebagai wartawan,

sejak tahun 2000 saya juga menggeluti profesi baru sebagai penyaji acara atau dalang bincang-bincang (talk show master) di radio dan televisi.

Dari Kongres ke Kongres

Setelah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara wartawan (pers) dengan Bahasa Indonesia diakui oleh Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 sampai Kongres VII 1988. Salah satu keputusan Kongres I di Solo, setelah mendengar saran Adinegoro (almarhum), salah seorang tokoh perintis pers Indonesia, berbunyi: "Sudah waktunya kaum wartawan berdaya upaya mencari jalan-jalan untuk memperbaiki bahasa di dalam persuratkabaran, karena itu berharap supaya Perdi (Persatoean Djoernalis Indonesia) bermufakat tentang hal itu dengan anggota-anggotanya dan komisi yang akan dibentuk oleh Kongres yang baru bersama-sama pengurus pusat Perdi (ejaan dan istilah telah disesuaikan dengan yang kini berlaku).

Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954 secara khusus membentuk Seksi E yang bertugas membahas tiga topik, yakni 1) fungsi Bahasa Indonesia dalam Pers, 2) Bahasa Indonesia dalam Pers dan 3) Bahasa Indonesia dalam Penyiaran Radio. Kala itu media massa belumlah semaju sekarang. Media cetak belumlah sebanyak sekarang dan pesawat televisi belum dikenal. Kongres ini mengeluarkan Resolusi tentang Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio. Resolusi itu di bagian "Mengingat" antara lain menyebutkan bahwa alat dari pers dan radio adalah Bahasa Indonesia. Di bagian "Menimbang" antara lain tertulis:

- (2) Bahasa sebagai alat pers dan radio harus dibuat seefektif-efektifnya atau dijadikan sebaik-baiknya
- (3) Kebaikan bahasa sebagai alat Pers dan Radio terletak pada sifat mudah dan jelas.
- (4) Sifat mudah dan jelas itu terjadi jika mengikuti pertumbuhan bahasa dengan timbulnya kata-kata, langgam-langgam, gaya dan ungkapan-ungkapan baru di dalam masyarakat.

Kemudian, Resolusi itu menyatakan pendapat sbb:

- 1) Bahasa Indonesia di dalam Pers dan Radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak.
- 2) Bahasa Indonesia di dalam Pers dan radio adalah bahasa

- masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat.
- 3) Pers dan radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa yang resmi.
 - 4) Menganggap perlu supaya dilanjutkan adanya kerjasama yang lebih erat antara Pers dan radio dengan Balai-balai Bahasa.

Kongres Bahasa Indonesia III tahun 1978 di Jakarta juga memberi perhatian masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidang komunikasi. Kesimpulan umum Kongres ini di bidang komunikasi antara lain menyebutkan bahwa media massa merupakan salah satu sarana penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Media massa diakui telah memberikan sumbangan yang berharga dengan pertumbuhan bahasa Indonesia. Namun, disebutkan pula bahwa kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dan dalam ragam lisan belum ada lafal baku. Juga disebutkan pemakaian bahasa daerah dan asing dalam keadaan atau kesempatan tertentu.

Kongres menyarankan tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya
2. Kerjasama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.
3. Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
4. Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan resmi.
5. Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
6. Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan "Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.

7. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian, antara lain, untuk penyiar televisi dan radio.
8. Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, televisi, serta radio dapat melakukan kerjasama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

Kongres Bahasa Indonesia IV (1983) di Jakarta

Kongres ini mencatat media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa mempunyai pengaruh luas di dalam masyarakat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun secara lisan, masih memiliki kelemahan. Kecenderungan menghilangkan kata-kata dalam media cetak, misalnya, sering mengakibatkan makna kalimat menyimpang atau hilang sama sekali. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu. Tindak lanjut yang disarankan adalah semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerang, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak, harus memiliki kemampuan dan ketrampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kongres Bahasa Indonesia V (1988) di Jakarta

Kongres ini mencatat karena media massa merupakan komunikator pembangunan yang memanfaatkan bahasa Indonesia, maka media massa seperti surat kabar dan majalah, hendaknya memiliki tenaga kebahasaan yang khusus membina bahasa siaran sehingga bahasa media massa dapat dijadikan contoh bagi masyarakat.

Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) di Jakarta

Sebagai media komunikasi yang mempergunakan bahasa, media massa telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Di samping itu, dunia pers dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan sikap positif dan apresiatif serta menggalakkan penggunaan bahasa

yang lebih cendekia dengan mengungkapkan bahasa secara lebih rasional dan berpegang pada konvensi-konvensi bahasa yang sudah baku. Oleh sebab itu, peranan media massa sebagai penyebar sekaligus sebagai tolok ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Tindak lanjut :

- a. Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakan penggunaan bahasa yang lebih cendekia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.
- b. Dalam memperkaya bahasa Indonesia dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan juga menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
- c. Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.
- d. Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kongres Bahasa Indonesia VII (1998) di Jakarta

Kongres ini mencatat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan kehidupan dalam era globalisasi menuntut agar kualitas bahasa Indonesia ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya dikembangkan. Untuk itu, unsur-unsur bahasa seperti sintaksis dan kosakata, termasuk peristilahan, perlu diperkaya. Kongres ini mengusulkan tindak lanjut antara lain sbb:

- Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosakata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.
- Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat istiadat perlu dilestarikan.

- Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga perlu berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.

Dukungan UU Penyiaran

Kongres Bahasa VIII 2003 di Jakarta ini berlangsung lima tahun setelah Gerakan Reformasi diluncurkan. Yang harus dicatat, upaya untuk meningkatkan peran media massa elektronik dalam peningkatan mutu penggunaan Bahasa Indonesia mendapat dukungan luar biasa dari UU Penyiaran. Bahasa Indonesia mendapat tempat yang penting dan terhormat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur Bahasa Siaran, yakni dalam Bab IV bagian kedua dalam tiga pasal, yakni pasal 37, 38 dan 39.

Pasal 37
Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

- a. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- b. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

- a. Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulisuarkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- b. Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh peratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- c. Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu.

Apa dan siapa yang salah?

Jadi, sudah jelas bahwa media massa elektronik sesuai perintah UU harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi, kenyataannya keluhan terhadap mutu bahasa Indonesia yang digunakan dalam siaran media massa elektronik belum sirna. Bahkan, apa yang dapat dianggap sebagai kekurangan dan pelanggaran seperti yang telah dicatat oleh kongres-kongres bahasa sebelumnya semakin menjadi-jadi. Apa dan siapa yang salah? Apakah insan penyiaran tidak serius dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar? Atau, apakah karena pelanggaran atas perintah UU ini tidak ada sanksinya, kecuali untuk pasal 39 ayat 1 yang dikenakan sanksi administratif? Sanksi administratif itu pun tidak khusus hanya untuk pelanggaran pasal 39 ayat 1, tetapi untuk banyak pasal seperti diatur dalam Bab V tentang Sanksi Administratif Pasal 55.

Sanksi Administratif itu dapat berupa :

- a. teguran tertulis
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Lebih celaka lagi, jika UU ini cuma dianggap tulisan di atas kertas belaka. Dan, apa yang dimaksud dengan ancaman sanksi administratif itu dianggap hanya sebagai angin lalu saja. Toh, UU yang memiliki sanksi pidana saja tidak ditakuti. Apalagi, kini sudah menjadi rahasia umum bahwa supremasi hukum yang menjadi tuntutan agenda reformasi tinggal menjadi kenangan belaka.

Baik, benar dan menghibur

Salah satu syarat bahasa untuk siaran radio dan lebih-lebih televisi adalah harus menghibur. Kesan umum terhadap apa yang disebut sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang formal dan karenanya kaku. Karena dianggap kaku, maka kurang disukai oleh para penyiar dan pembawa acara televisi. Sebuah acara televisi pertama-tama harus enak ditonton oleh para pemirsa. Bahasa

lisan lebih luwes dibanding bahasa tulisan. Intonasi berperan penting untuk membuat sebuah acara yang disajikan menarik, sekalipun mungkin itu menyalahi apa yang disebut sebagai lafal baku. Bahkan, kata-kata tidak cukup menarik tanpa bantuan gerakan anggota tubuh dan ekspresi wajah. Kata-kata, apalagi harus mengikuti kaidah-kaidah yang dianggap baik dan benar, membuat dahi berkerinyit karena harus berpikir, sedangkan gerakan anggota tubuh dan ekspresi wajah secara spontan dapat membuat orang tertawa atau menangis. Penggunaan bahasa daerah dan asing, kecuali mungkin karena belum ada kosakata bakunya dalam bahasa Indonesia, dapat membuat sebuah acara lebih menarik karena menyajikan sesuatu yang baru, di samping menambah pengetahuan.

Tulisan ini tidak bermaksud membela kesalahan-kesalahan yang bukan main banyaknya yang dilakukan oleh pembaca berita dan pemandu acara, baik dalam gramatika, intonasi, fonologi, morfologi, diksi (pilihan kata-kata), terjemahan maupun sintaksisnya. Berikut adalah salah satu contoh kesalahan gramatikal: "Berita terakhir diterima redaksi...". Seharusnya, "Berita terakhir yang diterima redaksi.....". Mungkin, si pembaca berita terpengaruh atau tidak mengerti maksud ungkapan dalam bahasa Inggris: "*Latest news received by the editor....*" (past participial). Sering kali kata "yang" untuk menunjukkan anak kalimat tidak diucapkan sebagai pengganti tanda baca koma (,) seperti dalam berita berikut: Amin, lahir 20 tahun lalu, baru mendapat kesempatan untuk disunat kemarin berkat gerakan khitanan massal yang diselenggarakan partai politik A. Dalam bentuk bahasa lisan mestinya berita itu dibaca: Amin yang lahir 20 tahun lalu dst. Ada juga contoh kesalahan terjemahan yang menggelikan seperti: *Presidential candidate George Walker Bush with his running mate.....* diterjemahkan menjadi Calon Presiden George Walker Bush dengan teman berlarnya.....

Bahasa gado-gado juga masih banyak dipakai dalam berita seperti contoh berikut: Ada *contingency plan*, *sweeping* tablig Jamaah, dugaan *money politics* dan "*jangan ngoyo, rileks aja!*". Ada juga kesalahan yang diucapkan oleh narasumber, kebetulan pejabat tinggi lagi, contohnya: "Suatu tindakan-tindakan.....". Bahasa gado-gado lebih banyak lagi dipergunakan dalam iklan seperti contoh berikut: Di *clear in* saja. Nge*clearin* siapa takut? Mau nge *trend*, ya pakai! Aku nge*joss* di sini, kamu nge*joss* di sana.(entah apa maksudnya).

Strategi untuk peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia di media massa elektronik

Jika sub-judul di atas merupakan sebuah pertanyaan, jawabannya jika harus baru atau lain daripada yang sudah dirumuskan dalam kongres-kongres sebelumnya adalah: Sulit!

Terus terang, apa yang diharapkan dan dikeluhkan serta tindak lanjut untuk mengatasinya sudah disebut-sebut dalam kongres-kongres sebelumnya. Tinggal melaksanakan saja. Dan, itulah yang sulit dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jika saja keputusan-keputusan kongres-kongres terdahulu dilaksanakan, keluhan itu mestinya tidak ada lagi atau minimal berkurang.

Sekali lagi, tanpa maksud membela kesalahan insan-insan penyiaran, justru, maafkan jika salah, saya khawatir jangan-jangan Pusat Bahasa dan para ahli bahasa yang harus mengubah paradigma apa yang disebut bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Saya yakin, Pusat Bahasa dan para ahli bahasa sudah tahu bahwa bahasa itu berkembang sesuai dinamika masyarakat penggunaannya, yang dalam era globalisasi ini mendapatkan banyak masukan dari luar negeri.

Apakah perlu dibentuk polisi bahasa untuk menindak para pelanggar UU Penyiaran? Anda sudah tahu jawabannya, kan? Perlu UU tentang Kebahasaan, silakan! Menjadikan Pusat Bahasa lebih berwibawa dengan meningkatkannya menjadi lembaga non departemen, silakan! Saya setuju-setuju saja. Juga saya setuju semua usul tindak lanjut yang dihasilkan Kongres Bahasa Indonesia I sampai dengan VII mengenai peningkatan penguasaan berbahasa Indonesia bagi wartawan, pembaca berita, pembawa acara dan para narasumber serta pengisi acara di media elektronik. Silakan dilaksanakan, saya mendukung sepenuhnya.

Jika Anda ingin sesuatu yang baru, boleh juga. Mumpung kini para elit politik sedang sibuk menyiapkan pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota langsung, saya mengusulkan diadakan tes kemampuan berbahasa Indonesia dari para calon. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan media massa elektronik untuk melaksanakan perlombaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat juga media massa elektronik dilibatkan untuk memilih pejabat dan tokoh publik terbaik dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan penampilan mereka yang sudah lampau. Pokoknya, kerjasama antara Pusat Bahasa dan media elektronik perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia.

Bahan bacaan:

- a. Hasil-hasil Kongres Bahasa Indonesia I–VII.
- b. UU No. 32, 2002 tentang Penyiaran
- c. Makalah-makalah Kongres Bahasa Indonesia I–VII
- d. *How To Talk So People Listen*, Sonya Hamlin
- e. *The Quick & Easy Way To Effective Speaking*
- f. *How to Think, Speak and Write Effectively*, Robert Flesch
- g. *New Survey of Journalism*, George Fox Mott
- h. UU No.40,1999 tentang Pers
- i. Kode Etik Wartawan Indonesia.

PEMBALIKAN PERGESERAN BAHASA DAERAH UNTUK MEMPERKUKUH BUDAYA BANGSA¹

Asim Gunarwan
Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Tajuk makalah ini diangkat dari salah satu subtopik Kongres Bahasa Indonesia VIII ini, yakni "Pemantapan Peran Bahasa Daerah dalam Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa." Dengan sengaja makalah ini tidak bertolak dari nosi budaya daerah; alih-alih itu, ia mencoba mengaitkan bahasa daerah (yang diasumsikan mempunyai kaitan yang erat dengan budaya daerah) dengan usaha memperkukuh budaya bangsa, budaya bangsa Indonesia. Penalarannya adalah sebagai berikut. Bahasa mempunyai "peran yang penting dalam hubungannya dengan budaya suatu masyarakat, yaitu sebagai alat transmisi budaya itu dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Jika asumsi dasar ini diterima, implikasi yang dapat ditarik ialah bahwa melemahnya bahasa dapat menyebabkan menurunnya budaya masyarakat yang bersangkutan. Artinya, ada korelasi positif di antara bahasa dan ketahanan budaya.

Kalau kebudayaan diartikan, mengikuti Goodenough (Geertz, 1973: 11), sebagai "terdiri atas apa saja yang perlu diketahui atau dipercayai [oleh seseorang] agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima oleh para anggota [masyarakat]", tersirat bahwa bahasa memegang peran yang penting di dalam proses untuk mengetahui dan mempercayai itu. Intinya: bahasa adalah komponen kebudayaan yang penting, dan karenanya ia mempunyai peran yang penting di dalam ketahanan kebudayaan.

Asumsi dasar yang lain yang dipakai sebagai titik tolak bahasan makalah ini adalah bahwa budaya Indonesia (di dalam arti budaya pan-Indonesia) itu belum wujud. Berdasarkan asumsi ini, dapat diduga bahwa penggunaan frase budaya bangsa di dalam subtopik di atas adalah kesengajaan Panitia Kongres untuk menghindari istilah budaya Indonesia, yang dapat berkonotasi budaya yang dianut oleh semua warga Indonesia. Sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, tampaknya kebijakan kebudayaan kita akan terus berorientasi kepada

¹Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, 14--21 Oktober 2003

kemajemukan budaya (*cultural pluralism*). Karena itu, budaya bangsa di dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan dari kebudayaan daerah (KD): KD Sunda, KD Minangkabau, KD Batak, KD Manado, KD Bugis, KD Papua, KD Jawa, dsb.

Argumentasi yang akan dikemukakan di sini adalah bahwa karena bahasa-bahasa daerah (BD-BD) di Indonesia cenderung bergeser, pembalikan pergeserannya wajib diusahakan jika kita hendak melestarikan dan memantapkan peran BD dalam memperkuat ketahanan KD, yang pada gilirannya akan memperkuat budaya bangsa. Peran BD sebagai penopang KD, dan secara tidak langsung peran KD sebagai penopang budaya bangsa, tidak dapat dimantapkan jika BD dibiarkan bergeser, menjadi lemah, dan akhirnya punah.

2. Bahasa dan Kebudayaan

Hubungan di antara bahasa dan kebudayaan dapat dirunut dari dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, yang mengacu kepada kesemestaan budaya, mengatakan bahwa bahasa, seperti halnya kepercayaan dan mata pencaharian, adalah komponen penting kebudayaan. Jika kebudayaan didefinisikan sebagai totalitas pola perilaku, seni, kepercayaan, lembaga serta hasil karya dan buah pemikiran manusia, yang menjadi ciri-ciri suatu masyarakat, pentingnya bahasa itu terletak pada kenyataan bahwa, seperti yang disinggung di depan, ia memegang peran yang penting sebagai alat transmisi budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.

Pandangan yang lain diturunkan dan hipotesis Sapir-Whorf, yang sering disebut hipotesis Whorf saja, yang sekarang dikatakan sebagai terdiri dari dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Versi kuat mempostulatkan bahwa bahasa *menentukan* cara berpikir penggunaannya; jadi, peran bahasa bersifat deterministik. Versi lemah mempostulatkan bahwa bahasa *mempengaruhi* cara berpikir para penggunanya; versi ini bernada relativistik. Tepatnya, hipotesis Whorf itu dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (Lee, 1981: 81). Versi kuat, yang sering dirujuk sebagai determinisme linguistik, dapat dirinci menjadi dua, yaitu yang sangat kuat dan yang tidak terlalu kuat, yang kedua-duanya tidak berterima di kalangan linguis zaman sekarang. Yang sangat kuat mengatakan bahwa bahasa menentukan (*determines*) cara berpikir dan yang tidak terlalu kuat mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir. Versi lemah, yang biasanya dirujuk sebagai relativitas linguistik, juga dapat dirinci menjadi dua: versi yang tidak terlalu lemah dan versi yang sangat lemah. Yang pertama itu

mempostulatkan bahwa bahasa yang berbeda menentukan cara berpikir secara berbeda-beda. Yang kedua mempostulatkan bahwa bahasa yang berbeda mempengaruhi cara berpikir secara berbeda-beda. Versi yang sangat lemah itulah yang pada umumnya berterima di kalangan linguis dewasa ini.

Perspektif yang mana pun yang kita pakai, yakni apakah perspektif kesemestaan budaya atau perspektif Whorf, dan jika perspektif Whorf ini yang kita pakai, versi yang mana pun dari keempat-empat versi yang disebutkan di atas, kita akan melihat bahwa hubungan bahasa dan budaya adalah erat. Di dalam hal ini, Fishman (1991: 20—24) melihat tiga macam hubungan di antara bahasa dan budaya. Ketiganya adalah: (1) bahasa terkait dengan budaya secara indeksikal (*indexically related*); (2) bahasa terkait dengan budaya secara simbolis; dan (3) bahasa terkait dengan budaya secara sebagian-sebagian dan secara keseluruhan.

Bahasa dikatakan berkaitan dengan budaya secara indeksikal karena hanya dengan bahasa yang bersangkutanlah artifak yang dihasilkan budaya itu dapat disebutkan dengan tepat. Demikian pula, pengungkapan nilai-nilai budaya dan pandangan dunia hanya dapat dilakukan secara tepat dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan. Menurut Fishman (hal. 20), hal itu dimungkinkan karena bahasa dan budaya telah tumbuh bersama-sama selama jangka waktu yang begitu lama sehingga tercipta hubungan yang sangat serasi di antara keduanya.

Bahasa dikatakan terkait dengan budaya secara simbolis karena yang satu menjadi simbol dari yang lain. Berbahasa Bali, misalnya, adalah lambang identitas budaya Bali, yang selanjutnya berimplikasi bahwa orang Bali yang tidak dapat berbahasa Bali tidaklah mewakili identitas budaya Bali, dan pada gilirannya tidak mewakili budaya Bali.

Bahasa dikatakan terkait dengan budaya karena baik secara sebagian maupun secara keseluruhan terdapat kesalingrujukan dan ketergantungan di antara keduanya. Bagian-bagian tertentu, atau bahkan keseluruhan budaya itu diungkapkan, dilaksanakan dan direalisasikan dengan menggunakan bahasa yang secara tradisional dipakai untuk itu. Begitu banyak bagian dari budaya diungkapkan (terutama secara verbal), seperti nyanyian (tembang), mantra, adat-istiadat, peribahasa, sejarah, piwulang (pelajaran), dongeng, cara bertegur sapa, makian, dan falsafah sehingga kalau diungkapkan dengan menggunakan bahasa lain, daya magisnya, cita rasanya, daya tariknya akan hilang. Sedemikian erat hubungan di antara bahasa dan

budaya di dalam hal ini sehingga dapat dikatakan bahwa pola sosialisasi anak, langgam budaya hubungan antarpersonal, prinsip-prinsip etika yang menopang kehidupan sehari-hari, semuanya berkaitan dengan bahasa yang secara tradisional dipakai untuk itu. Tidaklah berlebihan jika Bassnett (1992: 14) mengibaratkan bahasa dengan jantung ketika dia mengatakan "*language is the heart within the body of culture.*"

Eratnya hubungan di antara bahasa dan kebudayaan itu dipertegas oleh Smolicz (1980: 1), yang mengatakan bahwa nilai-nilai inti (*core values*) merupakan salah satu komponen yang paling dasar dari kebudayaan suatu masyarakat dan bahwa bagi masyarakat tertentu, misalnya masyarakat Polandia (hal. 2), nilai-nilai inti itu mencakupi bahasa. Artinya, bahasa adalah penghubung yang tidak terlarutkan (*indissoluble link*) yang menentukan masyarakat Polandia sebagai kelompok sosial dan budaya yang membedakannya dari masyarakat yang lain. Tampaknya, bagi banyak kelompok etnik di Indonesia, bahasa merupakan bagian dari nilai-nilai inti itu, dan karenanya kematian bahasa tertentu akan menyebabkan kematian budaya yang bersangkutan.

3. Pergeseran BD

Sebuah bahasa dikatakan bergeser atau mengalami pergeseran jika dan bila para anggota suatu masyarakat bahasa secara kolektif (mulai) tidak lagi menggunakan bahasa tradisional mereka, dan alih-alih itu mereka (mulai) menggunakan bahasa yang lain. Lawan dari pergeseran bahasa adalah pemertahanan bahasa, dan hal ini terjadi jika dan bila masyarakat bahasa yang bersangkutan tetap menggunakan bahasa tradisional mereka walaupun misalnya ada desakan dari bahasa lain.

Ada beberapa alasan mengapa suatu bahasa terdesak oleh bahasa lain. Alasan-alasan itu dapat berupa faktor sosiolinguistik, faktor demografis, faktor psikologis, dan faktor ekonomik. Bekerjanya faktor-faktor ini terutama dipicu oleh adanya persaingan bahasa. Di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa persaingan yang ada adalah persaingan di antara bahasa Indonesia (BI) dan bahasa daerah (BD).

Adanya persaingan menyebabkan ada bahasa yang dapat kalah bersaing. Bahasa yang kalah bersaing itu menjadi terancam dan biasanya terdesak ke ranah rumah: ia terutama dipakai oleh anggota rumah tangga di antara mereka di rumah mengenai topik-topik kerumahtanggaan. Jika desakan itu berkelanjutan, akhirnya bahasa

yang terancam itu dapat punah atau menjadi bahasa seremonial belaka.

Kekalahan BD dalam bersaing dengan BI itu antara lain disebabkan oleh perbedaan kekuatan di antara keduanya. Di dalam hal ini, Gunarwan (1999) membandingkan kekuatan BD dan BI itu berdasarkan konsep geolinguistik seperti yang dikemukakan oleh Mackey (1973). Hasil perbandingan itu terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Perbandingan kepadaan geolinguistik antara BI dan BD

Kekuatan Bahasa	Indikator	Hasil Perbandingan
Kekuasaan Bahasa	(1) Demografi	BI>BD
	(2) Dispersi	BI>BD
	(3) Mobilitas	BI>BD
	(4) Ekonomi	?
	(5) Ideologi	BI=BD (?)
	(6) Kebudayaan	BI>BD
Daya Tarik Bahasa	(1) D T Status	BI>BD
	(2) D T Teritorial	BI>BD
	(3) D T Interlingual	BI>BD
Daya Tekan Bahasa	(1) Ciri-ciri Perilaku	BI>BD
	(2) Akulturasi Konsep	BI>BD (?)

Sumber: Gunarwan (1999)

Di dalam hal demografi, BI memang atas BD karena jumlah penutur BI (baik yang asli maupun yang bukan) adalah jauh lebih besar daripada jumlah penutur BD yang jumlah penuturnya sangat besar, misalnya bahasa Jawa. Apalagi jika BI itu disebut sebagai bahasa Melayu (BM) (nama aslinya), sehingga ia mencakup Bahasa Malaysia, bahasa Melayu Brunei Darussalam, bahasa Melayu Singapura (dan konon ada bahasa Melayu Muang Thai Selatan dan Filifini Selatan).

Menurut Mackey, indikator demografi juga mengacu ke penghasilan per kapita, dan di dalam hal ini akan menarik jika pendapatan per kepala penutur suatu BD dibandingkan dengan

pendapatan per kepala rakyat negara-negara ber-BM. Karena tertopang oleh pendapatan per kepala rakyat Brunei Darussalam, Malaysia dan (penutur bahasa Melayu) Singapura, dapat kita duga dengan kemungkinan kesalahan yang kecil bahwa di dalam hal ini BD cenderung kalah dari BI/BM. Singkatnya $BI > BD$ di dalam hal demografi.

Di dalam hal dispersi atau persebaran dapat kita asumsikan, tanpa harus menggunakan rumus-rumus Mackey, bahwa BI menang atas BD, bahkan BD yang jumlah penuturnya sangat besar seperti bahasa Jawa. Daerah penggunaan BI adalah dari Sabang sampai Merauke dan bahkan mencakupi Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan daerah penggunaan bahasa Jawa terbatas di Jawa Tengah, D I Yogyakarta, dan sebagian besar provinsi Jawa Timur. (Ada penutur bahasa Jawa di Suriname dan Kaledonia Baru, tetapi jumlah penuturnya tidak besar dan tampaknya menyusut dengan cepat.)

Di dalam hal mobilitas tampaknya penutur BI dapat lebih luas bergerak daripada penutur yang hanya tahu BD saja. Di dalam konsep geolinguistik Mackey, indikator ini diukur berdasarkan jumlah warga suatu negara yang berbahasa X ke negara lain per tahun serta berapa jarak ibu kota negara itu ke tempat yang dikunjunginya. Untuk makalah ini, perhitungan itu dapat kita dasarkan pada berapa orang penutur bahasa daerah X bepergian ke tempat lain per tahun, serta berapa jarak tempat yang dikunjunginya dari ibu kota provinsi yang bersangkutan. Sekali lagi, tanpa menguantifikasikan variabel ini, dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal mobilitas ini penutur asli BI/BM berjumlah lebih besar daripada penutur BD. Di dalam tinjauan geolinguistik ini berarti bahwa $BI/BM > BD$.

Di dalam kuantifikasi geolinguistik itu Mackey menghitung variabel mobilitas itu secara horisontal saja. Kita dapat juga menghitung variabel ini secara vertikal. Di dalam hal ini barangkali kita dapat menghitung jumlah warga masyarakat daerah tertentu yang berhasil bergerak ke atas dalam arti menduduki jabatan-jabatan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penutur jati BI/BM yang juga berhasil menduduki jabatan-jabatan tinggi. Tertakluk kepada penelitian yang canggih, tampaknya dapat diasumsikan bahwa $BI/BM = BD$.

Mackey menghitung indikator ekonomi berdasarkan produk yang dihasilkan oleh negara atau negara-negara yang berbahasa tertentu. Dapat kita duga bahwa produk ekonomi suatu masyarakat BD tidak dapat menyamai produk ekonomi negara Indonesia. Namun, setidaknya dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal indikator ekonomi ini BI dan BD tidak dapat disandingkan di dalam persaingan.

Mackey menguantifikasikan indikator ideologi berdasarkan apakah bahasa yang ditinjau kekuatannya itu dipakai sebagai pengemban suatu ideologi (misalnya dulu bahasa Rusia adalah pengemban ideologi marxis) dan kemudian kuantifikasi dihitung berdasarkan jumlah penuturnya. Kalau suatu bahasa tidak dipakai sebagai bahasa pengemban ideologi, kuantifikasi dilakukan berdasarkan apakah bahasa itu dipakai sebagai bahasa liturgi (misalnya bahasa Latin dan Arab) dan penghitungan didasarkan pada berapa jumlah pemeluk agama yang bersangkutan. Karena BI dan BD bukan pengemban ideologi (kecuali, mungkin, ideologi Pancasila bagi BI), dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal indikator ideologi ini BD tidak kalah dan BI.

Mackey menguantifikasikan indikator kebudayaan berdasarkan jumlah judul buku yang diterbitkan di dalam suatu bahasa. Di Indonesia jumlah judul buku yang ditulis di dalam BI jelas jauh lebih besar daripada jumlah judul buku yang ditulis di dalam BD. Karena itu dapat kita asumsikan bahwa di dalam hal indikator kebudayaan ini BI > BD.

Mackey membagi daya tarik bahasa menjadi tiga, yakni (1) daya tarik status, (2) daya tarik interlingual dan (3) daya tarik teritorial. Yang pertama itu mengacu ke status atau gengsi. Daya tarik status suatu bahasa diukur berdasarkan apakah bahasa itu berstatus bahasa kenegaraan, resmi atautkah sekadar vernakular yang statusnya tidak tinggi. Mengingat bahwa di negara kita BI adalah bahasa negara dan bahwa BD mungkin berfungsi hanyalah sebagai bahasa resmi kedaerahan, dapat kita simpulkan bahwa status BI lebih tinggi daripada status BD, dan karenanya daya tarik orang daerah untuk mempelajari BI, lepas dan kenyataan bahwa BI adalah bahasa pengantar di berbagai-bagai ranah, adalah lebih besar daripada daya tarik orang daerah mempelajari BD, bahkan BD mereka sendiri sekalipun.

Daya tarik interlingual suatu bahasa mengacu ke kekuatan bahasa itu untuk dipelajari oleh anggota masyarakat bahasa yang lain karena adanya banyak kesamaan kedua bahasa yang bersangkutan. Banyaknya kesamaan bahasa akan cenderung memudahkan orang mempelajari bahasa yang mempunyai daya tarik itu. Karena pada umumnya BI dan BD adalah bahasa-bahasa serumpun, dapat kita inferensikan bahwa orang daerah akan mudah mempelajari BI. Jadi, di dalam hal ini BI > BD.

Daya tarik teritorial mengacu ke kedekatan lokasi suatu masyarakat bahasa ke masyarakat bahasa yang lain. Sekadar contoh, daya tarik teritorial bahasa Turki bagi penutur BI adalah kecil karena

jauhnya letak Turki dari Indonesia. Sebaliknya, daya tarik teritorial bahasa Prancis bagi orang Belanda adalah besar karena kedekatan Negeri Belanda dari Prancis. Di dalam hal BI, lokasinya dapat dikatakan bertumpang tindih dengan lokasi BD, dan karena itu daya tarik teritorial BI bagi penutur BD besar. Di dalam konsep geolinguistik Mackey, hal ini dikatakan bahwa BI rnenang alas BD atau $BI > BD$.

Faktor yang ketiga, daya tekan bahasa, mengacu ke seberapa besar suatu bahasa menekan bahasa yang lain karena dominasi bahasa yang menekan itu. Mackey merinci faktor ini menjadi dua indikator, yaitu (1) ciri-ciri perilaku dan (2) akulturasi konsep. Yang pertama itu berkaitan dengan seberapa sering perilaku berbahasa seseorang dipengaruhi oleh suatu bahasa: di ranah pekerjaan, di ranah hiburan, di radio, televisi atau media yang lain. Di Indonesia keterpaparan (*exposure*) warga daerah terhadap BI jelas lebih besar daripada terhadap BD sehingga di dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa $BI > BD$.

Indikator yang kedua oleh Mackey dikuantifikasikan berdasarkan semacam tes, yakni berapa kata disebutkan di dalam suatu bahasa alih-alih bahasa lain oleh seseorang bila ia diminta untuk menyebutkan kata dengan cepat, dengan diberi konsepnya. Jika jumlah kata di dalam bahasa X lebih besar daripada jumlah kata di dalam bahasa Y, hal ini menunjukkan bahwa bahasa $X >$ bahasa Y.

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan (1) bahwa BI dan BD memang bersaing dan (2) bahwa di dalam persaingan itu BD cenderung kalah dan terdesak.

Gejala tergesernya BD karena desakan BI itu terjadi pada bahasa Lampung (BL) (Gunarwan, 1994). Hal ini dapat diinferensi dari pola pemilihan bahasa yang digunakan di ranah rumah oleh 233 orang warga keluarga Lampung, seperti yang terlihat di dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Skala implikasional pemilihan BI atau BL di ranah rumah
menurut kelompok umur responden survei (N=233)

Kelompok Umur	N	Nilai Rata-Rata Pemilihan
≥ 60	9	1.00
51 - 60	18	1.00
41 - 50	27	1.21
31 - 40	64	2.02
21 - 30	84	2.39
≤ 20	34	3.43

Sumber: Gunarwan (1994)

(1=selalu/jampir selalu BL; 2=BL>BI; 3=BL>BI; 4=BL>BL;
 5=selalu/hampir selalu BI)

Skalabilitas=100%

Seperti yang terlihat pada Tabel 2 itu, makin muda orang Lampung, makin besar kecenderungannya menggunakan BI aiih-alih BL di ranah rumah. Jika gejala ini berkelanjutan, dapat dibayangkan bahwa lama-lama BL akan mengalami kematian, yakni setelah generasi tertentu tidak lagi mewariskan BL kepada generasi berikutnya.

Dapat diasumsikan bahwa kecenderungan tergesernya bahasa berkaitan dengan jumlah penuturnya: bahasa minor lebih cenderung lebih cepat tergeser daripada bahasa mayor. Jika asumsi ini benar, tampaknya hal ini menjelaskan mengapa bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terutama yang termasuk bahasa minor, banyak yang tergeser. Bagaimanapun, pada akhirnya yang menentukan adalah para penutur bahasa yang bersangkutan, sesuai dengan pandangan yang sekarang berterima di kalangan pakar sosiolinguistik atau sosiologi bahasa. Satu contoh adalah bahasa Bayso di Etiopia Selatan (Brenzinger, 1991), seperti yang dikutip oleh Mesthrie (1999: 44), yang walaupun jumlah penuturnya hanyalah sekitar 500 orang pada 1990, ia telah berhasil bertahan selama 1000 tahun.

Bahasa mayor seperti bahasa Jawa (BJ) pun tidak bebas dari kecenderungan mengalami pergeseran. Seperti yang ditemukan Gunarwan (1996, 2000, 2002 a, 2002 b) dewasa ini tidak sedikit keluarga muda di kota-kota di Jawa mulai menggunakan BI di ranah rumah. Dari penelitian survei di kalangan orang Jawa, dengan 103 responden dari Yogyakarta dan 93 responden dan Surabaya,

ditemukan (Gunarwan, 2002b) bahwa nilai pemilihan bahasa untuk ranah rumah menurun secara taat asas dengan menurunnya parameter umur. Dengan membagi semua responden menjadi empat kelompok (sesuai dengan hasil pengelompokan Duncan), nilai pemilihan bahasa untuk masing-masing adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Nilai pemilihan bahasa di ranah rumah responden Jawa berdasarkan variabel kelompok umur (empat kategori)

No.	Kelompok Umur	N	Nilai
1.	41 - 50, 51 - 60, \geq 61	82	4,568
2.	31 - 40	46	4,113
3.	21 - 40	40	3,513
4.	< 20	28	2,786

Sumber: Gunarwan (1994)

Seperti yang tersirat, kuantitas penggunaan BJ cenderung turun, dan sebaliknya kuantitas penggunaan BI cenderung naik menurut parameter umur.

Yang menarik adalah bahwa nilai penggunaan BJ itu berkorelasi positif dengan sikap terhadap BJ (Gunarwan, 2002b), seperti yang terlihat pada Gambar 1 ini. Artinya, makin negatif sikap responden terhadap BJ, makin menurunlah kuantitas penggunaan BJ. Jika kelak BJ benar-benar mati, tidak kurang dari Fishman (komunikasi pribadi) yang menyayangkannya.

Attitude Index	Choice Index		
Attitude Index	Pearson Correlation	1.000	
	Sig. (2-tailed)		470**
	N	196	196
Choice Index	Pearson Correlation	470	
	Sig. (2 tailde)	000	1.000
	N	196	196

**=Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Sumber: Gunarwan (2002b)

Gambar 1. Faksimile korelasi Pearson antara sikap terhadap BJ dan penggunaan BJ

Anehnya, kecenderungan pergeseran BJ ini belum (tidak?) menarik perhatian masyarakat Jawa atau bahkan pakar-pakar atau linguis-linguis BJ. Hal ini berbeda dengan masyarakat Lampung, yang mulai mengusahakan pembalikan pergeseran BL begitu mereka mengetahui bahwa bahasa mereka terancam.

Penelitian pemakaian bahasa di kalangan keluarga Bali (di daerah Singaraja dan Denpasar) (Gunarwan, 2001a) dan di kalangan keluarga Banjar (di Banjarmasin) (Gunarwan, 2001b) juga menunjukkan gejala yang serupa: terjadi ketirisan diglosia BI-BD. Yang perlu dicatat ialah bahwa ketirisan diglosia bahasa Indonesia-bahasa Banjar itu kecil sekali, seperti yang tersirah dari hasil pengelompokan Duncan (Uji Tebaran Ganda Duncan) yang berikut (Gambar 2).

Duncan's Multiple Range Test for variable X41D $\alpha=0,05$ $df=104$ $MSE=0.502246$				
Duncan Grouping		Mean	N	Age
	A	4,750	4	≥ 61
	A			
B	A	4,476	21	51 - 60
B	A			
B	A	4,429	35	41 - 50
B	A			
B	A	4,200	10	31 - 40
B	A			
B	A	*4,185	27	≤ 20
B				
B		4,000	13	21 - 30

Sumber: Gunarwan (2001b)

Gambar 2. Faksimile pengelompokan Duncan atas data pemilihan bahasa Banjar menurut variabel kelompok umur di kalangan warga Banjarmasin

Tertakluk kepada penelitian yang lebih canggih, dapat diduga bahwa kecilnya ketirisan diglosia bahasa Indonesia-bahasa Banjar itu adalah akibat tingginya vitalitas etnolinguistik suku Banjar.

4. Pembalikan Pergeseran Bahasa

Bagi bahasa yang sedang bergeser, pertanyaannya adalah apakah pergeseran bahasa itu harus dihentikan (dan kalau dapat dibalikkan) ataukah dibiarkan terus bergeser dan akhirnya bahasa itu mati. Fishman (1991) mengibaratkan bahasa yang sedang mengalami pergeseran itu sebagai anggota keluarga yang sedang sakit. Terserah kepada keluarganya apakah si sakit dicarikan obat agar (dapat) sembuh atau dibiarkan terus sakit, sakitnya lebih parah, dan akhirnya mati. Jika ia dibiarkan mati, mungkin pertimbangannya adalah bahwa penyakitnya sudah terlalu parah atau bahwa sekiranya ia disembuhkan, ia tidak akan berguna lagi. Mungkin ketidakbergunaan bahasa yang dihidupkan lagi itu berkaitan dengan masalah yang diperoleh dari usaha pelestariannya. Atau, mungkin juga, hal itu disebabkan oleh pemikiran masyarakatnya bahwa bahasa mereka dianggap bukan bagian yang penting dari core value keetnisan masyarakat itu, seperti halnya bahasa Gaelik bagi masyarakat Irlandia, menurut Smolicz (1980: 6)

Sebagai salah satu usaha yang keberhasilannya banyak dipertanyakan), bahasa yang terancam perlu diajarkan di sekolah. Menurut Hinton (1999), pengajaran bahasa yang sedang terancam berbeda dengan pengajaran bahasa yang tidak terancam. Tujuannya jelas berbeda, dan implikasi yang dapat ditarik dari pendapat Hinton adalah bahwa tujuan pengajaran bahasa yang sedang terancam hendaklah tidak ditekankan pada aspek kognitif semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah aspek afektif, yakni agar pemelajar bersikap positif dan mencintai bahasa itu.

Sesuai dengan pandangan yang berterima sekarang, yakni bahwa hidup atau matinya bahasa bergantung kepada para penuturnya, keputusan membiarkan bahasa bergeser atau bertahan itu semata-mata bergantung kepada sikap masyarakat bahasa itu sendiri. Tidak ada yang dapat diusahakan oleh pakar mana pun serta dengan jalan apa pun untuk membalikkan pergeseran bahasa jika dan bila masyarakat bahasa itu sendiri sudah berkeputusan untuk membiarkan bahasanya mati.

Ada lagi alasan yang "nasionalistik" mengapa pergeseran BD tidak perlu dibalikkan. Alasan ini mengacu ke istilah yang dikemukakan oleh Fishman (1972), seperti yang diulas oleh Fasold (1984: 2-7). Kedua-dua istilah itu ialah nasionisme dan nasionalisme. Yang pertama itu berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di dalam arti luas. Yang kedua mengacu ke perasaan yang tumbuh (dan

kemudian menjadi dasar) dari nasionalitas, yakni satuan sosiokultural yang terdiri atas orang-orang sebagai anggota-anggota suatu satuan sosial yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Nasionalitas itu ada bukan karena skala lokal semata-mata. Pengertian nasionalitas menurut Fishman ini berbeda dengan pengertian suku atau kelompok etnik, yang ia perikan sebagai satuan sosiokultural yang lebih sederhana, lebih kecil, lebih partikularistik dan lebih lokalistik daripada pengertian nasionalitas itu. Jadi, sebagai satuan sosiokultural, nasionalitas lebih besar daripada suku atau kelompok etnik.

Peran bahasa di dalam nasionisme berbeda dengan peran bahasa di dalam nasionalisme. Masih menurut Fishman, ada dua bidang yang di dalamnya bahasa memegang peran penting: (1) administrasi pemerintahan umum dan (2) pendidikan. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan komunikasi di dalam dan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang ada serta di antara pemerintah dan rakyat. Tentu saja untuk komunikasi itu diperlukan bahasa, dan sepanjang yang berkaitan dengan keefisienan (dan keefektifan) komunikasi, bahasa apa pun boleh dipakai. Karena tuntutananya bersifat pragmatis, bahasa yang paling tinggi derajat keefisienannya yang patut dipilih sebagai alat komunikasi agar nasion yang bersangkutan berfungsi secara efektif di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak menjadi masalah apakah bahasa itu berasal dari luar wilayah negara atau apakah ia adalah bahasa setempat.

Pendidikan juga memerlukan bahasa, yakni bahasa pengantar. Di dalam hal ini, sepanjang yang berkaitan dengan keefisienan komunikasi, bahasa apa pun dapat dipakai dan, seperti halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan, bahasa yang patut dipilih adalah bahasa dengan derajat keefisienan yang paling tinggi.

Peran bahasa dalam nasionalisme ternyata lebih subtil. Hal ini karena bahasa—seperti juga kebudayaan, agama dan sejarah—merupakan komponen nasionalisme. Masih menurut Fishman, "language serves a link with 'the glorious past' and with authenticity" (Fasold, 1984: 3). Bahasa bukanlah sekadar wahana sejarah suatu nasionalitas; ia adalah sejarah itu sendiri. Sepanjang yang menyangkut otentisitas, yang baik adalah jika suatu nasionalitas mempunyai bahasanya sendiri (bukan bahasa nasionalitas yang lain atau yang "diimpor" dari wilayah lain) sebagai komponen dan simbol nasionalismenya.

Peran lain yang dipunyai bahasa dalam kaitannya dengan nasionalisme adalah apa yang oleh Garvin dan Mathiot (1956) disebut

fungsi pemersatu (unifying) dan pemisah (separatist). Fungsi yang pertama itu mengacu ke perasaan para anggota suatu nasionalitas bahwa mereka disatupadukan serta diidentifikasi dengan orang-orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. Fungsi yang kedua itu merujuk ke perasaan para anggota suatu nasionalitas bahwa mereka berbeda dan terpisah dari orang-orang yang berbahasa lain. Dapat diduga dari sinilah timbulnya pendapat bahwa BD tidak perlu dilestarikan: BD berpotensi melemahkan rasa nasionalisme.

Dari apa yang dikemukakan di atas, tampaknya kita dihadapkan kepada dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, demi nasionalisme dan nasionalisme, BD perlu dibiarkan bergeser, terus bergeser, dan akhirnya pupus. Di sisi yang lain, BD perlu dilestarikan agar kebudayaan daerah (KD) tidak menjadi lemah dan, implikasinya, agar budaya bangsa tetap kukuh dan kebijakan kemajemukan budaya dapat diteruskan.

Jika demi kukuhnya budaya bangsa BD memang harus dilestarikan, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mengusahakannya. Yang jelas, mempertahankan BD yang tidak bergeser saja sulit, apalagi membalikkan pergeseran bahasa. Diperlukan usaha yang terencana dengan baik, lengkap dengan rumusan visi dan misi, serta cetak baru dan sistem pemantauan pelaksanaan rencana yang juga baik.

Singkatnya, untuk usaha pembalikan pergeseran bahasa (PPB), kita perlu teori agar usaha kita tidak asal membalikkan arah bahasa yang sedang terancam. Teori itu, yang dapat dianggap sebagai bagian dari teori perencanaan (perancangan) status bahasa, dikemukakan oleh Fishman (1990, 1991, 1993). Gaung teori ini, yang sekarang lazim disebut teori PPB, tampaknya belum banyak berkumandang di Indonesia, dan karena itu ada baiknya jika ia disinggung-singgung di sini.

Titik tolak teori ini adalah bagaimana kita mendiagnosis dan "merawat" bahasa yang terancam. Untuk mendiagnosis itu Fishman membuat skala yang mengingatkan kita kepada skala Richter: makin tinggi skalanya, makin kuat goncangan gempanya, dan analoginya adalah makin kuat keterancaman bahasa yang bersangkutan. Skala 8 mencerminkan keterancaman yang paling buruk: bahasa yang bersangkutan sudah hampir punah, dari penuturnya tinggal orang-orang tua, yang di dalam usaha pembalikan itu dijadikan sumber korpus bahasa. Skala 1 mencerminkan keadaan yang paling baik: bahasa yang pernah terancam itu sekarang sudah dipakai di sekolah, tempat

bekerja, pemerintahan, dan media.

Jadi, PPB dimulai dengan mengenali (mengidentifikasi) derajat keterancaman bahasa yang bersangkutan. Di sini peran peneliti bahasa sangatlah penting. Langkah-langkah berikutnya adalah menyusun program PPB sesuai dengan skala yang teridentifikasi itu. Jika program di tingkat skala ini dinilai berhasil, langkah selanjutnya adalah menyusun program PPB pada tingkat yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya sehingga tercapai tingkat yang aman, yang ditandai oleh terjaminnya kelangsungan transmisi antargenerasi bahasa yang pernah terancam itu.

Agar lebih jelas, berikut ini adalah ringkasan teori PPB Fishman tersebut dalam bentuk skala, yang ia sebut Graded Intergenerational Dislocation Scale (GIDS), yang menunjukkan babak-babak yang perlu dilalui PPB. Secara lengkap GIDS itu adalah seperti yang di bawah ini. (Cara membacanya adalah dari bawah ke atas.)

1. Pendidikan, tempat kerja, media massa, pelaksanaan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi dan di tingkat nasional.
2. Media massa dan layanan pemerintahan lokal/regional.
3. Tempat kerja lokal/regional, baik di antara sesama penutur bahasa yang bersangkutan maupun di antara penutur bahasa itu dan penutur bahasa lain.
4. Sekolah umum bagi anak-anak masyarakat bahasa yang bersangkutan, yang sebagian pelajarannya diberikan di dalam bahasa tersebut, tetapi yang pengawasan kurikuler dan penentuan staf terutama dilakukan di dalam bahasa yang lain (yakni bahasa yang lebih dominan/bahasa nasional).
- 4a. Sekolah alih-alih pendidikan wajib, dan pengawasan kurikuler dan penentuan staf terutama dilakukan di dalam bahasa yang bersangkutan.
- II. PPB bertujuan melampaui diglosia, setelah diglosia tercapai**
5. Sekolah untuk pemerolehan keaksaraan (literacy), bagi orang tua dan orang muda, dan bukan alih-alih pendidikan wajib.
6. Ranah rumah-keluarga-lingkungan yang merupakan konsentrasi antargenerasi dan demografi: basis untuk transmisi bahasa yang PPB-nya sedang diusahakan.
7. Interaksi budaya dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan, yang melibatkan generasi-generasi yang lebih tua, yang berbasis komunitas.
8. Merekonstruksi bahasa yang terancam dan pemerolehan bahasa itu di kalangan orang dewasa.

I. PPB bertujuan mencapai diglosia

Tujuan I bagi kita adalah bagaimana menciptakan diglosia BI-BD. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia konstelasi BI dan BD tidak dapat lain: BI berfungsi Tinggi (T) dan BD berfungsi Rendah (R), kecuali kalau kita ingin mendirikan negara baru dengan BD sebagai bahasa nasionalnya. Jadi, bagi kita usaha PPB dapat dikatakan berhasil jika dan bila BD lestari dipakai di ranah R dan BI di ranah T. Yang menjamin transmisi antargenerasi BD adalah tetap dipakainya BD itu di ranah rumah atau keluarga, terlebih lagi jika ia tetap dipakai di ranah yang lebih luas. Jadi, minimal BD harus dipakai oleh orang tua kepada anak di rumah. Inilah yang dapat menghindari terjadinya disrupsi pewarisan BD itu. Inilah yang dapat menangkal terjadinya diskontinuitas pewarisan BD.

5. Penutup

Alur pikiran yang diikuti di dalam penulisan makalah ini ialah bahwa di dalam negara Indonesia yang menganut pandangan kemajemukan budaya atau cultural pluralism (alih-alih cultural singularism), kebudayaan daerah (KD) perlu dipelihara sebagai penopang kebudayaan bangsa. Salah satu cara untuk melestarikan KD adalah dengan melestarikan BD, yang adalah jantung KD itu. Jadi, inferensinya adalah bahwa untuk memperkuat budaya bangsa, secara tidak langsung kita wajib menjaga agar BD tidak bergeser dan, akhirnya, tidak pupus.

Pembalikan pergeseran BD sebagai usaha pembinaan BD adalah usaha yang sah karena penjelasan konstitusi telah menetapkan bahwa bahasa-bahasa yang dibina oleh masyarakat pamakainya dihargai dan dipelihara oleh negara karena bahasa-bahasa itu adalah bagian daripada kebudayaan Indonesia yang hidup. Atas dasar ini sudah sepatutnya jika Pusat Bahasa, misalnya, ikut aktif dan bahkan proaktif membina BD. Pemerintah pun perlu ikut aktif membiayai usaha-usaha itu agar ia tidak dituduh menjalankan kebijakan pembunuhan bahasa (*linguicide*). Masyarakat daerah sendiri harus aktif dan proaktif melaksanakan pembinaan itu dengan membentuk semacam tugas utama menyusun perencanaan pembalikan pergeseran BD, dan perencanaan itu, agar mempunyai probabilitas keberhasilan, haruslah yang baik, lengkap dengan deskripsi visi dan misi yang jelas, termasuk deskripsi strategi-strategi yang akan ditempuh. Teori pembalikan pergeseran bahasa (Fishman, 1991) perlu dipertimbangkan.

Alih-alih pembentukan satuan tugas seperti itu (yang

dimungkinkan di dalam konteks otonomi daerah), pembinaan BD dapat diserahkan kepada Balai Bahasa di daerah yang sudah waktunya didirikan oleh Pusat Bahasa di semua provinsi. Yang tidak kurang pentingnya adalah mencari perintis pembinaan BD, seperti Ben Yehuda di Israel dulu, yang tanpa mengenal lelah memikirkan, mengusulkan, melaksanakan usaha-usaha pembinaan BD.

Usaha pembinaan BD itu hendaklah menjadi bagian dari usaha pembinaan kebudayaan daerah (KD). Konsekuensinya adalah bahwa otonomi daerah hendaklah tidak terbatas pada otonomi politik dan ekonomi, tetapi mencakupi juga otonomi kebudayaan.

Sekiranya ada tuduhan bahwa usaha-usaha pembangkitan BD dan KD itu sama saja dengan pembangkitan provinsialisme atau primordialisme daerah, hal ini dapat dibantah bahwa soal pelestarian bahasa (dan budaya) daerah ini adalah soal hak asasi manusia, dan hal ini dijamin oleh PBB, yang di dalam Pasal 27 dari International Covenant on Civil and Political Rights (1966) dinyatakan:

"In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in conformity with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language."

Sebagai penutup, tampaknya ada empat belas hal yang perlu kita pertimbangkan jika kita hendak memperkuat budaya bangsa melalui pemantapan peran BD. Hal-hal itu adalah sebagai berikut:

- (1) BD memang secara potensial dapat berperan sebagai penopang KD, yang pada gilirannya dapat berpotensi memantapkan budaya bangsa.
- (2) Agar dapat menjalankan perannya, BD harus dijaga agar tidak bergeser.
- (3) BD, dan juga semua bahasa pada umumnya, dapat dijaga agar tidak bergeser jika transmisi antargenerasi tidak terganggu. Dengan perkataan lain, BD mempunyai peluang tidak akan bergeser jika tidak terjadi disrupsi atau dislokasi pewarisan antargenerasi BD itu.
- (4) Disrupsi pewarisan antargenerasi BD tidak akan terjadi jika ia dipakai secara berkelanjutan minimal di dalam ranah rumah (keluarga).

- (5) Yang dapat menyebabkan BD tergeser adalah adanya disrupsi transmisi antargenerasi BD itu. Hal ini terjadi jika orang tua tidak mengajarkan (menggunakan) BD itu kepada generasi berikutnya, yang berarti generasi ini tidak akan mengajarkannya kepada generasi berikutnya lagi karena mereka tidak menguasai BD itu.
- (6) Pergeseran BD tidak dapat dibalikkan dengan mengajarkannya di sekolah, apalagi jika pengajarannya menekankan aspek kognitif belaka alih-alih aspek afektif.
- (7) Implikasi butir (6) itu ialah bahwa pengajaran menulis dan membaca huruf atau aksara daerah tidak dapat menjamin BD tidak bergeser. Hal yang sama juga berlaku pada penggunaan huruf atau aksara daerah untuk nama jalan.
- (8) Untuk pembalikan pergeseran BD kita harus puas jika dan bila kita berhasil mendudukkan BD sebagai pengemban fungsi Rendah di dalam situasi diglosik yang melibatkan BI sebagai pengemban fungsi Tinggi. Yang penting adalah menjaga agar diglosia itu tidak tiris.
- (9) Untuk mendudukkan BD sebagai bahasa ranah Rendah (rumah, keluarga, persahabatan intraetnik), perlu ada gerakan sosial berbahasa daerah.
- (10) Gerakan sosial itu sebaiknya dimotori oleh orang (atau orang-orang) daerah yang mencintai BD dan KD, dengan dukungan finansial, institusional, dan implementasional dari pemerintah melalui Pusat Bahasa dan Balai-Balai Bahasa.
- (11) Perlu dibina kerja sama di antara para pembina BD, Balai Bahasa, dan universitas di daerah untuk mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembalikan pergeseran bahasa daerah. Pedoman penelitian untuk itu hendaklah dibuat oleh Pusat Bahasa. Demikian pula, Pusat Bahasa perlu membekali Balai-Balai Bahasa dengan teori PPB.
- (12) Usaha PPB, sebagaimana usaha pada umumnya, mempunyai peluang berhasil dan peluang gagal. Tampaknya, peluang berhasil banyak berkaitan dengan vitalitas etnolinguistik masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang perlu dibina.
- (13) Gerakan sosial PPB perlu dilakukan, senyampang pada umumnya keterancaman BD belum mencapai skala 8 pada GIDS. Lagi pula, kita perlu memanfaatkan proyeksi Naisbitt (1994), yang mengatakan bahwa ketika bahasa Inggris menjadi bahasa kedua bagi kebanyakan orang—akibat globalisasi—bahasa ibunda menjadi lebih penting, dan karenanya para penuturnya akan

berusaha mempertahankannya.

- (14) Agar pembalikan pergeseran BD mempunyai pijakan hukum, perlu ada Undang-Undang Kebahasaan yang mencakupi pasal-pasal tentang PPB. Kalau rencana undang-undang sudah dibuat, ia perlu disosialisasikan, agar masukan-masukan dapat diberikan oleh mereka yang berminat.

Tak Melayu hilang di bumi, kata Hang Tuah. Orang-orang daerah sepatutnya bersemboyan "Tak BD hilang di bumi!"

Rujukan

- Basnett, S. 1992. *Translation Studies*. London/New York: Methuen
- Fasold, Ralph W. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. Oxford/New York: Basil Blackwell
- Fishman, Joshua A. 1972. *Language and Nationalism*. Rowley, MA: Newbury House
- Fishman, Joshua A. 1990. What is reversing language shift (RLS) and how can it succeed? *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. Vol. 11, No. 1 & 2, 5-36
- Fishman, Joshua A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Language*. Clevedon, UK: Multilingual Matters
- Fishman, Joshua A. 1993. Reversing language shift: Successes, failures, doubts and dilemmas. Dalam E.H. Jahr [ed.]. 69-81
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Princeton (?), USA: Basic Books
- Gunarwan, Asim. 1994. The encroachment of Indonesian upon the home domain of the Lampung language use: A study of the possibility of a minor-language shift. Makalah pada Konferensi Internasional VII Linguistik Austronesia. Leiden, 22-27 Agustus
- Gunarwan, Asim. 1996. Tindak tutur mengkritik dengan parameter umur di kalangan penutur jati bahasa Jawa: Implikasinya pada pembinaan bahasa. Makalah pada Kongres II Bahasa Jawa. Malang, 22-26 Oktober
- Gunarwan, Asim. 1999. Kedudukan dan tantangan bahasa daerah di dalam abad yang akan datang. Makalah pada Kongres Linguistik Nasional, Jakarta, 28--31 Juli
- Gunarwan, Asim. 2001a. Indonesian and Balinese among native

- speakers of Balinese: A case of stable bilingualism? Makalah pada Simposium Internasional II tentang Bilingualisme. Bristol, UK, 18-20 April.
- Gunarwan, Asim. 2001b. Indonesian and Banjarese Malay among Banjarese ethnics in Banjarmasin City: A case of diglosia leakage? Makalah pada Simposium Internasional V tentang Linguistik Melayu/Indonesia. Leipzig, Jerman, 16--17 Juni
- Gunarwan, Asim. 2002a. Persepsi nilai budaya Jawa di kalangan orang Jawa: Implikasinya pada penggunaan bahasa. Makalah pada PELBBA ke-16, Unika Atma Jaya, Jakarta, 22-23 Juli.
- Gunarwan, Asim. 2002b. The unstable state of the Indonesian-Javanese bilingualism: Evidence from language use in the home domain. Makalah pada Simposium Internasional II tentang Bilingualisme, Vigo, Spanyol, 23--26 Oktober
- Hinton, L. 1999. Teaching endangered language. Dalam Spolsky, Bernard [ed.], 74-77
- Jahr, E.H. [ed.]. 1993. *Language Conflict and Language Planning*. Berlin: Mouton de Gruyter
- Lee, Victor. 1981. Linguistic and social determinism. Dalam *Social Aspects of Language*. Manchester: The Open University, 72-94
- Mackey, William F. 1973 *Three Concepts for Geolinguistics*. Cirb Publication. Quebec: Centre international de recherches sur le bilinguisme
- Mesthrie, R. 1999. Language loyalty. Dalam Spolky, Bernard [ed.], 42-47
- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*. New York: Avon Books
- Smolicz, J. 1980. Language as a core value of culture. *RELC Journal*, Vol 11 No. 1, 1-13
- Spolsky, Bernard [ed]. 1999. *Concise Encyclopedia of Educational Linguistics*. Amsterdam: Elsevier

PEMEKARAN FUNGSI BAHASA DAERAH DEMI KETAHANAN BUDAYA BANGSA

Aron Meko Mbeta
Universitas Udayana

1. Pendahuluan

Dalam perspektif sosiopolitik-linguistik, perkembangan repertoar dan perubahan gejala kebahasaan masyarakat Indonesia, dari ekabahasaan yang berbahasa ibu bahasa daerah menjadi dwibahasawan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, merupakan gejala yang sangat menarik untuk dikaji dan "dipersoalkan" secara terus-menerus. Gejala tersebut akan selalu merangsang untuk dikaji karena bagi bangsa Indonesia, semboyan *bhineka tunggal ika* tetap dipertahankan, keanekaragaman bahasa daerah tetap diberi ruang dan hak hidup berdampingan dengan bahasa nasional.

Adalah kenyataan bahwa sebagian besar anak Indonesia yang berada di kota-kota, juga yang berasal dari keluarga dwisuku, dan yang berpendidikan relatif tinggi, sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Di sisi lain, kendatipun sebagian besar anak-anak dan generasi muda di pedesaan memang masih berbahasa ibu bahasa daerah, gejala menurunnya mutu penguasaan dan penggunaan bahasa daerah, rendahnya apresiasi generasi muda terhadap sastra dan budaya daerah, menjadi keprihatinan generasi tua. Tidak lancar dan tidak berhasilnya pewarisan (transmisi) bahasa daerah antargenerasi penutur, menurut hasil survei UNESCO, seperti dikutip oleh Lauder (2001:124—126), memilukan. Dari 90 bahasa minoritas yang disurvei di sejumlah negara, hanya 36% terwaris secara mulus, 64% tidak terwaris secara baik, 32% berfungsi, 68% bahasa minoritas itu tidak berfungsi lagi. Gambaran awal kehidupan bahasa-bahasa minoritas di sejumlah negara itu, kendati perlu diteliti kembali, tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi terakhir bahasa-bahasa minoritas di Nusantara.

Perkembangan bahasa Indonesia yang bermula dari bahasa Melayu Riau sebagai *lingua franca* di pelbagai wilayah Nusantara, dan kemudian menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, bahkan semakin diminati oleh banyak bangsa, antara lain, Australia, Jepang, Korea, Jerman, dan Italia, diterima sebagai prestasi budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Pada masa yang akan datang perkembangan bahasa Indonesia sebagai komponen kebudayaan Indonesia dan sebagai jembatan antarbangsa akan semakin pesat pula. Kendatipun demikian, mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan

wilayah penyebarannya yang belum merata, patut diperhatikan. Masih banyak warga bangsa Indonesia yang rendah mutu penguasaan dan pemakaiannya, masih banyak pula warga bangsa yang buta bahasa Indonesia, bahkan masih ada wilayah Tanah Air ini yang belum menjadi daerah pakai bahasa nasional itu. Buta huruf dan buta bahasa, selain rendahnya gizi anak Indonesia selama krisis multidimensi berkepanjangan ini, menjadi indikator rendahnya mutu manusia Indonesia¹⁾. Keadaan yang demikian ini jelas mempengaruhi usaha pemerataan pembangunan karena pemahaman konsep pembangunan umumnya berkaitan dengan pemahaman makna dan konsep pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia (band. Meoliono, 1981:2).

Nasionalisme yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini sejak awal abad ke-20, khususnya semangat *Soempah Pemoeda*, 28 Oktober 1928, diharapkan masih tertanam kuat dalam setiap sanubari warga bangsa. Nasionalisme kewilayahan Nusantara yang utuh diteguhkan di bawah sumpah "*Satoe Tanah Air, Tanah Air Indonesia, kesatuan jiwa dan semangat sebagai bangsa yang majemuk dilandasi sumpah "Satoe bangsa, Bangsa Indonesia"* dan roh budaya kebahasaan perekat kebersamaan didasari sumpah "*Mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia*". Trisumpah itu kita sadari sebagai tiang penyangga utama wilayah tanah dan air yang luas, pengikat bangsa yang majemuk, keanekaan bahasa dan budaya sebagai penciri jati diri bangsa Indonesia.

Secara budaya, memang harus diakui bahwa bahasa Indonesialah yang telah merekatkan masyarakat Indonesia yang multietnik ini menjadi satu bangsa. Di sisi itu disadari bahwa bahasa Indonesia pula yang telah menunjukkan jati diri dan martabat bangsa kita sebagai bangsa yang mampu membangun kebudayaan Indonesia. Adalah kenyataan bahwa melalui sistem pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni sastra, dan juga seni lainnya yang diwahanai bahasa Indonesia itulah yang menunjukkan perkembangan bahasa Indonesia, kemajuan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Rintisan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan '45, Angkatan '66, dan perjalanan bahasa Indonesia hingga kini pula, sastra Indonesia

¹⁾ Simak Tajuk Rencana Harian *KOMPAS*, edisi 12 Juli 2003, berjudul "Inilah Potret Kualitas Manusia Indonesia" yang mengutip penilaian UNDP dan dengan merujuk Hasil Penelitian Litbang Depdiknas, memperlihatkan fakta rendahnya kemampuan bahasa anak-anak berusia 15 tahun.

hadir. Politik Orde Baru yang sentralistik dan kebijakan penyeragaman, yang dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa, memang cukup berhasil mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan dan bahasa modern.

Seiring dengan penyebaran bahasa dan kebudayaan Indonesia yang semakin intens dan meluas, juga kehadiran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagian besar bahasa-bahasa daerah "terlantar". Salah satu komponen budaya bangsa itu kurang dihormati, kurang dihargai, dan kurang dipelihara oleh negara dan oleh para ahli warisnya. Padahal, dalam butir 2 Pasal 32 UUD 1945, hasil amandemen, dirumuskan bahwa "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional*". Dalam perspektif konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengabaian dan pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi selama perjalanan negara bangsa ini. Negara dan masyarakat Indonesia yang mengaku pewaris nilai-nilai budaya bangsa telah "menelantarkan" warisan leluhur mereka.

Era otonomi daerah dan era desentralisasi pengelolaan negara, khususnya di bidang kebudayaan ini memerlukan kepedulian baru terhadap nasib warisan budaya itu jikalau bahasa-bahasa daerah itu masih disepakati tidak dibiarkan mengalami kerapuhan dan kepunahan. Ciri-ciri kerapuhan bahkan tanda-tanda kematian sejumlah bahasa lokal akan dicoba diperikan di bawah ini. Selanjutnya, ancaman pemberdayaan melalui pemekaran kembali fungsi sosial-kulturalnya pada ranah adat-budaya dan ranah agama dianjurkan, di sisi ranah keluarga.

Sistem pendidikan sebagai instrumen dan jalur formal penerusan (transmisi) tradisi dan budaya masa lalu, khususnya dalam bentuk pengajaran bahasa daerah, masih memprihatinkan karena sebagaimana iklim pendidikan nasional kita yang masih terjebak formalisme. Rusyana (1999: 73—75) yang mengajukan fakta tentang nasib buruk bahasa-bahasa daerah besar, apalagi bahasa-bahasa kecil yang banyak itu, ternyata di dua belas provinsi di Indonesia, hanya sejumlah kecil bahasa daerah yang diajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Diinformasikan bahwa hanya bahasa Aceh dan Gayo di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahasa Batak (Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo) dan bahasa Melayu di Provinsi Sumatera Utara, bahasa Rejang di Provinsi Bengkulu, bahasa Lampung di Provinsi Lampung, bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dialek Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat, bahasa Jawa di

Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, bahasa Madura di Jawa Timur, bahasa Dayak (Simpang dan Kanayatan) di Provinsi Kalimantan Barat, bahasa Banjar dan bahasa Kutei di Provinsi Kalimantan Timur, bahasa Tombulu, Tonsawang, dan Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara, bahasa Bugis, Makasar, Mandar, dan Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, bahasa Tolaki, Muna, dan Wolio di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta bahasa Bali di Provinsi Bali, diajarkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Bahasa-bahasa daerah kecil lainnya di wilayah-wilayah tersebut di atas tidak diajarkan. Secara nasional, ternyata jauh lebih banyak wilayah provinsi yang tidak menjadikan bahasa daerah sebagai bahan pengajaran di sekolah-sekolah. Bahasa daerah hanya sebagai "titipan" dalam penerapan kurikulum muatan lokal mewarnai. Terlepas dari seberapa jauh keberhasilan pengajaran bahasa daerah tersebut, tanda kecil penghargaan dan pemeliharaan atas unsur budaya bangsa di provinsi-provinsi itu masih tampak. Sementara itu, masih sangat banyak bahasa daerah kecil lainnya di luar ke-12 provinsi tersebut di atas yang memang belum dilirik, baik oleh para ahli warisnya, oleh lembaga pendidikan formal, maupun oleh pemerintah daerah.

Sebelum melangkah cepat pada era global ini, penjejakan kembali masa lalu untuk menelusuri sejarah budaya merupakan sebuah kearifan yang tetap penting. Adalah fakta sejarah bahwa sebelum bahasa Indonesia mulai "mengeser" dan menyusutkan fungsi bahasa-bahasa daerah, semua bahasa daerah di Indonesia ini telah menjalankan fungsi kemasyarakatan dan fungsi transmisi nilai-nilai budaya antargenerasi (lihat Halliday, 1977:8). Khazanah nilai budaya lokal dan perangkat norma sosial guyub tuturnya diwahanai dan diwariskan dalam kemasan bahasa daerah. Kendatipun berskala lokal dan berdimensi primordial, "prestasi" kebahasaan generasi-generasi terdahulu yang membangun identitas komunitas etnik itu, masih patut diacu (band. Ahmad, 2002:439—441). Seiring dengan arus perubahan global yang semakin menderas, transformasi sosial-kultural dan perubahan tatanan kebahasaan Nusantara ditengarai pula dengan dominasi bahasa nasional, sementara di sisi lain bahasa daerah semakin terjepit. Bahasa Indonesia dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi utama masyarakat kota, seperti juga budaya metropolitan dengan kedahsyatan teknologi elektronik yang teknikal dan digital, telah membius generasi muda. Gejala konsumtif, materialistik, dan hedonistik yang mewarnai budaya masyarakat Indonesia, melanda pula generasi penerus yang semakin sepi dari tradisi, terputus dari akar masa lalu. Ini adalah

kenyataan budaya bangsa di tengah era global, yang tampaknya semakin sulit disaring, dipilih, dipilah, dan diintegrasikan ke dalam wadah “jati diri bangsa Indonesia”.

2. Tanda-tanda Kerapuhan Bahasa Daerah

Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia tergolong bahasa kecil karena hanya didukung oleh kurang dari satu juta penutur, makin lama makin menyusut jumlah pendukungnya, dan umumnya tidak memiliki tradisi tulis (lihat Ferguson, 1971:324—326). Kecuali bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Bali, Batak, Bugis, yang memang didukung oleh berjuta-juta penutur dan bertradisi tulis asli, aksara Arab, dan tradisi tulis Latinnya yang dikembangkan selama ini, sebagian besar bahasa daerah tidak mengenal tradisi tulis. Tersendat-sendatnya pewarisan, proses pembakuan, pengembangan, dan upaya pemberdayaannya, berakar juga dari persoalan ketidakberaksaraan bahasa-bahasa daerah.

Sejumlah bahasa di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Tenggara misalnya, hanya didukung oleh beberapa ribu, beberapa ratus penutur, bahkan di antaranya hanya didukung oleh beberapa puluh penutur. Jumlah penutur muda pendukung bahasa-bahasa daerah itu semakin menyusut karena arus transmigrasi, urbanisasi, dan mobilitas sosial lintas etnik dan daerah yang semakin kuat menggejala. Berdasarkan hasil penelitian Bagus, dkk. (1998), Gunarwan (2002), Mbete (2002), ranah keluarga sebagai benteng terakhir, khususnya di kota dan desa-desa yang sudah tergolong maju, bahasa daerah tidak mendapat posisi dan fungsi penting lagi karena sudah diambil alih oleh bahasa Indonesia. Banyak ahli waris muda usia yang sudah malu, tidak percaya, dan tidak mampu menggunakan bahasa daerah. Semakin kecil bahkan semakin langka pula “ahli-ahli” budaya dan bahasa daerah yang mencintai dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerahnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dan jika dikaitkan dengan tahapan ancaman kematian menurut Fishman (1991:88—109; lihat juga Reyhner, 1999), sejumlah bahasa daerah memang sudah berada pada taraf delapan, taraf yang rapuh dan mencemaskan. Di antara bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini memang ada yang hanya “menyisakan” segelintir penutur tua dan secara lingual tidak interaktif lagi antargenerasi. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi dan tingkat mobilitasnya pun tinggi, tidak mampu lagi berbicara dan berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tuanya dalam hal adat dan budaya lokal. Kenyataan juga menunjukkan bahwasanya telah terjadi

kesenjangan lingual dan kultural kedaerahan antargenerasi. Penguasaan dan penggunaan ragam halus, ragam baku, dan gaya “beku” yang estetik dan kaya makna budaya pada sejumlah bahasa daerah yang tergolong besar, terlebih lagi bahasa daerah kecil, terbatas pada generasi tua dengan jumlah yang kian mengecil pula.

Pemakaian bahasa daerah antargenerasi masih tetap hadir. Artinya, fungsi praktis, fungsi sosial (walaupun kering makna kultural) memang masih tampak. Akan tetapi, hilangnya budaya dongeng kemasam ibu sebelum tidur, sementara di sisi lain akrabnya VCD impor yang menerobos desa pascaelektrifikasi, semakin menjauhkan generasi muda dari akar sejarah, budaya lokal, dan lingkungannya. Inilah, antara lain, gejala serius rapuhnya ketahanan bahasa dan budaya bangsa di tengah era global ini. Gejala perubahan tanda jati diri pada sebagian warga masyarakat yang telah maju dan berwawasan global, namun tanpa akar lokal, perlu dikaji lebih dalam agar arah perubahan mental manusia dan bangsa Indonesia dapat dipahami.

Daya dukung penutur muda bahasa-bahasa daerah kecil dan besar, kendatipun harus didata secara lebih tuntas, diduga kuat semakin berkurang. Peminggiran bahasa daerah karena posisinya yang subordinat yang memang harus berkolokasi dalam koridor kebahasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, menggejala kuat. Walaupun harus diakui pula bahwa di sisi lain, tingkat mutu pemakaian bahasa Indonesia pun masih rendah, namun rendahnya mutu dan lemahnya daya baca masyarakat Indonesia yang lebih tergiur pada media televisi dan VCD, menunjukkan pula rendahnya mutu manusia Indonesia. Kerapuhan lingual-kultural perlu disikapi, dikritisi, dan diwaspadai. Lebih daripada itu, upaya revitalisasi bahasa dan budaya daerah, seiring dengan peningkatan mutu penggunaan dan perluasan wilayah pakai bahasa Indonesia, serta penguasaan bahasa asing pada era global ini, menjadi tugas yang sangat mendesak untuk diemban.

3. Pemekaran Fungsi Bahasa Daerah

Pemberdayaan dan pemekaran fungsi sebagai upaya revitalisasi bahasa-bahasa daerah harus diupayakan dalam kerangka kebahasaan nasional dan mondial. Secara nasional bahasa Indonesia harus tetap menempati posisi tertinggi dan superordinat dalam skala nilai kebahasaan dan kebudayaan, sedangkan bahasa daerah tetap menjadi penopang kehidupan bahasa nasional. Akan tetapi, dinamika dan kemajuan bahasa Indonesia, “dituntut” pula untuk turut mendorong kehidupan bahasa daerah. Sementara itu, sumber daya bahasa Inggris

sebagai bahasa asing utama perlu dikuasai, disusul sejumlah bahasa asing lainnya, sesuai dengan dinamika dan kekuatan arus budaya global. Visi kedwibahasaan yang berimbang dengan lebih dominannya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa modern yang mewahani ilmu pengetahuan, teknologi, dan sastra Indonesia modern, merupakan paradigma alternatif terbaik. Kedwibahasaan, dalam arti menguasai dan menggunakan dua bahasa atau lebih (Mackey, 1961; Romaine, 1997; McKay dan Hornberger, 1996), bagi masyarakat Indonesia pada era global ini seharusnya merupakan kemauan dan kebijakan politik yang berpijak pada hak kultural, hak lingual, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Adalah konvensi, jikalau selain bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya yang "mengatasi" bahasa-bahasa Nusantara dan bahasa-bahasa asing mana pun di negeri ini, bahasa-bahasa daerah patut dicintai lagi, dipelajari, dikuasai, dipercayai, dan digunakan kembali sebagai sarana primordial, perekat etnik, sumber daya budaya, dan wahana budaya nasional yang ada di pelbagai daerah.

Penataan, pemilahan, dan pengalokasian fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing pada era global ini merupakan sebuah "keniscayaan". Bahasa daerah yang dipelihara oleh para pemiliknya selayaknya tetap dijadikan ciri jati diri dan sarana komunikasi utama di lingkup lokalnya oleh sebagian besar para ahlinya. Ini adalah tuntutan budaya pada era global dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan lokal. Globalisasi dan modernisasi kebahasaan, bagaimanapun juga, diharapkan tetap berakar nasional dengan realitas lokal. "Pembagian ranah-ranah pakai" di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, menjadi sangat penting agar bahasa Indonesia sebagai bahasa besar dan modern serta bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, tidak harus mencaplok dan "menggusur" bahasa-bahasa daerah.

"Jebolnya" fungsi bahasa pada ranah keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir bahasa daerah, seharusnya belum menjadi "kiamat" bagi bahasa-bahasa daerah untuk bernafas kembali. Seiring dengan adanya gejala masyarakat Indonesia dan negara-negara berkembang yang mulai menyadari kembali makna warisan masa lalu dalam semangat nasionalisme budaya (lihat Naisbitt dan Aburdene, 1990:126) dan terkait pula dengan otonomi daerah, peluang pemberdayaan bahasa daerah masih tetap terbuka. Di sisi ranah keluarga yang juga diupayakan demi revitalisasi bahasa daerah, secara fungsional dua ranah kehidupan bahasa daerah, yakni: (1) ranah adat dan budaya

lokal dan (2) ranah agama, dapat digarap untuk memberdayakan kembali bahasa daerah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

3.1 Pemberdayaan Bahasa Daerah dalam Ranah Adat dan Budaya Lokal

Modernisasi kehidupan masyarakat Indonesia di bidang kebahasaan tetap berorientasi nasional dan berakar lokal sesuai dengan potensi, daya hidup, dan daya dukung yang ada. Pada era global dan pasar bebas ini, bahasa Inggris memang harus dapat dikuasai oleh sebagian warga masyarakat lokal di pelbagai wilayah Nusantara. Dengan demikian, interaksi dan transaksi (bisnis) pada era pasar bebas dapat berlangsung. Di sisi lain, penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dapat terus berlangsung dalam rangka memperkaya dan merangsang daya cipta masyarakat untuk mampu bersaing dengan bangsa manapun. Bagi bangsa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan sarana cipta sastra Indonesia modern harus terus-menerus ditingkatkan mutu pemakaiannya, sekaligus juga sebagai sarana pemersatu, identitas bangsa, dan sarana komunikasi nasional.

Akan tetapi, modernisasi yang berakar di lingkungan Nusantara mensyaratkan penggalian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya budaya lokal warisan leluhur, kekayaan masa lalu yang masih relevan, termasuk bahasa, sastra, dan budaya daerah. Peluang hidup bahasa daerah pada era otonomi daerah ini harus dapat dimanfaatkan secara lebih konsepsional, bersistem, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai pula dengan makna butir (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.* Bahasa, sastra, dan budaya daerah merupakan potensi keanekaragaman daerah yang harus diberdayakan kembali, terutama menghadapi era perubahan dan era budaya global yang keras menerjang masyarakat. Niat dan upaya nyata pemberdayaan kembali khazanah budaya Nusantara itu sejalan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya Bab II, Butir 10.f, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ihwal "Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah (garis tebal dari

penulis). Pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang bersumber pada hasil pengkajian ini pun merupakan upaya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bab I butir 3.

Sehubungan dengan isi undang-undang tersebut, dan sesuai pula dengan kondisi akhir bahasa, sastra, dan budaya daerah, pengembangan dan pemekaran kembali fungsi-fungsi bahasa daerah dalam segi-segi kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, merupakan upaya yang sangat penting. Berkaitan dengan gagasan itu, pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional, penjabaran aksi-aksi kultural masyarakat penuturnya melalui lembaga sosial-budaya yang baru, dapat dilakukan secara sistematis dan pragmatis. Kegiatan budaya daerah dalam sejumlah seginya itu tidak dapat dipisahkan dari bahasa daerah. Kegiatan yang dimaksudkan itu merupakan kewenangan para pemimpin lembaga-lembaga tradisional, khususnya lembaga-lembaga adat yang di banyak daerah sudah sangat melemah fungsinya sejak puluhan tahun silam, seiring dengan menguatnya sistem kekuasaan baru. Padahal sebagian dari lembaga-lembaga formal yang baru itu ternyata kurang legitimatif dan tidak apresiatif pada kekayaan budaya bangsa.

Keanekaragaman potensi budaya daerah dalam banyak aspeknya dapat dijadikan bahan dan ajang pemfungsian kembali dan pemberdayaan bahasa daerah. Banyak potensi sastra-budaya daerah yang nyaris tenggelam dan asing bagi generasi muda. Upacara tradisional dalam siklus hidup manusia dan pertanian yang unik, yang menjadi sarana penyatu kelompok dan "ramah" lingkungan, masih cukup potensial. Legenda, mite, dongeng, fabel, dan puisi-puisi asli yang potensial dari pelbagai etnik mulai menghilang dari kehidupan modern. Muatan lokal dalam kurikulum yang berorientasi formal, yang secara konsepsional baik, perlu diubah dengan lebih mendalami dan memanfaatkan aneka potensi budaya daerah.

Pendidikan dan pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah, Indonesia, dan asing secara sinergis, sesungguhnya dapat dibangun bersama oleh lembaga pendidikan formal, lembaga adat dan budaya, dan pemerintah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang konkret. Lomba bercerita atau mendongeng dalam bahasa daerah dapat dilakukan dengan biaya murah sebagai upaya menggali dan memanfaatkan tema-tema lokal. Setiap etnik pasti memiliki mite, legenda, fabel, dongeng, dan permainan rakyat yang dapat dilombakan. Kegiatan ini dapat pula

diikuti dengan lomba bercerita dan mendongeng dalam bahasa Indonesia dengan tema lokal pula, bahkan juga lomba bercerita dan berdongeng dalam bahasa Inggris, tetap dengan tema yang bersumber pada mite, legenda, fabel, dongeng, dan cerita rakyat yang ada di "wilayah" budayanya. Pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan budaya, dengan demikian merupakan langkah terobosan yang sangat strategis dalam kaitan dengan upaya mengembangkan rasa tanggung jawab para ahli warisnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat pendukung bahasa, sastra, dan budaya daerah.

Festival ataupun lomba bercerita dan mendongeng dalam bahasa daerah²⁾, baik dengan ragam praktis dan kolokial, maupun dengan ragam baku dan indah, dengan tema-tema sastra daerah, nasional dan mondial, dapat diikuti oleh murid-murid sekolah dasar kelas rendah dan berlanjut pada kelas-kelas tinggi. Selanjutnya, lomba bercerita dalam bahasa Indonesia dengan tema lokal, nasional, dan mondial itu dapat pula diikuti oleh para pelajar pada jenjang SMTP, sedangkan bercerita dalam bahasa Inggris dengan tema lokal, nasional, dan mondial akan diikuti oleh para siswa sekolah menengah umum dan kejuruan. Penggalan kembali unsur-unsur budaya lama yang potensial dan masih relevan dengan kehidupan masa kini, yang diikuti pula pengembangannya dengan tema-tema nasional dan mondial, membuktikan bahwa masyarakat pemiliknya bertanggung jawab memelihara, menghormati, dan dapat "menafasi" kembali bahasa daerah yang mulai rapuh, bahasa Indonesia yang belum dipraktekkan secara lisan dan tertulis, dan bahasa Inggris yang masih "kering" di negeri ini. Pemberdayaan dwiarah, dari bawah (*bottom up*) dengan prakarsa masyarakat dan lembaga-lembaga adat dan budaya mesti disinkronkan dengan program dari atas (*top down*) yang diprakarsai oleh pemerintah, khususnya lembaga pendidikan formal, balai/ kantor bahasa, dan instansi terkait lainnya.

Upaya pemberdayaan bahasa daerah dalam bentuk mendongeng atau bercerita berfungsi untuk membangun kembali tradisi lisan yang digusur oleh media elektronik dan merangsang tumbuhnya budaya baca-tulis. Kegiatan berbahasa lisan itu dapat diiringi pula dengan kegiatan penulisan kembali tema-tema sastra lama atau tradisi lisan

²⁾ seperti yang telah digelar oleh Sanggar Mayang Sari di Bengkulu 17 Juli 2003 lalu, jika saja dilakukan juga dengan bahasa daerah setempat (*KOMPAS*, 18 Juli 2003), yang kemudian dapat dilakukan pula di daerah lain, merupakan upaya pemberdayaan bahasa dan sastra daerah pula.

lainnya, baik dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris dengan kemasan-kemasan baru. Sayembara menulis kembali, termasuk lomba menulis esei dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau pun bahasa asing sesuai dengan penjenjangan di atas, menumbuhkan daya cipta, apresiasi, dan kecintaan, tidak saja terhadap budaya warisan leluhur dan budaya nasional dari daerah lainnya, tetapi juga budaya dunia yang diserapnya melalui media elektronik televisi dan radio serta media cetak yang sudah mulai menerobos desa. Cara ini memungkinkan generasi muda merasa dekat kembali, akrab, dan "berinteraksi" lagi dengan lingkungan budaya dan lingkungan alam tempat mereka hidup. Dengan demikian, pengembangan mental generasi muda berskala dunia tetap berpijak pula pada lingkungan asalnya.

Untuk memfungsikan kembali bahasa daerah melalui ranah adat dan budaya itu, pembakuan bahasa, termasuk tata tulisnya, dan penggalan potensi sastra dan tradisi lisan daerah, mendahului upaya pemberdayaan bahasa daerah. Tugas besar dan berat ini menuntut prioritas yang ketat dan tepat. Di sisi itu, penggalan aneka potensi budaya daerah, pembakuan bahasa dan ejaan pada era otonomi daerah ini, diperlukan kecermatan, perlakuan yang proporsional dan arif agar potensi dialek-dialek, subkultur, dan subetnik tidak dipinggirkan. Setiap dialek, subkultur, dan subetnik diberi ruang dan peluang yang sama untuk berkembang, bersaing secara sehat, dan hidup sederajat. Ini berarti realitas keanekaragaman tetap dapat dipertahankan. Kesulitan dan kompleksitas permasalahan teknis di lapangan tidaklah mesti menghambat upaya pemfungsian kembali bahasa, sastra, dan budaya daerah.

Kegiatan bercerita dan atau mendongeng dapat dilakukan tidak hanya melalui lembaga formal sekolah melainkan juga melalui kegiatan budaya masyarakat umumnya, berkaitan dengan kalender adat dan acara peringatan peristiwa penting lingkup lokal dan nasional. Dalam memperingati hari-hari bersejarah tingkat nasional dan lokal, kegiatan kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan secara terpadu dapat dilakukan. Di beberapa daerah seperti di Bali, Batak, Toraja, Surakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Bengkulu, yang kegiatan budayanya sudah mulai tumbuh kembali pun perlu terus diperluas dan diintensifkan. Untuk lebih memekarkan fungsi budaya, sayembara lagu-lagu daerah, dengan syair berbahasa daerah, sangat penting dilakukan untuk merangsang daya cipta, sekaligus menghidupkan bahasa daerah.

Pemberdayaan dan revitalisasi bahasa, sastra, dan budaya daerah

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab lembaga-lembaga tradisional dan modern, perlu ditumbuhkan. Rangsangan untuk munculnya program dari bawah (*bottom up*) dalam pembangunan budaya sudah saatnya digalakkan di tengah pesatnya pembangunan ekonomi. Bersama lembaga sekolah di sekitarnya, dan dengan sponsor swasta, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sinergisitas pemberdayaan dapat dibangun untuk mengimbangi derasnya arus budaya global yang telah merambat hingga ke pedalaman Nusantara.

3.2 Pemberdayaan Bahasa Daerah dalam Ranah Agama

Masyarakat Indonesia diidentifikasi sebagai masyarakat yang religius, sebagai masyarakat yang beragama dalam konteks keanekaragaman. Setiap agama, dengan pelbagai jenis kegiatan keagamaannya, menggunakan bahasa sebagai sarana utama, baik ritual maupun dakwah. Kegiatan pengajian, pengajaran agama (katekese), dan darma wacana, menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Kegiatan persembahyangan sebagai wujud penciptaan hubungan yang transendental dengan Tuhan, baik perseorangan maupun kelompok, baik terucapkan maupun yang tidak terucapkan, sudah tentu menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi.

Bahasa Indonesia yang digunakan, seperti juga bahasa daerah, yang diperkaya dengan unsur-unsur bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan Islam, unsur-unsur bahasa Latin dalam kehidupan keagamaan Katolik, dan unsur-unsur bahasa Sansekerta dalam kehidupan keagamaan Hindu di Bali dan Jawa, merupakan "bahasa Suci". Kegiatan-kegiatan keagamaan selama ini telah menjadi kekuatan fungsional dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah (band. Pei, 1971: 191—193). Realitas sosial-religius dan potensi budaya ini sesungguhnya dapat didayagunakan untuk turut berperan khusus memekarkan fungsi bahasa-bahasa daerah.

Menurut pengalaman dan pengamatan lapangan, fungsi bahasa daerah dalam kehidupan keagamaan Katolik di Flores yang berhasil dirintis dan diemban oleh para misioner Eropa sejak awal abad ke-20. Penerjemahan Injil dalam bahasa daerah di Flores (bahasa Manggarai, Ngadha, Lio, Sikka, Lamaholot) seperti juga dalam bahasa Batak, Bali, Biak, Sentani misalnya, merupakan upaya pemberdayaan bahasa daerah di bidang keagamaan. Akan tetapi, sangat disayangkan karena buku-buku terjemahan itu tidak digunakan, dan bahkan telah digantikan dengan buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesia. Padahal,

hingga tahun 1960-an, terutama sebelum munculnya perubahan untuk menggunakan bahasa Indonesia, wacana keagamaan dalam bentuk doa, nyanyian, pengajaran, dan kotbah para pastor Eropa (Belanda, Jerman, Chekoslowakia) dalam bahasa daerah yang cukup baku dalam perayaan misa hari Minggu, dinilai oleh para generasi tua, di antaranya kini masih hidup, lebih efektif, lebih menyentuh nurani, meresap, dan inkulturatif. Sangat disayangkan karena pengembangan keberaksaraan masyarakat melalui buku-buku keagamaan yang berbahasa daerah, rintisan para pemimpin agama itu, hanya menjadi pajangan di perpustakaan atau di gudang, serta mulai dimakan rentang.

Persembahyangan di tempat-tempat ibadah (masjid, langgar, gereja, pura, vihara) berlangsung dalam bahasa Indonesia. Pengajian, katekese, darma wacana, berlangsung pula dalam bahasa Indonesia. Bagi generasi muda, sarana bahasa itu berfungsi, namun bagi generasi tua, yang umumnya tidak menguasai bahasa Indonesia ragam formal dalam kotbah yang sarat dengan konsep teologis dan abstrak itu, kurang berfungsi sehingga muatan pesan religius menjadi kurang dipahami. Patut diingat bahwa sebagian (besar) generasi tua kini banyak yang putus sekolah, buta huruf, bahkan sebagian di antaranya buta bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan pada sejumlah penganut agama (Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu) di beberapa daerah, khususnya masyarakat penutur bahasa Jawa, bahasa Muna di Sulawesi Tenggara, sejumlah penutur tua bahasa-bahasa daerah di Flores, Bima, Sumbawa, Sasak, Bali, dan Papua, pemakaian bahasa daerah dalam kegiatan keagamaan masih sangat memprihatinkan, karena bagi sebagian besar generasi tua di pedesaan khususnya, seperti disinggung di atas tidak menguasai bahasa Indonesia. Pengajaran keagamaan, doa, kotbah, syair nyanyian kerohanian, diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Buku-buku keagamaan dari bahasa-bahasa sumber, seperti: Arab, Latin, khususnya Alkitab dan Wedha, yang pada awal perkembangan agama Kristen itu sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah, kini asing bagi umatnya.

Adalah pengakuan yang jujur dari masyarakat bahwa aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan keimanan dirasakan lebih tepat jika diungkapkan dalam bahasa daerah. Ini pengakuan kelompok penutur tua yang masih menguasai bahasa daerah dan menggunakannya dalam mengekspresikan perasaan religius mereka. Fungsi ekspresif ini berkaitan dengan nuansa dan emosi religius yang memang lebih tepat

diungkapkan dengan bahasa yang telah diakrabi sejak kecil yakni bahasa daerah. Bahasa daerah yang dikuasai dan dijiwai sejak kecil di lingkungannya, sebagai bahasa ibu dan sarana primordial keetnikan itulah yang dirasakan “lebih mampu” digunakan untuk mengekspresikan iman mereka.

Bertolak dari realitas masyarakat di atas, kiranya pemberdayaan bahasa daerah dapat dilakukan pula melalui jalur keagamaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dan di pedalaman Nusantara, yang belum menguasai dan belum menggunakan bahasa Indonesia, dapat dipastikan menguasai bahasa daerah. Sehubungan dengan kondisi objektif kebahasaan masyarakat itu, para pemimpin kelima agama besar: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, sebagai kelompok strategis, dapat berperan lebih dalam lagi untuk memberdayakan bahasa daerah di lingkungannya, khususnya di pedesaan. Kelompok pemimpin informal ini sesungguhnya sangat potensial dan strategis, bahkan sangat menentukan bagi keberhasilan upaya pemberdayaan bahasa daerah melalui kegiatan keagamaan. Para penutur andalan yang dikategorikan sebagai kelompok pemimpin informal di bidang keagamaan ini, demikian pula para pemimpin lembaga-lembaga tradisional, serta penutur ideal asli bahasa daerah yang diharapkan masih ada, jumlahnya memang sangat sedikit, seperti juga jumlah penutur asli sejumlah bahasa daerah Nusantara. Akan tetapi, minoritas jumlah penutur bukanlah faktor yang selalu menentukan kerapuhan dan kepunahan bahasa, jikalau daya religius masyarakat tuturnya dapat diberdayakan, dan ditumbuhkannya tanggung jawab mereka untuk merevitalisi bahasa daerah (lihat, Simpson, 1980: 236—238). Agama, dengan demikian, dapat menjadi jalur harapan yang dapat diandalkan untuk “menyelamatkan” bahasa-bahasa daerah kecil di banyak wilayah Nusantara.

Harus diakui bahwa kelompok profesional keagamaan, sebagai kelompok pemimpin informal, mempunyai pengaruh sangat besar bagi umat yang dibawahinya. Tindakan, perilaku, dan energi tuturan mereka khususnya, masih menjadi panutan dan kebutuhan kelompok dan lapisan masyarakat mana pun. Pengajaran, pengajian, renungan, kotbah, nyanyian, dan doa mereka, sebagaimana yang ditayangkan melalui televisi, masih setia untuk didengar, disimak, dipanuti, dan ditiru oleh masyarakat Indonesia, termasuk pilihan bahasa dan cara berbahasa mereka, di samping kandungan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, serta warna khas kepribadian mereka. Harus diakui pula bahwa kelompok pemimpin informal ini dikaruniai dengan talenta kebahasaan.

Talenta mereka, khususnya talenta kebahasaan bahasa daerah Nusantara, selain bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Sansekerta, dapat didayagunakan untuk pemekaran fungsi religius bahasa daerah.

Kendatipun tidaklah semua aspek kehidupan keagamaan mesti diungkapkan dalam bahasa daerah, paling tidak bagi masyarakat kota dan masyarakat yang majemuk, agama-agama dengan pemimpin lembaga dan kekuatan umatnya yang juga merupakan pendukung bahasa daerahnya, dapat diandalkan untuk menjadi pencerah harapan, pemulih kerapuhan, pencegah ketergusuran total, dan “penyelamat” kepunahan bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Dengan demikian, sejumlah bahasa daerah di Nusantara ini tetap melanggengkan keanekaragaman bahasa, sastra, dan budaya, tetap berkemampuan *mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia* dalam kerangka bhineka tunggal ika dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Catatan Penutup

Di tengah kondisi masyarakat yang transisional, di tengah kedwibahasaan yang belum stabil, dan di tengah menguatnya gejala ketercerabutan akar lokal, pemekaran fungsi bahasa daerah melalui dua ranah penting, yakni: ranah adat-budaya dan ranah agama, dapat dipertimbangkan sebagai strategi pemberdayaan bahasa-bahasa daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia di pedesaan dan pedalaman belum menguasai bahasa Indonesia, penguasaan bahasa daerah generasi muda pun belum memadai. Sementara itu, sejumlah bahasa daerah masih “menyisakan” kelompok kecil penutur asli yang fasih berbahasa daerah.

Kelompok kecil penutur yang tersisa itu potensial dan strategis dalam kerangka pemberdayaan bahasa daerah melalui ranah adat-budaya dan ranah agama. Termasuk di dalam kerangka pemberdayaan ini adalah kelompok terdidik yang fasih berbahasa Indonesia sehingga kedwibahasaan yang agak berimbang dapat berkembang.

Pemekaran fungsi bahasa daerah melalui ranah adat dan budaya mempunyai fungsi ganda. Selain pemekaran fungsi bahasa daerah, penggalan dan pemanfaatan kembali nilai-nilai budaya lokal yang relevan, dan juga pemberdayaan kembali lembaga-lembaga tradisional yang kurang, bahkan tidak berfungsi selama ini, merupakan fungsi lainnya yang dapat diwujudkan. Sehubungan dengan ikhtiar itu, kegiatan kebahasaan di masyarakat yang dipadukan secara sinergis

dengan kegiatan susastra dan budaya yang bertema lokal, nasional, dan mondial dengan menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, layak dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Pemanfaatan kelompok pemimpin informal tersebut sangat penting agar guyub tutur yang semakin berdwibahasa ini berkembang dalam keseimbangan hidup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Agama, melalui peranan para pemimpin, lembaga, dan umatnya, dapat berperan nyata memekarkan fungsi bahasa daerah dalam sebagian kegiatan keagamaan. Penggunaan bahasa daerah di kalangan pemimpin agama dalam kegiatan keagamaan, misalnya pengajian, katekese, dan darma wacana, memang menuntut kecintaan dan pengorbanan untuk mempelajari kembali bahasa daerah di lingkungan keagamaannya dan mempraktekannya dalam diskursus sosial-religius, dalam wejangan-wejangan, dalam kotbah-kotbah, dan doa-doa mereka. Upaya ini sekaligus juga lebih mendekatkan dan lebih memberakarkan agama-agama di tengah khazanah bahasa dan budaya Nusantara yang majemuk ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hassan 2002. *Imbasan*. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bagus, I Gusti Ngurah, I Wayan Bawa, Aron Meko Mbetete, Ni Luh Sutjiati Beratha. 1998. "Kedwibahasaan di Bali dan Nusa Tenggara". Denpasar: Laporan Penelitian dengan Biaya URGE Batch IV.
- Bright, Williams 1971. *Sociolinguistics*. New York: Blackwell.
- Eastman, Carol M. 1983. *Language Planning, An Introduction*. San Fransisco: Chandler & Sharp Publishers Inc.
- Fairclough, Norma 1995. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Blackwell Pub.
- Ferguson, Charles 1971. "National Sociolinguistics Profile Formula" dalam William Bright (Ed.) *Sociolinguistics*. New York: Mouton & Co..
- Fishman, J.A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundation of Assistance o Threatened Languages*. Clevedon UK: Multilingual Matters.
- Fishman, Joshua A., Charles Ferguson, Jyotirindra Das Gupta (Eds.)

1973. *Language Problems of Developing Nations*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Halliday, M.A.K. 1977. *Explorations in the Functions of Language*. London: Edward Arnold.
- Haugen, Einar, J.D. Maclure, D.S. Thomson (Eds.) 1980. *Minority Languages Today*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Husen, Ida Sundari dan Rahayu Hidayat (Penyunting). 2001. *Meretas Ranah: Bahasa, Semiotika, dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lauder, R.M.T. 2001. "Upaya Menjajaki Situasi Kebahasaan di Seluruh Dunia" dalam Ida Sundari Husen et.al. *Meretas Ranah*, halaman 118—137.
- McMahon, April M.S. 1999. *Understanding Language Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mbete, Aron Meko 1994. "Fungsi Bahasa Lio, Ngada, dan Sikka, Flores. Laporan Penelitian dengan biaya *The Toyota Foundation*.
- , 2000. "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah: Mencermati Konstitusi, Kenyataan, dan Tuntutan Perubahan" dalam Jurnal Ilmu Bahasa *Verba*, volume 2 Nomor 1 Oktober 2000. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- , 2001. "Ungkapan-ungkapan Verbal pada Etnik Lio, Flores, dan Fungsinya dalam Melestarikan Lingkungan". Penelitian Dasar Direktorat Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional.
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Naisbit, John & Margaret Aburdene, 1990. *Sepuluh Arah Baru Tahun 1990-an. Megatrends 2000*. Terjemahan F.X. Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Pei, Mario 1971. *Kisah daripada Bahasa*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Bhratara.
- Reyner, Jon. 1999. "Some Basics of Indigenous Language Revitalization", dalam Reynher, Jon, et.al. (eds.), *Revitalizing Indigenous Languages*. Flagstaff, AZ: Northern Arizona University.
- Rosidi, Ajip, 1999. *Bahasa Nusantara: Sebuah Pemetaan Awal. Gambaran tentang Bahasa-bahasa Daerah di Nusantara*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Simpson, J.M.Y. 1980. "Challenge of minority languages" dalam E. Haugen, et.al., *Minority Languages Today*. Edinburgh: Edinburgh

- Univerity Press.
- Soebadio, Haryati, 1991. *Kesinambungan Nilai Budaya Indonesia dalam Era Kebangkitan Nasional II*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Suzanne, Romaine 1995. *Bilingualism*. Oxford: Blackwell.
- Anonim. 2001 *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001*. Bandung: Citra Umbara.
- , *Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah*.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi.

BAHASA MEDIA MASSA: LARAS BAHASA JURNALISTIK YANG PERLU DIKEMBANGKAN¹

Mulyadi Eko Purnomo²
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Secara sosiolinguistik, bahasa Indonesia (BI) memiliki variasi jika dilihat dari berbagai segi, seperti bidang pemakaian, pemakai bahasa itu, daerah pemakaian, dan kurun waktu pemakaian. Bahasa yang digunakan dalam bidang kepolisian, misalnya, agak berbeda dari bahasa yang digunakan di lingkungan kedokteran. Demikian juga, BI yang digunakan pada masa lalu agak berbeda dari BI yang digunakan pada saat sekarang. BI yang digunakan untuk penulisan berita surat kabar, berbeda dari BI yang digunakan dalam makalah ilmiah dan BI yang digunakan dalam bacaan sastra (Sudaryanto, 1995).

Sebagai salah satu ranah pemakaian bahasa, media massa cetak menyebabkan timbulnya variasi bahasa. Variasi itu dapat dipandang sebagai laras (*style*) tersendiri apabila terjadi secara sistematis. Oleh karena itu, timbulnya laras jurnalistik dianggap sebagai sesuatu yang wajar sebagai akibat dari perkembangan variasi itu. Variasi bahasa (BI) ragam jurnalistik ini berbeda dari bahasa ragam ilmiah dan ragam sastra seperti yang dikemukakan di atas. Bahasa Indonesia laras jurnalistik sebagai perwujudan dari pemakaian BI dalam ranah jurnalistik juga dapat ditemukan terjadinya dalam penggunaan BI pada media cetak di tanah air, apakah yang terbit di Jakarta atau yang terbit di daerah. Laras jurnalistik itu berupa penggunaan unsur bahasa yang khas, yang tidak ditemukan pada bidang lain, atau bisa juga berupa penggunaan unsur bahasa yang juga ditemukan pada bidang lain.

Secara sosiolinguistik, bahasa media massa sebenarnya dapat dipandang sebagai ragam atau laras bahasa tersendiri, yang biasanya dibandingkan dengan bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Dalam hal itu, bahasa media massa dianggap "titik tengah" antara bahasa ilmiah yang lugas, objektif, dan argumentatif dan bahasa susastra yang metaforik, fiktional-imaginatif, dan naratif-ekspresionis.

Berdasarkan pendapat berbagai pihak, baik praktisi pers maupun

¹Makalah Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, Oktober 2003

²Tenaga pengajar pada PS Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, FKIP, Program Pascasarjana, dan Sekretaris Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya

ahli bahasa, diketahui bahwa bahasa laras jurnalistik memiliki karakteristik tertentu. Seperti dikemukakan Hadi (1998), di samping masih terikat pada prinsip BI yang baik dan benar, bahasa pers memiliki karakteristik yang berpegang pada prinsip singkat, padat, lugas, dan menarik. Sementara itu, Sugono (1998) mengemukakan ciri BI laras jurnalistik, khususnya dalam struktur sintaksis, sebagai adanya bentuk partisipial, adanya penggantian konjungtor *bahwa* dengan tanda koma, adanya frasa nominal penyulihan, dan verba transitif tanpa objek, serta penggunaan konjungtor *sedangkan* dan *sehingga* di awal kalimat. Dari berbagai pendapat tentang karakteristik bahasa jurnalistik atau bahasa pers (Lihat juga Mujiyanto, 1995; Suwandi, 1995; dan Soewarno, 1995), dapat disimpulkan sementara adanya pemadatan atau penyederhanaan struktur sintaktis. Penyederhaan itu bisa berupa penghilangan konjungtor tertentu atau butir leksikal tertentu. Di samping ciri itu, terdapat ciri lain yang cukup menonjol, yaitu digunakannya bahasa daerah dan bahasa asing tertentu di tengah-tengah kalimat bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata daerah dan kosakata asing ini boleh jadi dimanfaatkan untuk mencapai efek kemenarikan dan kedekatan kepada pembaca. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Seperti dikemukakan oleh Sumarsono (2000), dalam surat kabar yang terbit di Bali, penggunaan bahasa Bali cukup penting untuk diperhatikan walaupun beberapa kosakata daerah Bali itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Dari fenomena penggunaan BI dalam media cetak yang ada di Palembang, ditemukan adanya gejala pemadatan struktur sebagai konsekuensi dari ekonomi bahasa, dan adanya penggunaan kosakata tertentu, apakah dari bahasa asing, atau bahasa daerah. Perhatikan contoh berikut.

- (1) Ditanya apakah dalam pertemuan itu sempat dibahas soal pengamanan Sidang Paripurna DPR pada 30 April mendatang, Wimar tidak memberikan jawaban secara tegas.
- (2) Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar mengatakan, materi yang dibahas sama dengan pertemuan sebelumnya: kondisi keamanan tanah air.
- (3) Pasarancam posisi Presiden
- (4) Atasi narkoba, dibentuk BKND Mura
- (5) *Penesan* kena bacok

Kalimat (1) di atas adalah contoh konstruksi partisipial, yang sebenarnya juga merupakan gejala pamadatan struktur kalimat dengan menghilangkan konjungtor keterangan waktu *ketika*. Kalimat (2)

merupakan contoh penggantian konjungtor *bahwa* dengan tanda koma setelah kata *mengatakan*. Kalimat (3) merupakan contoh pemadatan struktur morfologis yang berupa penghilangan prefiks *meng-*. Pada kalimat (4) terdapat dua gejala pemadatan sekaligus, yaitu penghilangan prefiks *meng-* pada *atasi* dan penghilangan preposisi/konjungtor *untuk* di depan kata *atasi* itu. Pada kalimat (5) terdapat juga penghilangan konjungtor *karena* pada kalimat.

Makalah ini membahas ihwal pemadatan struktur dalam media massa cetak, dan membahas mana pemadatan struktur yang dapat dianggap sebagai laras bahasa jurnalistik, mana pemadatan struktur yang tidak gramatikal. Sebagian data diambil dari penelitian Purnomo, dkk. (2001).

Pemadatan Struktur

Pemadatan struktur dalam media massa cetak merupakan hal yang banyak terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh diberlakukannya prinsip ekonomi bahasa sebagai salah satu prinsip bahasa jurnalistik (media cetak) yang penting. Seperti dikemukakan sebelumnya, pemadatan atau penyederhanaan struktur itu terjadi, baik pada tingkat morfologi maupun pada tingkat sintaksis.

Pemadatan Struktur Morfologis

Pemadatan struktur morfologis pada media massa cetak dapat berupa penghilangan afiks, terutama pada judul atau subjudul berita, dan juga pada tubuh berita walaupun kemunculannya sangat sedikit. Penghilangan afiks pada judul/subjudul berita meliputi penghilangan prefiks *meng-*, penghilangan prefiks *ber-*, *ter-*, dan penghilangan konfiks *di-/kan*.

Pada umumnya media massa cetak dalam menampilkan judul/subjudul berita cenderung menghilangkan prefiks *meng-* pada verba. Penghilangan prefiks *meng-* tersebut dapat dilihat pada contoh judul (6)—(9) berikut.

- (6) BEM se-Jabotabek *protes* pembelian Sukhoi
- (7) Filipina-MILF *setujui* gencatan senjata
- (8) Dishub *kembangkan* sektor angkutan laut

Memang, afiks *meng-* merupakan prefiks yang paling sering dihilangkan pada judul/subjudul berita di media massa cetak. Berdasarkan contoh-contoh itu, penghilangan prefiks *meng-* dapat terjadi, baik dengan atau tanpa akhiran *-i* atau *-kan*. Pada judul/subjudul berita, hanya prefiks *meng-* saja yang dihilangkan,

sedangkan akhiran *-i* atau *-kan* tetap dibubuhkan pada verbanya.

Dalam judul/subjudul berita di media massa cetak terdapat pula penghilangan prefiks *ber-* sebagai upaya pemadatan struktur morfologis. Perhatikan contoh-contoh berikut.

(9) Residivis *teriak* maling, polisi babak belur

(10) Ingin *kerja* jutaan rupiah amblas

(11) Ribuan mahasiswa *demo* di DPRD

Dalam judul/subjudul berita, konfiks *di-/kan* pada verba juga sering dihilangkan. Walaupun kemunculannya tidak banyak, terdapat gejala penghilangan konfiks ini sehingga verba itu mengalami pemadatan struktur morfologis berupa bentuk dasarnya saja. Inilah contohnya.

(12) *Butuh* SIM berbasis internet

(13) *Perlu* perda baru bagi penumpasan becak

Verba *butuh* dan *perlu* pada (49) dan (50) di atas itu sebenarnya memiliki bentuk lengkap *dibutuhkan* dan *diperlukan*. Walaupun demikian, gejala ini tampaknya tidak banyak terjadi. Apabila diamati dengan saksama, penghilangan konfiks *di-/kan* itu hanya terjadi pada kata *perlu* atau *butuh* dan sinonimnya, tidak terjadi pada verba lain.

Pemadatan Struktur Sintaktis

Pemadatan struktur sintaktis yang ditemukan pada media cetak (terbitan Palembang) ada beberapa jenis. Hal itu meliputi (1) penghilangan preposisi pada frasa biasa, (2) penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, (3) penghilangan konjungtor pada kalimat majemuk, (4) penghilangan unsur kalimat pada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta (5) adanya konstruksi partisipial.

Penghilangan preposisi pada frasa biasa dapat terjadi pada berbagai jenis preposisi bahasa Indonesia. Penghilangan preposisi *dengan* pada frasa biasa tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.

(14) Hanya \emptyset mengirim e-mail kepada setiap orang yang ada di buku alamat dan akibatnya membuat server e-mail menjadi terlalu sibuk.

(15) Pada babak kedua, ia akan bertemu \emptyset petenis peringkat 23, Nathalie D. dari Perancis.

Di samping preposisi *dengan*, preposisi *di* dan *pada*, *kepada*, dan *ke* juga sering dihilangkan di media massa cetak. Preposisi *di* dapat bermakna 'tempat berada' sedangkan preposisi *pada* bermakna 'waktu berada'.

(16) Pembahasannya, menurut dia apakah akan menambah atau tidak diperkirakan \emptyset akhir bulan ini.

- (17) Darman yang menyaksikan kejadian tersebut segera meminta pertolongan Ø warga sekitar dan membawa Daud ke RS Charitas.
- (18) Perbincangan berbelok Ø soal harga kebutuhan pokok
Preposisi lain yang juga sering dihilangkan adalah preposisi *agar*, *bagi*, dan *dari*. Inilah beberapa contohnya.
- (19) Demo pro kontra menuntut Ø Gus Dur mundur tak terbendung
- (20) Hukuman mati Ø menginjak kitab suci Alquran
- (21) Dana Ø pihak ketiga yang berhasil dihimpun BCA sampai tahun 2000 mencapai Rp85,95 trilyun,.....

Selain pada preposisi biasa, penghilangan preposisi pada frasa idiomatis juga sering terjadi di media massa cetak. Preposisi pada frasa idiomatis yang sering dihilangkan yaitu preposisi *dengan*. Preposisi *dengan* biasanya secara idiomatis bergabung dengan kata *berkaitan*, *terkait*, *berhubungan*, *sehubungan*, *berhubung*, *dibandingkan*, *sesuai*, dan *bertepatan*. Penghilangan preposisi tersebut terdapat pada kalimat-kalimat berikut.

- (22) Terkait Ø itu, ketua DPRD Palembang yang juga mantan ketua DPC PDIP sepertinya keberatan untuk melakukan pelantikan.
 - (23) Namun berdasarkan data yang ada, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan Ø data tahun 1999 lalu.
 - (24) LBH PAN: Musdalub sesuai Ø aturan
- Masih berkaitan dengan penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, tampaknya preposisi *dari* pada konstruksi frasa idiomatis *terdiri dari* dan *akan* pada konstruksi frasa idiomatis *akan tetapi* juga sering dihilangkan. Penghilangan preposisi tersebut dapat dilihat pada contoh kalimat berikut.
- (25) Sebanyak 34 anggota Polres OKU naik pangkat, yang terdiri Ø 7 personil perwira pertama (Pama), 26 personil Bintara, 1 personil Tamtama.
 - (26) Ø Tetapi para karyawan itu sempat kecewa, lantaran tidak ada respon.

Di samping penghilangan preposisi *dari* atau *atas* pada frasa idiomatis *terdiri dari* atau *terdiri atas*, terdapat pula penghilangan preposisi *pada* pada frasa idiomatis *tergantung pada*. Contoh penghilangan preposisi itu dapat dikemukakan berikut ini.

- (27) Integrasi bangsa tergantung Ø pemimpinnya
- (28) Order percetakan masih tergantung Ø Pemerintah

Pada kalimat majemuk, konjungtor yang sering dihilangkan adalah konjungtor *bahwa* yang diganti atau tidak diganti dengan tanda koma (,) setelah kata *mengatakan*. Contoh penghilangan konjungtor tersebut terdapat pada kalimat berikut.

- (29) Antasari mengatakan, Ø masyarakat yang meminta dirinya mengundurkan diri sebaiknya dilakukan dengan prosedur yang benar.

Penghilangan konjungtor *bahwa* terjadi pada klausa subordinatif yang menyatakan isi utaraan atau ujaran sumber berita. Ini terjadi pada kalimat tidak langsung. Konjungtor *bahwa* biasanya digunakan setelah kata *mengatakan*, *menyatakan*, *menjelaskan*, *mengungkapkan*, *menuturkan*, *berpendapat*, *beranggapan*, dan sebagainya yang senada dengan itu yang menyatakan utaraan atau ujaran sumber berita yang dikutip secara tidak langsung. Beberapa contoh lain dapat dikemukakan berikut ini.

- (30) Adnan Buyung berpendapat Ø seharusnya tersangka mendapatkan hak untuk didengar dan dikonfrontasi.
 (31) Sementara itu, Kapolda metro Jaya ... mengungkapkan, Ø pihaknya akan menurunkan 9000 anggota polisi
 (32) Rizal mengakui, Ø membengkaknya angka defisit anggaran terkait dengan kenaikan suku bunga dan melamahnya nilai tukar rupiah.

Pada kalimat-kalimat itu dapat dilihat adanya penghilangan konjungtor *bahwa* sebelum klausa objektif yang menyatakan isi utaraan yang dinyatakan oleh sumber berita. Penghilangan konjungtor *bahwa* seperti itu hampir selalu terjadi pada kalimat tidak langsung.

Di samping penghilangan konjungtor *bahwa* yang banyak ditemukan, terdapat juga penghilangan konjungtor yang lain, seperti *karena*, *sebab*, atau *akibat*. Contoh berikut ini adalah judul berita.

- (33) Ø Ngutil, Bujangan Ditangkap Satpam
 (34) Sekarat Ø tersetrum listrik

Pada dua kalimat itu dapat diamati adanya penghilangan konjungtor *karena* yang terdapat sebelum kata *ngutil* dan *tersetrum*.

Selain *karena*, konjungtor yang juga sering dihilangkan adalah konjungtor *ketika* pada klausa noninti yang menyatakan hubungan waktu. Perhatikan contoh berikut.

- (35) Ø Putri sulungnya ulang tahun, Marzuki jadi menteri
 (36) Kapoltabes Palembang, Kombes Pol. Drs. Abdurachman, Ø dikon-firmasikan wartawan membenarkan peristiwa tersebut

Selain penghilangan konjungtor subordinatif, yaitu konjungtor pada

kalimat majemuk subordinatif, terdapat pula penghilangan konjungtor pada kalimat majemuk koordinatif. Konjungtor yang dilesapkan itu adalah konjungtor *sedangkan* dan *dan* seperti yang terdapat pada contoh berikut.

- (37) Yang duitnya tebal diperhatikan, Ø yang biasa kurang diurus.
- (38) Bob Hasan kelabakan, Ø satu napi tewas, Ø satu sipir disandera.

Termasuk dalam pemadatan struktur adalah penghilangan unsur kalimat. Unsur kalimat berkaitan dengan unsur-unsur yang berfungsi sebagai subjek (S), predikat (P), objek (O), pelengkap (Pel.), dan keterangan (K). Penghilangan atau pelesapan unsur kalimat itu terjadi, baik pada kalimat tunggal maupun pada kalimat majemuk. Penghilangan unsur kalimat pada kalimat tunggal pada umumnya terdapat pada judul atau subjudul berita. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghematan.

Berikut disajikan contoh-contoh penghilangan unsur S dalam kalimat tunggal yang juga merupakan judul berita.

- (39) Ø Hendak memihak, malah dikeroyok
- (40) Ø Tunda keinginan bikin anak
- (41) Ø Sulit Mendeteksi Pengangguran di Lahat
- (42) Ø Diringkus Dua Jam Usai Merampok

Penghilangan unsur subjek terdapat pada kalimat (39)—(42). Pada kalimat (39) unsur subjeknya adalah seseorang, sedangkan kalimat (40) unsur subjeknya seorang artis. Pada kalimat (41) terdapat penghilangan unsur subjek, yaitu pemerintah daerah, sedangkan dalam kalimat (42) juga terdapat penghilangan unsur subjek, seorang penjahat.

Selain penghilangan unsur kalimat pada kalimat tunggal, terdapat pula penghilangan unsur itu pada kalimat majemuk. Pelesapan S sering terjadi pada kalimat majemuk yang diawali dengan konjungtor yang berfungsi sebagai konjungtor antarkalimat seperti, konjungtor *maka* dan *sebab* seperti yang terdapat pada kalimat berikut.

- (43) Maka, setelah Ø mendapatkan bukti cukup, dia digrebek di rumahnya.
- (44) Sebab, jika Ø hanya bermain imbang, apalagi kalah, PSG bakal tersisih.

Di samping pelesapan S, pada media massa cetak juga terdapat pelesapan O. Pelesapan O dapat dilihat pada contoh kalimat-kalimat berikut.

- (45) Maksudnya, secara pendanaan, pemerintah kabupaten

- membantu Ø.
- (46) Namun, jalur kendaraan tak dapat distop karena itulah satu-satunya jalan antarprovinsi di Sumsel yang bisa dilalui Ø.
 - (47) Tetapi, gara-gara ulahnya itu, Abubakar ditangkap Ø Sabtu (17/2) sekitar 21 WIB di rumah P3N Pendopo.

Berdasarkan data di atas, unsur yang sering dilesapkan dalam kalimat majemuk adalah unsur S dan O. Pelesapan terjadi apabila S atau O merujuk pada kata yang sama yang telah disebutkan pada klausa atau kalimat sebelumnya.

Konstruksi partisipial sering ditemukan pada media massa cetak. Pada konstruksi tersebut terjadi pemadatan struktur dengan pelesapan konjuntor atau preposisi pada awal kalimat. Bentuk konstruksi itu ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Berikut contoh konstruksi partisipial dimaksud.

- (48) Melihat rekannya tersungkur, petugas terpancing emosinya dan bertindak represif untuk membubarkan aksi.
- (49) Dibandingkan Ramadan tahun lalu, omset transaksi kredit tahun ini masih di bawah Ramadan tahun lalu.
- (50) Diduga melakukan penggelapan uang milik toko tempatnya bekerja, Syamsul digiring ke Poleskta Ilir Barat Palembang

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa pada konstruksi partisipial sering terjadi pemadatan struktur kalimat dengan pelesapan konjuntor atau preposisi pada awal kalimat.

Antara Laras dan Kesalahan

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa media massa memiliki laras sendiri dalam menggunakan bahasa. Walaupun demikian, yang perlu didiskusikan adalah apakah dengan alasan "laras" pemakai bahasa boleh melanggar aturan tata bahasa yang sudah baku atau dibakukan. Masalah ini mungkin tidak mudah dijawab, tetapi beberapa pokok pikiran dapat dikemukakan.

Pertama, laras bahasa tidak boleh melanggar aturan tata bahasa. Ihlwal laras sebenarnya adalah ihlwal retorika, bukan gramatika. Oleh karena itu, laras apa pun tidak bisa meninggalkan aturan tata bahasa. Hal ini lebih-lebih berlaku pada bahasa tulis yang menghendaki keakuratan dan kejelasan ungkapan gagasan. Kejelasan dan keakuratan ungkapan gagasan itu akan dapat dijamin dengan patuhnya penulis pada aturan tata bahasa. Oleh karena itu, harus dibedakan secara tegas, mana variasi bahasa yang dapat dianggap sebagai laras, dan mana variasi penggunaan bahasa yang menyimpang dari aturan

tata bahasa.

Kedua, dalam hal pemadatan struktur bahasa media cetak, ada yang dapat dipandang sebagai laras karena tidak menyimpang dari aturan tata bahasa, ada pula yang tidak dapat dipandang sebagai laras karena menyimpang dari aturan tata bahasa. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

LARAS	KESALAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Penghilangan afiks pada judul/subjudul berita • Penghilangan afiks yang tidak menyebabkan perubahan makna 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghilangan afiks pada judul berita yang menyebabkan perubahan makna • Penghilangan afiks pada verba dasar terikat • Penghilangan afiks pada teks berita
<ul style="list-style-type: none"> • Penghilangan preposisi pada frasa biasa • Penghilangan konjungtor <i>bahwa</i> yang tidak mengganggu struktur • Penghilangan konjungtor koordinatif • Penggunaan konjungtor antarklausa untuk antarkalimat • Penghilangan konjungtor/preposisi pada konstruksi partisipial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghilangan preposisi pada frasa idiomatik • Penghilangan konjungtor <i>bahwa</i> yang mengganggu struktur • Penggunaan konjungtor <i>kalaupun</i> untuk <i>bahwa</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Pelesapan subjek pada klausa noninti 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelesapan subjek pada klausa inti • Penghilangan objek pada verba transitif

Penghilangan afiks pada judul/subjudul berita mungkin dapat dipandang sebagai laras jurnalistik asalkan, pertama, tidak mengubah makna atau tidak menimbulkan makna ganda dan, kedua, penghilangan afiks itu tidak dilakukan pada afiks dasar terikat. Perhatikan contoh-contoh berikut.

(51) PDI-P *bantah* kesepakatan 7 partai/*Bahas* memorandum II di Rakernas PAN

(52) Pertamina *serahkan* penyaluran listrik ke PLN

Verba *bantah*, *bahas* dan *serahkan* pada kalimat-kalimat itu mengalami penghilangan afiks *meng-*, tetapi tidak menyebabkan perbedaan makna jika dibandingkan dengan bentuk lengkapnya *membantah*, *membahas*, dan *menyerahkan*.

Walaupun pada umumnya prefiks *meng-* pada judul/subjudul mengalami pelesapan, tetapi pada bentuk-bentuk verba tertentu prefiks *meng-* itu tidak dihilangkan. Prefiks *meng-* yang tidak dihilangkan itu terdapat pada verba yang termasuk verba aktif intransitif walaupun pembubuhan prefiks *meng-* itu digunakan dalam bentuk tidak

sempurna, yaitu hanya nasalnya (*ng-* atau *nge-*) saja. Hal ini diperkirakan karena pengaruh dari bahasa daerah, baik bahasa Melayu Palembang, bahasa Melayu dialek Jakarta, maupun bahasa Jawa, bahkan dengan menggunakan bahasa daerah itu secara utuh. Perhatikan contoh-contoh berikut.

- (53) *Ngaku* digaji Rp 315 juta, Dewan *ngotaki*
- (54) Mayat lelaki *ngapung* di lorong Kuto Baru
- (55) *Ngerampok* toko emas ditujuh massa/Diduga untuk modal nikah
- (56) Diduga *ngamuk*, dikapak wong

Pada contoh-contoh itu dapat dilihat adanya bentuk verba yang berprefiks nasal saja, baik yang dari bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, bahkan ada kata bahasa daerah digunakan secara utuh. Kata *ngaku*, *ngapung*, dan *ngamuk* adalah verba yang dibentuk dengan prefiks nasal yang merupakan bentuk tidak sempurna dari prefiks *meng-*. Atau, bisa juga dianggap sebagai kosakata bahasa daerah yang digunakan secara utuh, yang kebetulan bentuk dasarnya juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Bentuk verba bahasa Indonesia yang benar adalah *mengaku*, *mengapung*, dan *mengamuk*. Halnya sedikit berbeda dengan kata *ngerampok*. Kata ini adalah verba yang bentuk dasarnya adalah bahasa Indonesia, tetapi prefiksnya adalah prefiks yang berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu dialek Jakarta. Bentuk baku untuk kata *ngerampok* adalah *merampok*. Di samping itu, ada verba bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Palembang yang digunakan secara utuh, yaitu kata *ngotaki* 'membohongi' dan *ngatoi* 'mengejek' atau 'mengolok-olok'.

Di samping itu, ada verba yang harus ditulis lengkap dengan afiks *meng-* seperti pada contoh-contoh berikut.

- (57) Diperlakukan tak adil, *mengadu* ke Kapolda
- (58) Diringkus dua jam usai *merampok*
- (59) Mahasiswa UMP *meninggal mendadak*
- (60) Omzet pedagang pasar atas *melemah*
- (61) Sembilan gedung SEN di Palembang *memprihatinkan*

Apabila diperhatikan, verba dalam bentuk yang lengkap seperti pada (57)—(61) di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah verba yang tidak dapat digunakan tanpa prefiks *meng-*, kedua verba yang apabila digunakan tanpa prefiks *meng-* akan menimbulkan makna yang berbeda. Kalimat-kalimat berikut adalah kalimat di atas yang ditulis kembali dengan menghilangkan prefiks *meng-* pada verbanya.

- (62) Diperlakukan tak adil, **adu* ke Kapolda
- (63) Diringkus dua jam usai **rampok*
- (64) Mahasiswa UMP **tinggal* mendadak
- (65) ?Omzet pedagang pasar atas *lemah*
- (66) *Sembilan gedung SDN di Palembang *prihatinkan*

Kalimat (62) menjadi tidak berterima karena kata *adu* yang merupakan verba intransitif tidak dapat digunakan tanpa prefiks *meng-*. Kata ini dapat digunakan tanpa prefiks hanya dalam bentuk majemuk seperti pada *adu domba*. Pada (63), kata *rampok* tanpa prefiks dapat berupa nomina, dapat pula berupa verba transisitif, sehingga kalimat seperti *Ditangkap dua jam usai rampok bank* dapat diterima. Pada (64) kata *tinggal* berbeda maknanya dengan kata *meninggal*; *tinggal* 'bertempat tinggal, beralamat', sedangkan *meninggal* bermakna 'meninggal dunia, mati'. Dengan begitu, kata *tinggal* tidak dapat digunakan dalam konteks kalimat itu. Kata *lemah* pada kalimat (65) memang masih ada hubungan makna dengan kata *melemah*, tetapi sedikit berbeda; *melemah* 'menjadi lemah' yang berbeda dengan 'lemah' saja. Pada (66) kata *memprihatinkan* sebenarnya dapat digunakan tanpa prefiks, tetapi harus ada objeknya, misalnya *memperhatikan pemerintah*, tetapi bila digunakan tanpa objek prefiks *meng-* harus digunakan.

Selain prefiks *meng-*, prefiks *ber-* juga dapat dihilangkan dalam judul/subjudul berita. Perhatikan contoh-contoh berikut.

- (67) Residivis *teriak* maling, polisi babak belur
- (68) Ingin *kerja* jutaan rupiah amblas
- (69) Ribuan mahasiswa *demo* di DPRD

Hal itu berbeda dengan penggunaan prefiks *ber-* pada contoh-contoh berikut yang ditulis secara lengkap oleh wartawan pada judul/subjudul berita di bawah ini.

- (70) Kloter 34 *berangkat* 15 Februari
- (71) Pangkat Baru Resmi *Berlaku*
- (72) Pagi kepong istana, malam duduki DPR/*Bertahan* sampai Gus Dur mundur
- (73) Tewas, Sakit Gigi *Berkumur* Air Aki

Pada kalimat (70)—(73) di atas itu, verba berprefiks *ber-* ditulis secara lengkap. Apabila prefiks *ber-* di atas itu dihilangkan, menjadi seperti kalimat berikut ini.

- (74) *Kloter 34 *angkat* 15 Februari
- (75) *Pangkat baru resmi *laku*
- (76) Pagi kepong istana, malam duduki DPR/?*Tahan* sampai Gus

Dur mundur

(77) *Tewas, sakit gigi *kumur* air aki

Pada (74), penghilangan prefiks *ber-* menyebabkan kalimat itu tidak berterima karena verba *berangkat* memiliki makna 'bertolak' atau 'bergerak dari suatu tempat untuk bepergian' yang berbeda atau tidak berhubungan dengan bentuk dasar *-angkat*. Pada (75) kata *berlaku* memiliki makna yang berbeda dengan kata *laku*, *berlaku* 'terjadi' atau 'menjadi hukum positif', sedangkan *laku* 'terjual'. Oleh karena itu, verba *laku* tidak berterima apabila digunakan dalam konteks kalimat itu. Sementara itu, pada (76), kata *bertahan* memiliki makna yang berbeda dengan *tahan* walaupun masih berhubungan dan dapat digunakan dalam konteks kalimat itu. Akan tetapi, yang dimaksud oleh berita itu adalah *bertahan* dalam arti tidak beranjak atau bergerak dari tempat itu sampai targetnya tercapai, bukan *tahan* dalam arti kuat menahan. Pada (77) kata *kumur* tidak dapat digunakan tanpa prefiks *ber-* sebagai verba sehingga bentuk *kumur* tidak berterima dalam konteks kalimat itu.

Apabila verba dengan prefiks *meng-* dan *ber-* cenderung mengalami pemadatan bentuk morfologis pada judul/subjudul berita dengan penghilangan prefiks itu, sebaliknya verba dengan prefiks *di-* tidak dapat mengalami pemadatan struktur jika digunakan pada judul/subjudul berita. Hal tersebut dapat dilihat pada judul/subjudul berikut.

(78) Kantor MA *dilempari* tomat, Marzuki *diminta* mundur/Gus Dur *dianggap* lamban

(79) Jukung-Jampidsus *diadukan* ke polisi/*Dituduh* merampas kemerdekaan Ginanjar

(80) Mobil *disalip*, saling pukul

Pada judul (78) jika prefiks *di-* dilesapkan pada kata *dilempari* maka menimbulkan makna yang tidak logis baik dengan maupun tanpa sufik *-i*. Sementara itu, pelepasan prefiks *di-* pada kata *diminta* dan *dianggap* akan mengubah makna, sehingga yang diminta mundur bukan Marzuki dan yang dianggap lamban bukan Gus Dur. Pada judul (79) pelepasan prefiks *di-* pada verba *diadukan* akan membuat kalimat itu tidak berterima karena kalimat itu akan menjadi aktif transitif yang tidak berobjek. Kata *dituduh* jika tanpa prefiks *di-* akan menyebabkan makna kalimat itu berubah menjadi 'jukung-jampidsus mengadukan seserang kepada polisi' padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Jukung-Jampidsus justru diadukan ke polisi (oleh pihak Ginanjar). Pada (80), penghilangan prefiks *di-* pada kalimat Mobil *disalip*, saling pukul akan membuat kalimat itu tidak berterima karena kalimat itu akan

menjadi kalimat aktif transitif tanpa objek.

Selain prefiks *di-*, prefiks lain yang tidak dapat dihilangkan untuk memadatkan struktur morfologis pada judul/subjudul berita adalah prefiks *ter-* seperti pada contoh berikut.

- (81) *Dikeroyok*, warga OPI *terkapar*
- (82) Kompor meledak, 22 unit rumah musnah *terbakar*
- (83) Kades Segayam *terancam* dipecat

Pada judul/subjudul (81)—(83) itu terdapat verba berprefiks *ter-*, yaitu pada kata *terkapar*, *terbakar*, dan *terancam*. Sebagaimana yang terjadi pada verba berprefiks *di-*, prefiks *ter-* juga tidak dapat dihilangkan untuk memadatkan struktur morfologis. Pada (81), jika prefiks *ter-* dihilangkan akan membuat kalimat itu tidak berterima, demikian juga dengan kalimat (82). Sementara itu, pada (83), penghilangan prefiks *ter-* akan mengubah makna kalimat itu menjadi Kades segayam mengancam dipecat' padahal dalam berita itu yang terjadi justru Kades Segayam itu yang *terancam* akan dipecat karena melakukan kesalahan.

Apabila prefiks *meng-* dan *ber-* dapat dihilangkan dalam judul/subjudul berita, tidak demikian halnya apabila terjadi pada teks berita. Dalam teks berita, afiks harus digunakan secara lengkap kecuali pada verba dasar yang dapat langsung digunakan (Alwi, dkk. 1998). Di bawah ini dikemukakan contoh penghilangan afiks pada verba predikat yang terdapat pada teks berita.

- (84) Informasi yang dihimpun di RSMH Palembang, malam kejadian Suhardi, isteri, dan anaknya tengah *istirahat*.
- (85) Setiap truk bermuatan barang termasuk mobil pribadi, keluar masuk kawasan terpaksa *hati-hati*.
- (86) Keduanya *jalan kaki* menuju rumah masing-masing.
- (87) Apalagi kalau hujan turun, beberapa lubang akan tergenang air, jalannya sendiri *jadi* sangat licin.
- (88) Tahun ini Umar *punya* estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 3,8 persen.

Pada contoh (84)—(88) di atas itu terdapat verba tanpa prefiks yang digunakan. Apabila dikembalikan pada bentuk lengkapnya, verba-verba itu seharusnya berprefiks *ber-*, atau *meng-*, dan *meng-/i*. Pada (84)—(86), verba-verba di dalam kalimat itu seharusnya berprefiks *ber-*; kata *istirahat*, *hati-hati*, dan *jalan kaki*, seharusnya *beristirahat*, *berhati-hati*, dan *berjalan kaki*. Sementara itu, pada kalimat (87) dan (88), verbanya harus berprefiks *meng-* dan *meng-/i*; kata *jadi* dan *punya* seharusnya *menjadi* dan *mempunyai*.

Pada kalimat majemuk, konjungtor yang sering dihilangkan adalah konjungtor *bahwa* yang diganti atau tidak diganti dengan tanda koma (.). Penghilangan konjungtor *bahwa* terjadi pada klausa subordinatif yang menyatakan isi utaraan atau ujaran sumber berita. Ini terjadi pada kalimat tidak langsung. Konjungtor *bahwa* biasanya digunakan setelah kata *mengatakan, menyatakan, menjelaskan, mengungkapkan, menuturkan, berpendapat, beranggapan*, dan sebagainya yang senada dengan itu yang menyatakan utaraan atau ujaran sumber berita yang dikutip secara tidak langsung. Beberapa contoh lain dapat dikemukakan berikut ini.

- (89) Iskandar juga menuturkan \emptyset aksi penodongan itu dilakukannya bersama enam orang temannya.
- (90) Adnan Buyung berpendapat \emptyset seharusnya tersangka mendapatkan hak untuk didengar dan dikonfrontasi.
- (91) Rizal mengakui, \emptyset membengkaknya angka defisit anggaran terkait dengan kenaikan suku bunga dan melamahnya nilai tukar rupiah.

Pada kalimat-kalimat itu dapat dilihat adanya penghilangan konjungtor *bahwa* sebelum klausa objektif yang menyatakan isi dari utaraan yang dinyatakan oleh sumber berita. Penghilangan konjungtor *bahwa* seperti itu hampir selalu terjadi pada kalimat tidak langsung.

Memang, secara formal, sesuai dengan pemakaian bahasa tulis yang "baku", penghilangan konjungtor *bahwa* itu dapat merancukan apakah kalimat itu kalimat langsung atau tidak langsung. Disebut kalimat langsung tidak tepat karena tidak menggunakan tanda petik langsung dari sumber berita; disebut kalimat tidak langsung juga kurang tepat karena tidak ada penanda utaraan tidak langsung, yaitu konjungtor *bahwa*. Akan tetapi, kerancuan bentuk itu relatif tidak mengganggu kerancuan semantis.

Hal yang berbeda adalah penghilangan konjungtor *bahwa* pada kalimat (92) dan (93) berikut. Kedua kalimat itu tidak dapat dikembalikan kepada bentuk lengkapnya dengan menambahkan konjungtor *bahwa* begitu saja tanpa perubahan struktur. Hal ini terjadi karena kerancuan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung memengaruhi pula semantisnya. Perhatikan kalimat (94) dan (95) yang dilengkapi dengan konjungtor *bahwa* sesudah kata *menjelaskan* dan *mengatakan*.

- (92) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan \emptyset ada beberapa poin.
- (93) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan

barang yang dihubungi mengatakan setuju dengan usulan tersebut.

- (94) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan **bahwa* ada beberapa poin.
- (95) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan **bahwa* setuju dengan usulan tersebut.

Kalimat (94) dan (95) di atas tidak gramatikal karena pada klausa setelah konjungtor *bahwa* tidak memiliki subjek. Di sinilah terjadinya kerancuan semantis antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat yang benar, baik kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung, yang merupakan perbaikan dari kalimat (92) dan (93) adalah sebagai berikut.

- (96) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan bahwa hal itu ada beberapa poin.
- (97) Tentang besaran-besaran moneter yang diubah dalam APBN 2001, Rizal menjelaskan, "Ada beberapa poin."
- (98) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan *bahwa ia* setuju dengan usulan tersebut.
- (99) Menanggapi usulan ini, salah satu pengusaha pengadaan barang yang dihubungi mengatakan, "Saya setuju dengan usulan tersebut."

Yang menarik juga kadang-kadang dalam jurnalistik itu penggunaan konjungtor *bahwa* itu tetap dipertahankan, seperti kalimat berikut ini.

- (100) Mengenai memorandum, Ichlasul menilai bahwa hal itu mengarah pada impeachment yang merupakan satu-satunya prosedur untuk mengganti presiden di tengah jalan.
- (101) Sedangkan anggota Senat Filipina, Oscar Mareno menyatakan bahwa Buenaventura harus segera mundur karena kepercayaan publik atas kepemimpinannya sudah luntur.

Di samping penghilangan konjungtor *bahwa* yang banyak ditemukan, terdapat juga penghilangan konjungtor yang lain, seperti *karena*, *sebab*, atau *akibat*. Perhatikan contoh berikut ini.

- (102) Ø Ngutil, Bujangan Ditangkap Satpam

Pada kalimat itu dapat diamati adanya penghilangan konjungtor *karena* yang terdapat sebelum kata *ngutil*.

Kalimat-kalimat di bawah ini masih berkaitan dengan penghilangan konjungtor *karena*, tetapi agak berbeda. Apabila pada kalimat (102)

konjungtor yang dihilangkan terletak pada awal kalimat, pada kalimat-kalimat berikut penghilangan itu terdapat pada tengah kalimat. Dengan kata lain, apabila pada kalimat (102) klausa noninti terletak sebelum klausa inti, pada kalimat-kalimat berikut ini klausa noninti terletak sesudah klausa ini dengan konjungtor *karena* dihilangkan. Perhatikan contoh berikut.

(103) Ibu pingsan, Ø anak kandung hancurkan dagangan

(104) Dua remaja Siring Agung ditangkap, Ø cabuli bocah

Pada kalimat di atas itu dapat dilihat adanya penghilangan konjungtor *karena* atau *sebab* pada awal klausa noninti. Apabila konjungtor itu dikembalikan, kalimat-kalimat itu akan menjadi seperti di bawah ini.

(105) Ibu pingsan *karena* anak kandung hancurkan barang dagangan.

(106) Dua remaja Siring Agung ditangkap *karena* cabuli bocah.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana membedakan penghilangan konjungtor *karena* pada kedua kelompok ini. Dilihat dari bentuk ortografisnya, keduanya tampak sama, yaitu dengan membubuhkan tanda koma antara klausa inti dan klausa noninti, apakah klausa inti itu di depan atau di belakang. Tanpa membaca isi beritanya, pembaca bisa salah paham menghadapi kedua bentuk ini. Bandingkan kalimat (102) di atas yang dikutip kembali di bawah ini.

(107) Ngutil, bujangan ditangkap Satpam.

(108) Ibu pingsan, anak kandung hancurkan dagangan.

Memang, secara logika dapat dinalarkan bahwa pada kalimat (107) *ngutil* (mencuri) menjadi penyebab *bujangan ditangkap satpam*, semenantara pada kalimat (108) *ibu pingsan* merupakan akibat dari *anak kandung hancurkan barang dagangan* yang menjadi penyebab. Akan tetapi, pada kalimat (107) di atas hubungan sebab-akibat ini bisa berlaku sebaliknya, yaitu *Ibu pingsan karena anak kandung hancurkan dagangan*, atau *karena ibu pingsan, anak kandung hancurkan dagangan*.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa dalam laras jurnalistik itu sering ditemui penggunaan konjungtor yang salah. Hal ini terjadi karena konjungtor yang digunakan itu adalah konjungtor yang menghubungkan antarklausa, tetapi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang terpisah. Maka, yang terjadi adalah kalimat yang didahului oleh konjungtor antarklausa. Untuk itu, perhatikan contoh kalimat berikut.

(109) *Sedangkan* anak semata wayangnya itu tetap bersama suaminya.

(110) *Sehingga* wanita ini tidak pernah membedakan kedua anak tirinya tersebut.

(111) *Karena* kita kan punya aturan.

Bagaimana dengan pelesapan unsur kalimat? Pada penghilangan unsur kalimat, yang perlu diperhatikan adalah pelesapan unsur S, terutama pada teks berita. Perhatikan contoh berikut.

(112) Maka, setelah \emptyset_i mendapatkan bukti cukup, dia_j digrebek di rumahnya.

(113) Sebab, jika \emptyset_i hanya bermain imbang, apalagi kalah, PSG_i bakal tersisih.

Pada kalimat (112) pelesapan S terjadi pada klausa pertama antara kata *setelah* dan *mendapatkan*. Pada kalimat itu konjungtor *maka* berfungsi sebagai konjungtor antarkalimat yang menghubungkan kalimat itu dengan kalimat sebelumnya. Subjek yang dilesapkan pada kalimat tersebut merujuk pada kata *polisi* yang berbeda dari pronomina *dia* yang ada pada kalimat itu. Sementara itu, pada kalimat (113) pelesapan S terdapat pada klausa pertama, tetapi unsur yang berfungsi sebagai S tersebut muncul pada klausa kedua. Oleh sebab itu, pada kalimat (112), subjek klausa pertama harus dimunculkan, sedangkan pada kalimat (113) bisa tidak dimunculkan.

Di samping penghilangan unsur S, yang juga perlu diperhatikan adalah penghilangan unsur O pada kalimat yang predikatnya berupa verba transitif. Perhatikan contoh berikut.

(114) Maksudnya, secara pendanaan, pemerintah kabupaten membantu \emptyset .

Kalimat (114) yang diawali dengan kata *maksudnya* menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, O yang dilesapkan berkaitan dengan unsur yang sama, yang telah diungkapkan atau ditulis pada kalimat sebelumnya. Hal ini terbukti jika kalimat sebelumnya dirunut kembali, seperti yang terlihat pada kalimat berikut.

(115) Pemkab Mura tak akan lepas tangan dengan perubahan status *Kotif Lubuk Linggau* menjadi kota. Maksudnya, secara pendanaan, pemerintah kabupaten membantu \emptyset .

Dengan merunut kembali kalimat sebelumnya terbukti bahwa O yang dilesapkan pada kalimat (114) terdapat pada kalimat sebelumnya yaitu *Kotif Lubuk Linggau*. Oleh karena itu, unsur yang sama yang terdapat pada kalimat sebelumnya dapat dilesapkan pada kalimat berikutnya, dalam hal ini, unsur O-nya. Walaupun demikian, karena kalimat kedua itu merupakan kalimat yang mandiri, untuk memperjelas objeknya dapat

dilakukan dengan menambahkan pronomina *-nya* pada verba *membantu*.

Termasuk ke dalam pemadatan struktur ini adalah konstruksi partisipial. Pada media massa, konstruksi partisipial ini terjadi dengan penghilangan preposisi atau konjungtor sebelum predikat klausa tergantung. Inilah beberapa contohnya.

(116) Melihat rekannya tersungkur, petugas terpancing emosinya dan bertindak represif untuk membubarkan aksi.

(117) Dibandingkan Ramadan tahun lalu, omset transaksi kredit tahun ini masih di bawah Ramadan tahun lalu.

Walaupun demikian, tampaknya terdapat ketidakkonsistenan pada media massa cetak di Palembang. Selain terdapat konstruksi partisipial, terdapat pula bentuk konstruksi lengkap walupun kemunculannya sangat sedikit. Maksudnya, kalimat dalam laras jurnalistik itu telah menggunakan struktur yang benar (baku), seperti pada contoh di bawah ini.

(118) Untuk mengatasi kondisi itu, PLN harus meningkatkan pembelian daya listrik yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Swasta I dari 10% menjadi 45%

(119) Diduga karena emosi, Bensi mengambil pisau dan menghajar temannya sehingga mengalami luka tusuk di bahu dan jari kanan

Pada kalimat (118) terdapat pengantar kalimat *untuk mengatasi kondisi itu*, telah memiliki struktur yang benar sebagai pengisi slot klausa subordinatif (noninti), yaitu dengan hadirnya preposisi *untuk*. Sementara itu, pada kalimat (119), klausa subordinatif penanda keterangan sebab juga telah dilengkapi dengan konjungtor *karena*.

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa pada konstruksi partisipial sering terjadi pemadatan struktur kalimat dengan pelepasan konjungtor atau preposisi pada awal kalimat. Kehadiran konjungtor atau preposisi pada konstruksi tersebut bersifat *mana suka (optional)* sebagai laras jurnalistik. Hal ini terbukti dengan pelepasan dan atau pemunculan konjungtor atau preposisi pada konstruksi tersebut menjadikan kalimat tetap gramatikal.

Penutup

Untuk menutup uraian ini dikemukakan hal-hal berikut. Pertama, pemadatan struktur secara umum dapat dipandang sebagai ciri laras jurnalistik, khususnya media massa cetak. Kedua, pemadatan struktur itu ada yang dapat dipandang sebagai laras bahasa karena tidak

melanggar kaidah tata bahasa, ada juga yang tidak dapat dipandang sebagai laras bahasa karena melanggar kaidah tata bahasa. Dalam hal yang terakhir itu, penggunaannya harus dihindari; yang harus digunakan adalah struktur yang benar. Beberapa hal mungkin belum sepenuhnya dapat disepakati pada kesempatan ini, seperti penghilangan preposisi pada frasa idiomatis, penggunaan konjungtor bahwa secara eksplisit pada konstruksi tertentu, dan tidak dilepaskannya unsur kalimat pada konstruksi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H., S. Dardjowidjojo, dan A.M. Moeliono. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chaer, A. 1995. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, P. 1998. "Peran Pers dalam Pemasyarakatan Hasil Pembakuan Bahasa Indonesia." *Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.
- Kridalaksana, H. 1989. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mujiyanto, S.Y. 1995. "Jatidiri Bahasa Jurnalistik: Ihuwal Pemakaian dan Karakteristiknya." dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater, hlm. 295—305.
- Purnomo, M.E., S. Indrawati, Ernalida, J. Endardi, dan D. Susilawati. 2001. "Bahasa Laras Jurnalistik Media Massa Cetak Terbitan Palembang." Laporan Penelitian belum diterbitkan. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Selatan & Balai Bahasa Palembang.
- Putusan Kongres Bahasa Indonesia VII. Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.
- Samsuri. 1985. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya.
- Soewandi, A.M.S. 1985. "Ragam Jurnalistik: Apa, Mengapa, di Mana?" dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater, hlm. 130—147.
- Soewarno. 1995. "Peranan Media Cetak dalam Pengembangan Bahasa Indonesia." dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra

- Almamater, hlm. 85—89.
- Sudaryanto. 1990. *Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Motode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. 1995. "Ragam Jurnalistik Bahasa Indonesia sebagai Ragam Bahasa Kreatif." Dalam Sudaryanto dan Sulistiyo. Ed. *Ragam Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Penerbit Citra Almamater, hlm. 43—63.
- Sugono, D. 1995. *Pelesapan Subjek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sugono, D. 1998. "Struktur Kalimat Bahasa Indonesia: Penerapan dan Pemasarajatannya." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.
- Sumarsono. 2000. "Kosakata Bahasa Bali dalam Koran Lokal Bali Post." *Linguistik Indonesia*. Tahun 18, No. 1: 51—60.
- Tobing, S. 1998. "Pemanfaatan Media Radio dan Televisi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia." Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: 26—30 Oktober 1998.

MENKAKJI ULANG PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA¹

Kasmansyah
Universitas Sriwijaya

1. Pendahuluan

Dalam era global sekarang, peran media massa (media massa cetak dan media massa elektronik) dirasakan sangat penting dalam “mewarnai” kehidupan masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat sudah terbiasa menonton acara televisi, membaca surat kabar, tabloid, dan majalah, serta mendengarkan siaran radio. Kebiasaan menonton acara televisi—terutama televisi swasta, membaca surat kabar, tabloid, dan majalah, serta mendengarkan siaran radio itu secara faktual adanya kemajuan yang sangat pesat. Hal itu tampak dengan berkembang pesatnya jumlah stasiun televisi, jumlah penerbitan media massa cetak, dan jumlah stasiun radio siaran di Indonesia. Secara kuantitas, perkembangan stasiun televisi, penerbitan media massa cetak, dan stasiun radio itu, tentunya sangat mengembirakan. Namun, bila dikaitkan dengan peran media massa terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia masih perlu “dikaji ulang”.

Perlunya pengkajian ulang peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia didasarkan pada kenyataan cukup banyak media massa, baik media massa cetak, maupun media massa elektronik berperan sebagai sarana informasi dan hiburan saja, yang lebih mengutamakan dari segi bisnis, sehingga cenderung mengabaikan media massa sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia.

Upaya pembinaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, satu di antaranya melalui media massa, baik media massa cetak (surat kabar, majalah, buletin, tabloid, atau jurnal), maupun media massa elektronik (radio siaran, atau televisi). Pembinaan bahasa Indonesia melalui media massa dapat berwujud pembinaan sikap dan kemampuan berbahasa (berbicara, menulis) yang dikaitkan dengan berbagai aktivitas kebahasaan, sedangkan hasil pengembangan bahasa seperti pembakuan ejaan dan tata bahasa, pemekaran kosakata, dan pembentukan istilah-istilah baru merupakan hal yang perlu dipublikasikan (Taha, 1998; Sunaryo dan Sri Sukesi Adiwimarta, 1998; Kasmansyah, 2003).

Secara faktual pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat berwujud adanya materi khusus atau rubrik khusus bahasa

Indonesia seperti siaran pembinaan bahasa Indonesia di TVRI, atau di RRI beberapa waktu yang lalu. Selain itu, pembinaan dan pengembangan bahasa dapat pula merupakan aplikasi pemakaian bahasa Indonesia dalam setiap rubrik atau materi acara media massa, seperti dalam penulisan berita, artikel, tajuk rencana, pojok, cerita pendek, sinema elektronik (sinetron), film, kartun, atau siaran berita di televisi, serta acara dialog di televisi atau radio. Pembinaan bahasa melalui rubrik khusus pembinaan bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu berhasil, karena kenyataannya yang menonton atau mendengar acara tersebut sangat terbatas—bahkan cenderung sama sekali tidak ditonton atau didengarkan (Adhitama, 1998; Taha, 1998).

Tulisan tentang peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia belum banyak ditulis orang, walaupun ada baru sebatas pemakaian bahasa Indonesia di media massa, seperti yang ditulis oleh Adhitama (1998), Astraatmaja (1998), Ishadi Sk (1998), Taha (1998) dalam bentuk makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Sebagian besar tulisan itu menyimpulkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa—terutama media massa cetak cenderung memprihatinkan. Saat ini, hal yang sama juga masih berlaku dan lebih memprihatinkan, karena kalau dulu kesalahan pemakaian bahasa Indonesia didominasi media massa cetak, sedangkan sekarang termasuk juga media massa elektronik (Kasmansyah, 2003).

Mengacu kepada fakta itu, tampaknya media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia belum berperan seperti yang diharapkan. Hal itu sangat erat kaitannya dengan adanya perubahan era, dari era orde baru ke era reformasi dalam suasana era globalisasi. Dulu, organisasi yang berkaitan dengan media massa tidak banyak, kita mengenal Departemen Penerangan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), yang saat itu sangat berperan terhadap kelangsungan hidup penerbit surat kabar, stasiun televisi, dan stasiun radio siaran. Hal seperti itu, tidak mungkin lagi terjadi sekarang, karena media massa cenderung diberi kebebasan, termasuk dalam menentukan organisasi yang menaungi media massanya. Saat ini ada 43 organisasi pers, dan 23 lembaga pengawasan pers, yang kesemuanya independen (daftar organisasi pers terlampir). Banyaknya organisasi pers dan lembaga pengawasan pers itu berdampak pula terhadap pengontrolan setiap aktivitas media massa yang ada, termasuk pengontrolan terhadap peran media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Tulisan ini mencoba mengkaji ulang peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam tulisan ini akan dikemukakan keadaan bahasa Indonesia dalam media massa, peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, serta pemikiran tentang alternatif kebijakan, strategi, maupun sistem—pendidikan, rekrutmen tenaga kerja di bidang media massa, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia, dan terakhir penutup.

2. Bahasa Indonesia dalam Media Massa

Pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa perkembangannya tergolong pesat, sejalan dengan berkembang pesatnya jumlah media massa yang ada. Namun, kualitas pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa tampaknya untuk hal-hal tertentu menunjukkan adanya penurunan. Berikut ini secara berurutan pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa cetak dan media massa elektronik. Pada dasarnya pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa cetak tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dikemukakan Taha, (1998), Sunaryo dan Sri Sukei Adiwimarta, (1998), Adhitama, (1998) seperti: (1) banyaknya kesalahan penggunaan ejaan, diksi, kalimat efektif, pengembangan paragraf; (2) bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa cetak, termasuk juga media massa elektronik, cenderung lebih banyak menggunakan kata atau bahasa bentuk pengasaran (disfemisme) yang merupakan kebalikan bentuk eufemisme (penghalusan) (Ali Masri, 2003); (3) adanya kecenderungan bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia, hal itu terlihat dari aktivitas kebahasaan yang ada, mereka lebih merasa bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah walaupun sebenarnya situasi dan kondisi saat itu sangat memungkinkan; (4) bila bahasa yang digunakan dalam media massa cetak itu dianalisis, kemudian dikritik atau disalahkan, mereka berkilah gaya jurnalistik berbeda dengan kaidah bahasa Indonesia--walaupun sebenarnya antara gaya jurnalistik dan salah dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat berbeda konteks (Eko Purnomo, 2003).

Pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan radio siaran tampaknya: (1) banyak menggunakan bahasa "gaul", bahasa daerah tertentu, bahkan sering pula ditemukan menggunakan bahasa lisan yang campuraduk (seperti mencampuradukkan penggunaan bahasa "gaul", bahasa asing, dan bahasa Indonesia dalam konteks yang

sama); (2) penggunaan bahasa Indonesia tidak begitu memperhatikan etika bahasa yang santun—mereka cenderung menyenangi hal-hal yang vulgar, disfemisme, dan berbau pornografi atau pornoaksi; (3) ada anggapan bahwa siaran radio bila menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap kaku, tidak komunikatif, dan “berkesan kampungan”.

Pemakaian bahasa Indonesia di televisi Indonesia—terutama televisi swasta, hal yang sangat menonjol dalam pemakaian bahasa Indonesia adalah: (1) adanya kecenderungan bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia, mereka lebih merasa bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, hal itu seperti yang sering kita lihat di beberapa stasiun televisi (Metro TV, SCTV, TVRI) penggunaan nama judul-judul acara sering menggunakan bahasa Inggris; (2) adanya diskriminasi pemakaian bahasa, ada kecenderungan bahasa Inggris lebih diutamakan dibandingkan dengan bahasa asing lainnya—walaupun bahasa asing itu tergolong bahasa asing yang internasional; (3) film asing yang berbahasa Inggris diterjemahkan menggunakan teks bahasa Indonesia, sedangkan film asing lainnya disulihsuara, walaupun bahasa asli film tersebut termasuk kategori bahasa asing yang internasional, seperti bahasa: Arab, Cina, Perancis, Rusia; (4) sikap dan etika berbahasa cenderung dilanggar, terutama dalam menggunakan kata sapaan hormat dan kesopanan dalam berbahasa (Kasmansyah, 2003).

Merujuk pada pemakaian bahasa di televisi, tampaknya masalah sulihsuara film asing nonberbahasa Inggris perlu pengkajian yang mendalam. Hal ini berkaitan dengan “konsep bahasa menunjukkan bangsa” saat ini cenderung sudah tidak sepenuhnya dapat diterima lagi sebagai slogan bahasa Indonesia yang sejak zaman Raja Ali Haji digunakan seperti yang pernah diungkapkan Usman (1970) beberapa tahun yang lalu. Berikut ini dikemukakan hal-hal yang menjadi kendala dalam mewujudkan peran media massa (khususnya televisi) dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia—terutama fenomena sulihsuara film atau sinetron asing nonberbahasa Inggris terhadap budaya kita.

Fenomena sosial yang berkembang sekarang menunjukkan bahwa upaya meng-Indonesia-kan film-film asing atau sinetron asing yang bukan berbahasa Inggris secara kasat mata pembinaan bahasa Indonesia sudah berhasil, namun dampak sosial budaya akibat kebijakan tersebut sangat perlu dikaji secara mendalam karena sudah sangat mengkhawatirkan (Kasmansyah, 2003).

Berdasarkan data *Survey Research Indonesia (SRI)*, lebih dari 70% acara yang ditayangkan televisi Indonesia dalam bentuk hiburan, selebihnya dalam bentuk berita, itu pun diselengi dengan berbagai tayangan iklan. Sebagian tayangan hiburan itu merupakan produksi Amerika (40%), India (20%), Mandarin (20%), selebihnya produksi Indonesia dan sebagian produksi negara-negara Asean, dan Arab (*Gatra*, Nomor 16, Senin, 3 Maret 2003; <http://www.forum.co.id/> diakses 7 Juni 2003). Populasi film (sinetron) asing yang disulih suara ke dalam bahasa Indonesia tergolong paling tinggi dan paling banyak ditonton (beberapa contoh film, sinetron, atau animasi yang disulih suara dan ditayangkan televisi dapat dilihat pada lampiran). Setakat ini, kita sudah terbiasa menonton film, sinetron, atau film kartun yang sudah disulih suara ke dalam bahasa Indonesia seperti telenovela, sinetron serial remaja, sinetron anak-anak, atau animasi anak-anak. Hal itu dapat dibuktikan bahwa kita mengenal banyaknya telenovela (Amerika Latin) seperti *Cinta Paulina*, *Cinta Mariana*, *Corazon Salvaje (Hati yang Berduri)*, *Locura de Amor (Ada Cinta di Sekolah)* *Abrazame muy Fuerte (Carmenita)*, *Betty la Fea*, *Maria Elena*, *Vivan Los Ninos*, *Wild Angel*, *Carita De Angel*, *Luisa Fernando*, atau serial remaja (Mandarin, Jepang) seperti: *Percikan Cinta*, *Meteor Garden 2*, *2 Cinta 2 Masa*, *Hati yang Luka*, atau serial anak-anak (India) seperti: *Shaka Laka Boom Boom*, atau film kartun anak-anak (Jepang, Amerika Latin) seperti: *Dora Emon*, *Sincan*, dan *Bety Toons*. Selain itu, kita juga sudah terbiasa menonton film-film lepas produk India dan Mandarin yang semuanya disulih suara ke dalam bahasa Indonesia.

Merujuk fakta dan data yang ada, fenomena sosial dan budaya yang tampak di antaranya: semakin banyaknya penonton film, sinetron, animasi yang disulih suara, mulai dari pembantu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, orang tua, remaja, dan anak-anak, daripada melakukan kegiatan yang produktif. Ditinjau dari sisi stasiun televisi, tentunya merupakan hal yang baik, karena semakin banyak yang menonton siaran televisi, berarti dapat menaikkan peringkat acara (*rating*), berarti pemasukan dari iklan akan bertambah pula untuk stasiun televisi tersebut (Baran, dan Dennis K. Davis, 2000).

Secara sosiologis sulih suara merupakan upaya mendekatkan budaya melalui pendekatan bahasa yang digunakan, terlepas apakah budaya yang ditayangkan oleh film, sinetron, atau animasi tersebut berbeda atau sama dengan budaya kita. Dengan sulih suara, kita terbiasa menonton adegan berbahasa yang "tidak mengenal" sapaan hormat, seperti seorang anak yang biasa "ber-kau-kau atau berkamu-

kamu” kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya. Kita juga sudah terbiasa mendengarkan sapaan: “bapak mertua, ibu mertua, kakak ipar, adik ipar” yang lazim untuk film Mandarin atau India, termasuk dalam penggunaan kata-kata yang tergolong tabu diucapkan secara terbuka, seperti: kata kencan, bercumbu, berciuman, abortus, vagina, penis, mensturasi, berselingkuh, kondom, dan spiral, saat ini sudah dianggap bukan lagi sesuatu yang tabu.

Secara psikologis dan sosiologis sesuatu yang pada awalnya tidak disenangi, bila dilakukan berulang-ulang sebagaimana banyaknya film-film atau sinetron yang sudah disulihsuara ke dalam bahasa Indonesia yang setiap hari ditayangkan di berbagai televisi swasta, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita, lambat-laun akan terbiasa. Bila sudah terbiasa, lama-lama menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya menjadi budaya (Gerungan, 1991). Bila sesuatu menjadi budaya, tentu berdampak pada hilangnya identitas kita sebagai bangsa yang berbudaya (Rakhmat, 2000).

Kegiatan sulihsuara ke dalam bahasa Indonesia, satu sisi menunjukkan pembinaan bahasa Indonesia berhasil, tetapi dari sisi sosial budaya masih perlu dikaji ulang, karena banyak sisi negatifnya. Pengkajian ulang dapat dimulai dari pola kebijakan bahasa nasional yang berdampak pada kebijakan publik, seperti, kebijakan perfilman dan penyiaran, baik berdasarkan sosiologis, antropologis, maupun edukatif. Salah satu alternatif yang mungkin dapat ditempuh adalah: (1) semua film, sinetron, dan film kartun/animasi yang berbahasa asing tidak disulihsuara, tetapi diterjemahkan menggunakan teks berbahasa Indonesia, tetapi harus diseleksi secara ketat; dan (2) sulihsuara ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan hanya untuk film ilmu pengetahuan dan yang dapat membangkitkan semangat kerja dan etos kerja masyarakat kita. Alternatif ini, tentu perlu dilakukan secara hati-hati dengan cara merundingkannya dengan berbagai lembaga dan pihak-pihak yang terkait dengan media massa elektronik secara arif dan bijak.

3. Peran Media Massa dan Alternatif Pembinaan Bahasa Indonesia

Peran media massa dalam pembinaan bahasa Indonesia sampai saat ini sangat penting, karena dalam era global sekarang media massa merupakan sarana komunikasi yang paling efektif dalam mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, baik yang positif, maupun yang negatif, termasuk dalam mempengaruhi sikap bahasa (Mulyana, 2000). Akhir-akhir ini peran media massa dalam pembinaan dan

pengembangan bahasa Indonesia lebih mengarah kepada hal yang negatif, terutama berkaitan dengan penularan sikap negatif terhadap bahasa Indonesia, contoh-contoh pemakaian bahasa yang berkesan mengabaikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Merujuk fakta yang ada, media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perannya masih belum optimal. Belum optimalnya peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu disebabkan beberapa faktor yang saling mempengaruhi, mulai dari pola kebijakan kebahasaan, strategi, maupun sistem—pendidikan dan rekrutmen tenaga kerja di bidang media massa dan bahasa, tenaga pembina bahasa Indonesia, hingga bidang-bidang lain yang berkait dengan pembinaan bahasa Indonesia.

Pola Kebijakan dan Kerjasama Kebahasaan

Kebijakan kebahasaan di Indonesia selama ini mengacu kepada pola kebijakan politik bahasa nasional yang di dalamnya mengatur arah dan kebijakan kebahasaan di Indonesia (Halim ed., 1984). Dalam kebijakan politik bahasa nasional itu, Indonesia mengenal adanya bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga bahasa itu di Indonesia digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi saat menggunakannya. Kebijakan tentang kedudukan dan fungsi ketiga bahasa yang digunakan di Indonesia itu sebenarnya sudah ada dalam politik bahasa nasional. Namun kenyataannya pada tahap pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya komitmen yang tegas dan jelas sampai kepada petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan pola kebijakan kebahasaan dari pengambil kebijakan publik di Indonesia, seperti: DPR, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga dan organisasi pers, dan lembaga-lembaga lain yang berkait dengan penggunaan bahasa Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, tentunya semua pihak yang terlibat langsung dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bidang media massa perlu melakukan kerja sama yang mengikat, terencana, dan berkesinambungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia seperti: Pusat Bahasa, Balai Bahasa, Perguruan Tinggi (Fakultas Sastra, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Komunikasi), Lembaga Pers (Organisasi Pers, Lembaga Pengawas Pers), penerbit media massa cetak, stasiun televisi, stasiun radio siaran, biro-biro periklanan, rumah produksi film/sinetron, importir film dan sinetron,. Selama ini seperti yang dikemukakan Hasyim (1998) kerja sama antar Pusat Bahasa

dengan lembaga media massa belum optimal, bahkan berkesan hanya sekedar pelengkap kerja sama.

Strategi Pembinaan Bahasa Indonesia

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan agar media massa dapat berperan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah strategi yang pernah dikemukakan Latief (1998) pada Kongres Bahasa Indonesia VI seperti adanya evaluasi secara menyeluruh, terencana, dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan penyuluhan bahasa yang dirincinya ke dalam 11 butir (siapa yang akan dijadikan sasaran, mengapa mereka dipilih, apa kebutuhan mereka, apakah bahan tersedia, bagaimana tingkat keberterimaan bahan, siapa penyuluh, media penyuluhan, teknik penyuluhan, frekuensi penyuluhan, kemasan penyuluhan, dan bagaimana pemasaran penyuluhan) dapat pula diterapkan dalam strategi pembinaan bahasa Indonesia, tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup pembinaan bahasa Indonesia untuk media massa.

Selain itu, strategi yang mungkin dapat dilakukan adalah tidak ada salahnya meniru pola $5W + 1 H$ (apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa) yang digunakan dalam proses meliput dan menulis berita. Hal yang menjadi kendala utama selama ini adalah masalah belum adanya tenaga pembina atau penyuluh yang dapat memenuhi persyaratan, baik dari keahlian di bidang kebahasaan, maupun keahlian dalam bidang media massa. Selama ini, ada kesan tenaga pembina atau penyuluh bahasa tergolong "awam" bidang media massa, padahal pembinaan bahasa Indonesia untuk lingkup media massa banyak hal teknis yang menjadi kendala di lapangan dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti pada media massa cetak, radio siaran, dan televisi, di samping harus pula memperhitungkan dari segi bisnis-- antara idealis dan kapitalis.

Sistem Pendidikan dan Rekrutmen Tenaga Kerja

Sebagaimana sudah dikemukakan, salah satu kendala utama dalam pembinaan bahasa Indonesia di lingkungan media massa adalah masalah tenaga pembina atau penyuluh, yang secara tidak langsung berkait pula dengan mutu tenaga kerja, baik yang berkaitan dengan tenaga di bidang kebahasaan, maupun di bidang media massa. Ini berarti, berkait pula dengan lembaga yang meluluskan tenaga kerja tersebut, yaitu lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal,

maupun lembaga pendidikan nonformal. Pembicaraan tentang lembaga pendidikan, tentu tidak dapat dilepaskan dengan sistem pendidikan bahasa dan pendidikan ilmu komunikasi dan jurnalistik di Indonesia. Hampir sebagian besar tenaga kerja di bidang media massa merupakan lulusan pendidikan formal—mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, baik yang berkait dengan bidang media massa, maupun yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang media massa.

Dampak langsung dari latar belakang pendidikan tenaga kerja yang berkecimpung dalam bidang media massa adalah mutu kerja di bidang media massa belum memenuhi persyaratan, walaupun ada beberapa penerbitan media massa cetak dan media massa elektronik yang tenaga kerjanya sudah memenuhi uji mutu, tetapi sebagian besar masih di bawah standar uji mutu tenaga kerja yang profesional. Selain itu, selama ini sistem pendidikan bidang komunikasi dan jurnalistik berkesan “menganaktirikan” materi bahasa Indonesia dibandingkan materi bidang komunikasi dan jurnalistik. Artinya, sistem pendidikan komunikasi dan jurnalistik masih bersifat parsial, belum integral. Demikian pula dengan sistem pendidikan dalam lingkungan bahasa dan sastra tidak pernah memasukkan materi ilmu komunikasi dan jurnalistik dalam kurikulum bahasa Indonesia. Ironisnya, kajian bahasa dalam media massa ada yang dikaji oleh sarjana bahasa, walaupun yang bersangkutan “tidak pernah belajar” ilmu komunikasi, padahal dalam era global sekarang ada kecenderungan batas disiplin ilmu sudah mengarah kepada multidisiplin (Mulyana, 2000; Eko Purnomo, 2003).

Sejalan dengan itu, sudah saatnya pemikiran tentang adanya multidisiplin di perguruan tinggi perlu diwujudkan, paling tidak dari segi kurikulum yang integral, antara kurikulum bahasa dan komunikasi. Hal ini sudah pernah dirintis di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP Universitas Sriwijaya selama dua periode kurikulum, yaitu Kurikulum 1996 dan Kurikulum 2001 dan tampaknya cukup berhasil. Pada Kurikulum 1996 ada lima mata kuliah bidang komunikasi dengan bobot 12 sks yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah: Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik, Bahasa Jurnalistik, Hukum Pers dan Kode Etik, Keterampilan Pers dan Jurnalistik, dan Kehumasan. Kurikulum 1996 ini selain diikuti mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, juga diberi kesempatan bagi mahasiswa program studi lain, karena merupakan mata kuliah paket khusus. Pada Kurikulum 2001 ada empat mata kuliah dengan bobot 8 sks yang

merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, mata kuliahnya sama dengan Kurikulum 1996, kecuali mata kuliah Hukum Pers dan Kode Etik. Untuk dapat mengikuti mata kuliah komunikasi dan jurnalistik, ada prasyarat mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah menyimak, berbicara, dan menulis.

Berdasarkan pengalaman penulis mengasuh beberapa mata kuliah komunikasi dan jurnalistik ternyata dapat mengurangi masalah-masalah bahasa dan media massa. Ini berarti, adanya integrasi antara bidang bahasa dan bidang komunikasi yang berdampak positif dibandingkan bila secara parsial. Idealnya, wartawan mengetahui masalah-masalah kebahasaan, demikian juga ahli bahasa menguasai juga masalah-masalah media massa.

Selain masalah sistem pendidikan, masalah penerimaan tenaga kerja di bidang media massa dan bidang bahasa, perlu sistem rekrutmen yang mengharuskan calon tenaga kerja menguasai bidang media massa dan/atau juga menguasai bidang bahasa, demikian pula untuk rekrutmen tenaga kerja bidang kebahasaan hendaknya juga menguasai bidang media massa. Mudah-mudahan sistem rekrutmen tenaga kerja seperti ini dapat meningkatkan kinerja, sehingga peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat terwujud secara optimal.

4. Penutup

Peran media massa dalam era global sekarang merupakan hal yang penting dan dapat “mewarnai” kehidupan masyarakat, baik yang positif, maupun yang negatif. Untuk mewujudkan peran media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah perlu adanya komitmen yang jelas dan tegas dari lembaga publik yang terkait dengan media massa dan bidang kebahasaan, terutama pengambil kebijakan publik, seperti: DPR, Pemerintah, Pusat Bahasa, Dewan Pers, Organisasi Pers dan Pengawasan Pers, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Penerbit Media Massa Cetak (surat kabar, majalah, tabloid, buletin), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Stasiun Radio Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Pers, Stasiun Televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adul, M. Asfandi. 1981. *Bahasa Indonesia Baku dan Fungsi Guru dalam Pembinaan Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ali Masri, R.H.M., N. Ahmad, dan M.E. Purnomo. 2001. "Kesinoniman Disfemisme dalam Surat Kabar Terbitan Palembang" *Lingua*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2001. Palembang: JPBS-FKIP Unsri, LB Unsri, PSPB PPs Unsri, MLI Cabang Palembang.
- Adhitama, Prahastoeti. 1998. "Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Massa" Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Astraatmaja, Atmakusumah. 1998. "Bahasa Indonesia dalam Media Massa" Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. 2000. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Canada: Wadsworth.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 1995. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, S. 1998. "Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa Indonesia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fishman, Joshua A. 1972. *The Sociology of Language*. Rowley Massachusetts: Newbury House Publishers
- Gerungan, W.A.. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Gunarwan, Asim. 1998. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di Dalam Era Globalisasi". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halim, Amran (Ed.). 1984. *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hasjim, Nafron. 1998. "Peningkatkan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesastraan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ishadi Sk. 1998. "Pendidikan Bahasa Indonesia Melalui Media Elektronik" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Juti, Muradi. 1998. "Peningkatan Mutu Pemasarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Memperkukuh Jati Diri Bangsa dalam era Globalisasi" Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Latif, H.A.. 1998. "Strategi Penyuluhan Bahasa: Suatu Pemikiran" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latief, A.. 1998. "Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan: Masa Kini dan Masa Depan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lapoliwa, Hans. 1998. "Lafal Bahasa Indonesia Baku". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lapoliwa, Hans. 1998. "Strategi Pemasarakatan Hasil Pengembangan Bahasa: Beberapa Pokok Pikiran" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lauer, Robert H.. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeliono, Anton M. 1998. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Dalam Era Globalisasi". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuasa-nuansa Komunikasi, Menoropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2000. *Komunikasi Anrbudaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 200. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunaryo, Adi dan Sri Sukesri Adiwimarta. 1998. "Pengembangan Istilah dalam Era Globalisasi". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Taha, Zainuddin. 1998. "Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Cetak" dalam *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*, Penyunting Penyelia Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, Zuber. 1970. *Bahasa Persatuan: Kedudukan, Sedjarah, Persoalan-persoalannya*. Djakarta: Gunung Agung.

- Veeger, K.J.. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: McGraw Hill Boks Company.

DAFTAR ORGANISASI PERS INDONESIA

No.	Nama Organisasi	No.	Nama Organisasi
1	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).	25	Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia(KO-WAPPI)
2	Sekretariat Wartawan Independen Indonesia (SWII).	26	Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)
3	Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI).	27	Asosiasi Solidaritas Wartawan Indonesia, Gerakan Moral Peduli Amanat Rakyat (ASWARI GEMPAR)
4	Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI).	28	Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)
5	Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)	29	Persatuan Pers Nasional Indonesia (PPNI)
6	Himpunan Insan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)	30	Komite Wartawan Independen Indonesia (KWII)
	Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)	31	Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)
7	Komite Wartawan Indonesia (KWI)	32	Persatuan Wartawan Independen Indonesia (PWII)
8	Aliansi Jurnalistik Indonesia (ALJI)	33	Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI)
9	Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)	34	Komite Jurnalis Indonesia (KJI)
10	Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia	35	Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)
11	Ikatan Wartawan Republik Indonesia (IWARI)	36	Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI)
12	Persatuan Wartawan Foto Indonesia (PWFI)	37	Gabungan Wartawan Indonesia (GAWANI)
13	Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)	38	Federasi Wartawan Independent Indonesia Baru (FWIIB)
14	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	39	Persekutuan Oikumene Jurnalis Kristen Indonesia (PROJUSTISIA)
15	Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia	40	Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-REFORMASI)
16	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SERIKAT PEWARTA)	41	Aliansi Wartawan Indonesia (AWI)
17	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	42	Komite Jurnalis Indonesia (KJI)
18	Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI)	43	Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBAA)

19	Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)		
20	Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE)		
21	Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)		
22	Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)		
23	Silaturahmi Wartawan Muslim Indonesia (SWAMI)		
24	Ikatan Wartawati Indonesia (IWI)		

Sumber: Dewan Pers

JUMLAH STASIUN RADIO SIARAN SWASTA DI INDONESIA

No.	Provinsi	AM	FM	Jml.	No.	Provinsi	AM	FM	Jml.
1	D.I. ACEH (NAD)	34	26	60	14	BALI	10	10	20
2	SUMATERA UTARA	51	32	83	15	NUSA TENGGARA BARAT	6	6	12
3	SUMATERA BARAT	17	5	22	16	NUSA TENGGARA TIMUR	2	4	6
4	RIAU	10	19	29	17	KALIMANTAN SELATAN	19	10	29
5	JAMBI	10	4	14	18	KALIMANTAN BARAT	14	8	22
6	BENGKULU	7	4	11	19	KALIMANTAN TENGAH	12	6	18
7	SUMATERA SELATAN	25	19	64	20	KALIMANTAN TIMUR	4	16	20
8	LAMPUNG	27	16	43	21	SULAWESI TENGAH	10	3	13
9	DKI JAKARTA	4	35	39	22	SULAWESI SELATAN	19	14	33
10	JAWA BARAT	67	57	124	23	SULAWESI UTARA	5	13	18
11	JAWA TENGAH	81	38	119	24	SULAWESI TENGGARA	1	2	3
12	D.I. YOGYAKARTA	10	11	21	25	MALUKU	5	3	8
13	JAWA TIMUR	59	43	102	26	IRIAN JAYA (Papua)	2	-	2

Jumlah seluruh Indonesia 502 413 915

Sumber: PRSSNI

**FILM ATAU SINETRON ASING NON-BERBAHASA INGGRIS
YANG DITAYANGKAN DI TELEVISI INDONESIA**

No.	Judul Film atau Telenovela	Televisi yang Menayangkan	Jam Tayang	Hari Penayangan	Jenis Film/ Telenovela	Jumlah Penayangan Per Minggu
1	Maria Elena	TV 7	09.00	Senin—Kamis	Serial	4
2	Rauzan	Lativi	13.30	Senin—Kamis	Serial	4
3	Vivan Los Ninos	SCTV	16.30	Senin—Jumat	Serial	5
4	Wild Angel	Indosiar	09.00	Senin—Jumat	Serial	5
5	Carita De Angel	RCTI	17.30	Senin—Minggu	Serial	7
6	Luisa Fernando	Trans TV	11.00	Senin—Jumat	Serial	5
7	Judes Wife	ANTV	14.30	Senin—Jumat	Serial	7
8	American Family	SCTV	00.30	Minggu	Serial	1
9	Strawberry on the Short Cake	Indosiar	17.00	Senin—Kamis	Serial	4
10	Percikan Cinta	ANTV	12.00	Senin—Jumat	Serial	5
11	Meteor Garden 2	Indosiar	20.30	Kamis	Serial	1
12	2 Cinta 2 Masa	ANTV	18.30	Senin—Selasa	Serial	2
13	Fantasy	Indosiar	17.00	Jumat	Serial	1
14	Hati yang Luka	TPI	11.00	Senin	Serial	1
15	GTO	Indosiar	10.00	Minggu	Serial	1
16	Glass Shoes	Trans TV	14.30	Senin-Kamis	Serial	4
17	Shaka Laka Boom Boom	SCTV	16.00	Senin—Jumat	Serial	5
18	Bety Toons	RCTI	08.00	Selasa—Kamis	Serial Animasi	3
19	Dora Emon	RCTI	08.00	Sabtu-Minggu	Serial animasi	2
20	Sincan	RCTI	10.00	Minggu	Serial Animasi	1
21	Digimon	Indosiar	07.00	Minggu	Serial Animasi	1
22	Let's and Go	RCTI	06.30	Minggu	Serial Animasi	1
23	Chibi Maruko Chan	RCTI	07.00	Minggu	Serial Animasi	1
24	Hamtarō	RCTI	07.30	Minggu	Serial Animasi	1

25	Ditektif Conan	Indonesiar	08.30	Minggu	Serial Animasi	1
26	Inuyasya	Indosiar	09.30	Minggu	Serial Animasi	1
27	Nonoko Chan	SCTV	07.30	Minggu	Serial Animasi	1
28	The Secret Ako Chan	Indosiar	06.30	Senin—Rabu	Serial Animasi	3
21	Saint Seiya	Indosiar	06.30	Kamis	Serial Animasi	1
22	Dragon Ball Z	Indosiar	09.00	Minggu, Rabu	Serial Animasi	2

Sumber: *Tabloid Bintang*, No. 633, Minggu Kedua, Juni 2003

KETERSEDIAAN, KEBERMANFAATAN DAN KEBERMAKNAAN BAHASA MINANGKABAU DALAM MEDIA SURAT KABAR, RADIO DAN TELEVISI DI PADANG SUMATERA BARAT DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA MINANGKABAU

M. Zaim

Universitas Negeri Padang/MLI Cabang Padang

A. Pendahuluan

Surat Kabar, Radio, dan Televisi adalah tiga jenis media masa yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik sebagai sarana komunikasi, sumber informasi aktual maupun sebagai sumber hiburan. Ketiga media masa ini digemari oleh masyarakat Sumatera Barat yang dikenal sebagai masyarakat Minangkabau. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan surat kabar, dan tumbuh berkembangnya radio-radio swasta di kota Padang. Di samping itu, TVRI Stasiun Padang masih tetap bertahan dengan program-program budaya Minangkabau di tengah kesulitan dana yang dihadapinya.

Hal yang menarik pada ketiga jenis media masa ini adalah tersedianya rubrik, acara, atau program yang dikemas dalam bahasa Minangkabau, bahasa asli (*native language*) masyarakat Sumatera Barat. Tulisan ini mencoba menganalisis ketersediaan, kebermanfaatan, dan kebermaknaan rubrik, acara, atau program berbahasa Minangkabau yang disajikan oleh ketiga jenis media masa ini dalam kaitannya dengan upaya memelihara bahasa dan budaya daerah, yaitu bahasa dan budaya Minangkabau.

Ketersediaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pada jenis rubrik, acara atau program apa saja bahasa Minangkabau digunakan. Kebermaknaan maksudnya adalah sejauh mana rubrik, acara atau program itu bermakna dalam memelihara bahasa dan budaya Minangkabau. Kebermanfaatan maksudnya adalah sejauh mana manfaat acara itu dirasakan oleh pembaca, pendengar, dan pemirsa masyarakat Minangkabau dalam memelihara bahasa dan budaya Minangkabau.

B. Media Masa di Padang Sumatera Barat

Pada saat ini, ada tiga jenis media masa yang muncul dan berkembang di Padang Sumatera Barat, yaitu Surat Kabar, Radio dan Televisi. Ketiga media masa ini mempunyai segmen pencapir (pendengar, pembaca, pemirsa) yang berbeda. Ada yang diperuntukkan untuk segmen kawula muda, masyarakat menengah ke atas, dan

2
KETERSEDIAAN, KEBERMANFAATAN DAN KEBERMAKHAAN
BAHASA MINANGKABAU DALAM MEDIA SURAT KABAR, RADIO
DAN TELEVISI DI PADANG SUMATERA BARAT
DALAM MEMELIHARA BAHASA DAN BUDAYA MINANGKABAU

masyarakat umum.

1. Surat Kabar

Surat kabar adalah media informasi berita dan hiburan yang dikemas untuk konsumsi sehari-hari masyarakat. Surat kabar merupakan media *masa* cetak utama yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Jenis media cetak ini mudah ditemukan dan dapat dibaca oleh berbagai kalangan.

Perkembangan penerbitan surat kabar berkembang dengan pesat di Era Reformasi ini. Pada era orde baru jumlah surat kabar harian di Padang hanya tiga buah, yaitu "Haluan", "Singgalang", dan "Semangat", serta satu surat kabar mingguan, yaitu "Canang". Namun, sekarang surat kabar ini telah berkembang menjadi sepuluh surat kabar seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Surat Kabar yang terbit di Padang Sumatera Barat

No	Nama Surat Kabar	Moto	Jenis Surat Kabar
1.	Haluan	Mencerdaskan kehidupan masyarakat demi kemajuan bangsa	Harian
2.	Singgalang	Membina harga diri untuk kesejahteraan nusa dan bangsa	Harian
3.	Mimbar Minang	Untuk pembaruan dan silaturahmi	Harian
4.	Padang Ekspres	Koran Nasional dari Sumbar	Harian
5.	Pos Metro Padang	Terbit Nonstop	Harian
6.	Zaman	-	Mingguan
7.	Serambi Pos	Informasi Aktual Ranah Minang	Mingguan
8.	Garda Minang	Tajam Aktual dan Faktual	Mingguan
9.	Rakyat Mandiri	Suara Nurani Rakyat	Mingguan
10.	Media Sumbar	Informasi Independen yang Terpercaya	Mingguan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 buah surat kabar di Padang, lima berupa surat kabar harian dan lima lainnya surat kabar mingguan. Dua yang pertama merupakan pemain lama dan delapan lainnya muncul dan berkembang di era reformasi.

2. Radio

Ada beberapa pemancar/studio radio yang ada di Kota Padang, sebagiannya berupa radio milik pemerintah (RRI) dan sebagian lagi merupakan radio swasta niaga. Pemancar radio yang ada di Padang Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Radio di Padang Sumatera Barat

No	Nama Radio	Jenis	Segmen Pasar	Keterangan
1.	RRI Padang	AM	Umum	
2.	Suara Subuh	AM	Umum	
3.	RRI Programa 2 FM	FM	Umum	
4.	RRI Programa 3 FM	FM	Umum	
5.	Padang FM	FM	Umum	
6.	Sushi FM	FM	Menengah ke atas	
7.	Classy FM	FM	Menengah ke atas	
8.	Arbes Rasonia	FM	Kawula muda	
9.	SIP FM	FM	Kawula muda	

Dari sembilan pemancar radio di Padang, dua pemancar berfrekuensi AM dan tujuh pemancar berfrekuensi FM. Lima radio (RRI Padang, Suara Subuh, Padang FM, RRI Programa 2 dan RRI Programa 3) mempunyai segmen pasar umum, dua radio (Sushi FM dan Classy FM) mempunyai segmen pasar menengah ke atas, dan dua radio (Arbes dan SIPP FM) mempunyai segmen pasar kawula muda.

3. Televisi

Di samping media masa surat kabar dan radio, Kota Padang juga

mempunyai satu stasiun televisi, yaitu TVRI Stasiun Padang. Stasiun televisi ini menyiarkan acara daerah mulai pukul 16.00 sore sampai 19.00 malam. Dalam tiga jam siaran ini, TVRI Stasiun Padang menyajikan acara Berita Ranah Minang, Dialog, Kesenian Tradisional, dan Musik/Hiburan.

D. Bahasa dan Budaya Minangkabau

1. Bahasa Minangkabau

Bahasa Minangkabau (BM) adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau di propinsi Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau di perantauan. Jumlah penutur bahasa Minangkabau saat ini sekitar enam juta orang. Di samping bahasa Minangkabau, di Sumatera Barat juga terdapat bahasa Mentawai yang digunakan oleh Masyarakat di kepulauan Mentawai, bagian barat propinsi Sumatera Barat.

Seperti bahasa lain di dunia, Bahasa Minangkabau mempunyai ragam bahasa sehari-hari dan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi khusus. Jenis yang kedua ini dapat dikelompokkan ke dalam Sastra Minangkabau. Menurut Djamaris (2002), sastra Minangkabau dapat berupa sastra lisan dan sastra tertulis. Sastra lisan ini dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu (1) puisi, (2) prosa, dan (3) drama.

Selanjutnya Djamaris (2002) menyatakan, puisi dalam sastra Minangkabau dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu (1) mantra, puisi yang diciptakan untuk mendapatkan kekuatan gaib dan sakti, (2) pantun, sejenis puisi yang terdiri atas empat baris bersajak a b a b, dua baris pertama berupa sampiran dan dua baris terakhir berupa isi, (3) talibun, hampir sama dengan pantun tetapi jumlah barisnya lebih dari empat dan jumlahnya selalu genap, (4) pepatah petitih, hampir sama dengan peribahasa dalam sastra Indonesia, yaitu ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus dan kiasan, (5) teka teki, yaitu pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga jawabannya sukar ditebak, (6) syair, yaitu puisi yang terdiri atas empat baris, bersajak a a a a, dan keempat barisnya berupa isi, (7) pasambahan, pembicaraan dua pihak untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan hormat dan pilihan kata serta kiasan dengan irama tertentu.

Prosa dalam sastra Minangkabau terdiri atas *curito*, *kaba*, dan *tambo*. (1) *Curito* (cerita) merupakan cerita pendek, sederhana, isinya

bersifat dongeng, dan bahasanya bahasa prosa biasa. Termasuk dalam jenis cerita ini, di samping dongeng, adalah legenda, misalnya *Si Malin Kundang*; (2) *Kaba* adalah cerita prosa berirama berbentuk narasi (kisah) dan tergolong cerita panjang, misalnya *Kaba Anggun nan Tungga*; (3) *Tambo* merupakan karya sastra yang menceritakan sejarah (asal usul) suku bangsa, negeri dan adat Minangkabau.

Drama dalam sastra Minangkabau berbentuk *randai*, yaitu pentas tradisional Minangkabau yang dimainkan di lapangan terbuka dalam bentuk arena. *Randai* mengandung unsur dialog, tari, lagu, dan musik (saluang, talempong).

2. Budaya Minangkabau

Dalam konsep sehari-hari istilah kebudayaan dipahami sebagai hal-hal yang mengacu kepada sesuatu yang indah, seperti tari-tarian, seni rupa, seni suara, dan kesusasteraan. Dalam ilmu antropologi, istilah kebudayaan didefinisikan oleh Koentjaraningrat (1990) sebagai "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar." Definisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya beberapa tindakan manusia yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Filsafat hidup orang Minang adalah "Alam Takambang Jadi Guru", dunia di sekitar kita merupakan lingkungan di mana semua kenyataan dan kejadian serta rahasia dibalik kejadian itu dapat dipelajari dan dijadikan guru.

Budaya, menurut KBBI (2001), adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dengan demikian, adat istiadat, atau kebiasaan masyarakat Minangkabau, baik berupa tindakan, gagasan, maupun hasil karya masyarakat Minangkabau dapat dinyatakan sebagai budaya Minangkabau. Oleh karena itu, adat istiadat, kebiasaan, gagasan, kesenian (tari, musik, drama) dan karya sastra yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau dapat digolongkan kepada kebudayaan Minangkabau.

C. Ketersediaan Bahasa Minangkabau pada Media Masa di Padang Sumatera Barat

Seperti layaknya media masa nasional, media masa di Padang, Sumatera Barat menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan misinya. Namun, bahasa Minangkabau, sebagai salah satu bahasa

daerah, digunakan pada beberapa rubrik, program, dan acara pada media masa yang ada di Padang. Penggunaan BM ini terkait dengan menyajikan budaya Minangkabau. Berikut ini akan dijelaskan ketersediaan bahasa dan budaya Minangkabau tersebut pada media masa di Padang, yaitu surat kabar, radio, dan televisi.

1. Surat Kabar

Tidak semua surat kabar yang terbit di Padang menyediakan bahasa dan budaya Minangkabau dalam surat kabarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Ketersediaan bahasa dan Budaya Minangkabau dalam Surat Kabar di Padang Sumatera Barat

No.	Nama Surat Kabar	Jenis Tulisan					
		Opini	Judul Kolom	Judul Halaman	Judul Berita	Cerita	Pantun
1.	Haluan						
2.	Singgalang	v	v	v	v	v	v
3.	Mimbar Minang	v					
4.	Padang Ekspres	v					
5.	Pos Metro Padang		v				v
6.	Zaman		v				
7.	Serambi Pos	v					v
8.	Garda Minang	v					
9.	Rakyat Mandiri						
10.	Media Sumbar	v					

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 surat kabar, hanya 8 yang menyediakan bahasa dan budaya Minangkabau. Dari segi ketersediaan bahasa Minangkabau di surat kabar, hampir semua surat kabar menggunakan bahasa Minangkabau dalam menyampaikan Opini baik berupa karikatur maupun komentar. Beberapa surat kabar juga menggunakan bahasa Minangkabau untuk memberi judul kolom dan judul berita. Sementara, hanya surat kabar Singgalang yang menggunakan bahasa Minangkabau dalam berbagai jenis tulisan, seperti Cerita (Cerpen dan Cerbung) dan pantun.

Dari 10 surat kabar yang terbit di Padang, lima surat kabar

menyajikan bahasa Minang pada pojok opininya. Pada dua surat kabar, surat kabar *Singgalang* dan *Media Sumbar* umpamanya, ada dua jenis penyampaian opini ini, yaitu dalam bentuk karikatur dan dalam bentuk pojok opini. Sementara tiga surat kabar lagi, yaitu *Padang Ekspres*, *Serambi Pos*, *Garda Minang*, dan *Mimbar Minang* menyajikan dalam bentuk pojok opini. Lihatlah contoh berikut ini:

1) Karikatur berbahasa Minang

Karikatur berbahasa Minangkabau merupakan penyampaian opini lewat gambar karikatur dengan menggunakan dialog berbahasa Minangkabau. Lihatlah contoh berikut ini:

(1) Tanbaro (Singgalang)

(Gambar dialog antara "cucu" dengan kakeknya, yang dalam BM disebut "inyiak")

+ Inyiak picayo nyiak? (Kakek percaya kek?)

- Lai Senek (Ada sedikit)

+ Awak indak (Saya tidak)

(2) Opini (Media Sumbar)

(Gambar dialog antara dua orang dewasa, yang satu pakai peci dan yang lainnya tidak)

+ Ado dana Rp.250 juta untuak penertiban Terminal Bayangan. Tapi kok tatap indak bisa ditertibkan?? Di ma salahnyo?? (Ada dana Rp. 250 juta untuk penertiban Terminal Bayangan. Tapi kok tetap tidak bisa ditertibkan?? Dimana salahnya??

- Komitmen moral nan randah, atau??? Antahlah, Ngku! (Komitmen moral yang rendah, atau.....? Entahlah, pak!!)

Karikatur seperti contoh di atas biasanya berupa dialog antara dua orang dalam BM sesuai dengan topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada surat kabar hari itu.

2) Pojok Opini

Pola penyampaian pojok opini sama pada semua surat kabar yang terbit di Padang, yaitu kutipan berita pada baris pertama, kemudian diikuti dengan penyampaian opini dalam bahasa Minangkabau. Lihatlah contoh berikut ini:

(3) POJOK

Soal invasi, Saddam-Bush Adu Panco

- *Bush indak barani.*

SLTP No. 34 Padang Diresmikan

- *Horee, anak bisa sakola...*

Disambut positif. Syafii Jadi Wapres

- *Mudah-mudahan urang awak jadi Presiden*

(Padang Ekspres, Selasa 8 April 2003, hal. 4)

(4) Galitiak Garda...

+ Punyo izin dan Dokumen Kayu Tetap dikawal?

- *Kaolah!, lah dikawal pulo mangko kabanyak pitih kalua!*

+ SP BUMN Yes!, BUMD No!

- *Oh Yess...!, Oh No...!, Ondeh Mandeh!*

+ Mendagri Membatalkan Pemilihan Ulang Wako dan Wawako Padang.

- *Ondeh mandeh, Hilang pitih masuak.*

Angku Garda

(Garda Minang, Rabu 11-17 Juni 2003, hal. 1)

(5) SARABI bakuah

+ Dua anggota DPRD Agam dari PPP adu jotos.

- *Rancak mah...*

+ Bursa Wako Pariaman hangat.

- *Ma nan hangat jo sala lauak sudah bagoreang, Jo...?*

+ Setelah Ijazah palsu dan SK Palsu, kini beredar pula SK Mendagri Palsu.

- *Padang memang suko kepalsuan.*

Bung Seram

(Serambi Pos, Senin, 23-29 Juni 2003, hal. 2)

(6) Kopi Pahit

+ Mendagri larang Pilwako Padang hari ini.

- *Tangka bana mah...*

+ Demi walikota, wakil Bupati Pariaman mundur.

- *Mantap, Jo...?*

(Mimbar Minang, Rabu, 30 Juli 2003, hal. 1)

Contoh (3) adalah "Pojoek" versi "Padang Ekspres" tanpa ada identitas pemberi opini. Contoh (4) dengan judul pojok "Galitiak Garda" dan pemberi opini adalah "Angku Garda", contoh (5) dengan judul pojok "Sarabi bakuah" dengan pemberi opini "Bung Seram", dan contoh (6) dengan judul pojok "Kopi Pahit" tanpa identitas pemberi opini. Lihatlah ungkapan-ungkapan BM yang menunjukkan Opini pada data di atas.

- a. *Bush indak barani.* (Bush tidak berani)
- b. *Horee, anak bisa sakola...* (Horee anak bisa sekolah)
- c. *Mudah-mudahan urang awak jadi Presiden* (Mudah-mudahan orang kita jadi Presiden)
- d. *Kaolah!, lah dikawal pulo mangko kabanyak pitih kalua!* (Rasain, sudah dikawal pula maka banyak duit keluar)
- e. *Oh Yess...!, Oh No...!, Ondeh Mandeh!* (Oh ya...! Oh tidak.... Ya mak!)
- f. *Ondeh mandeh, Hilang Pitih masuk.* (Ya mak, hilang duit masuk)
- g. *Rancak mah...* (Bagus nih...)
- h. *Ma nan hangat jo sala lauak sudah bagoreang, Jo...?* (Mana yang hangat dibandingkan sala lauak baru saja digoreng, kah..?)
- i. *Padang memang suko kepalsuan.* (Padang memang suka kepalsuan)
- j. *Tangka bana, mah!*

Ungkapan-ungkapan di atas merupakan opini berupa tanggapan, keluhan, rasa gembira, pernyataan dan sebagainya.

3) Judul Kolom

Yang dimaksud dengan judul kolom di sini adalah sub judul yang

ada pada halaman tertentu isi suatu surat kabar. Judul-judul kolom berbahasa Minang itu misalnya:

- a. Nan Takana-Takana Juo (Yang masih teringat-ingat)
- b. Lamak dek Awak Katuju dek Urang (Enak sama kita, senang sama orang)
- c. Silek Kato (Silat kata)
- d. Kampiun Serambi (sejenis makanan "kampiun" yang disajikan oleh koran Serambi)
- e. Surek dari Rantau (surat dari rantau)

4) Judul Halaman

Yang dimaksud dengan judul halaman adalah judul yang diberikan pada lembaran-lembaran tertentu di surat kabar. Judul-judul halaman berbahasa Minangkabau itu misalnya:

- a. Raso jo Pareso (Rasa dan Periksa)
- b. Umbuik Mudo (Generasi Muda)
- c. Ranah Bundo (Berita kampung halaman)

5) Judul Berita

Yang dimaksud dengan judul berita di sini adalah pemakaian bahasa Minangkabau untuk judul berita. Misalnya:

- a. Nostalgia Gelanggang Bukik Ambacang: Ompek-ompek Kudo nan Lopeh, Agam Juo Pacu nan Manang (Empat-empat kuda dilepas, Agam juga yang menang berpacu)
- b. Disiko Indak, nan Disitu Iyo (Di sini tidak, yang di sana ya).

6) Cerita dan Karya Sastra

Cerita dan karya sastra bahasa Minang yang ada dalam surat kabar dapat berupa:

- a. Curito (Cerita), yaitu cerita yang terjadi pada seseorang dan disampaikan dalam bahasa Minang formal, misalnya cerita yang disajikan pada kolom "Nan takana-takana juo", "Senggang", "Lamak dek awak katuju dek urang", dan "Kakobeh"
- b. Cerita Pendek, yaitu cerita pendek yang disampaikan dalam bahasa Minang, misalnya "Maliang Jemputan" (Singgalang)
- c. Cerita Bersambung, yaitu berupa cerita bersambung yang ditulis dalam bahasa Minang formal.
- d. Pantun, yaitu sejenis puisi yang bersajak a b a b. Pantun ini dapat berupa pantun jenaka, pantun nasehat, dan pantun

biasa. Misalnya:

Rang kurai memasak kacang padi
Handak dibaok ka Nagari Taluak
Sabana banyak parangai padusi kini
Bantuak elok parangainyo buruak

("Pantun Jenaka" Posmetro, 20 Juli 2003)

Sungai Sariak Pakan Rabaa
Luruuh jalannyo ka Sicincin
Nasib denaiko antah ka baa
Mancaliak adiak batuka cincin

("Mari kito bapantun" Serambi Pos, 23 Juni 2003)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan bahasa Minangkabau di surat kabar sangat bervariasi, mulai dari sepotong karikatur, opini, judul halaman, judul kolom, sampai ke bentuk cerita (cerpen dan cerbung) yang berupa karya sastra dan pantun sebagai salah satu budaya Minang yang dominan dapat kita temukan pada setiap penggunaan bahasa Minangkabau dalam masyarakat Minangkabau..

2. Radio

Radio-radio di Padang juga bervariasi dalam hal penggunaan bahasa Minang dalam siarannya. Lihatlah Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

Ketersediaan bahasa dan Budaya Minangkabau dalam Radio di Padang Sumatera Barat

No.	Nama Radio	Jenis Acara				Ket.
		Berita	Iklan	Hiburan	Dialog	
1.	RRI Padang	v	v	v	v	
2.	RRI Programa II	v	v	v	v	
3.	RRI Programa III			v		
4.	Sushi FM			v	v	

5.	Arbes Rasonia			v	v	
6.	Classy FM			v		
7.	Padang FM			v	v	
8.	SIP FM			v		

Di radio yang ada di Padang, bahasa Minangkabau digunakan dalam program berita, iklan, hiburan (musik Minang Modern dan tradisional), dan dialog. Namun, setiap radio mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan siaran berbahasa Minangkabaunya. RRI Padang dan RRI program 2 misalnya menggunakan bahasa Minangkabau untuk berita, iklan, hiburan dan dialog, sementara Sushi FM hanya untuk hiburan dan Dialog. Arbes Rasonia hanya untuk dialog saja.

3. Televisi

TVRI Stasiun Padang mempunyai program khusus "dialog" dalam bahasa Minangkabau dalam suatu kemasan acara yang disebut dengan "Carito Lapau". Acara ini menggambarkan budaya berkumpulnya pria Minangkabau di *lapau* (kedai kopi) dan mengupas persoalan aktual yang terjadi baik di lingkungan mereka maupun situasi kenegaraan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Minangkabau sehari-hari. Acara ini disiarkan dengan durasi satu jam, yaitu dari pukul 17.00 – 18.00 WIB. Acara ini merupakan program unggulan TVRI Stasiun Padang dan semula disajikan satu kali seminggu setiap hari Sabtu, namun kemudian menjadi satu kali lima belas hari. Pengisi acara ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih sesuai dengan topik yang dibahas pada hari itu.

Di samping acara "carito lapau", bahasa Minangkabau juga digunakan oleh TVRI stasiun Padang dalam acara dialog "Kesehatan Keluarga" yang dengan kocak dibawakan oleh "One" dengan bahasa Minang dialek Padang Pariamannya. Acara ini berupa dialog interaktif dengan memberi kesempatan kepada pemirsa ikut bertanya dan berkomentar dalam dialog yang disajikan.

Di samping kedua acara itu, pada setiap hari Selasa, TVRI Stasiun Padang juga menyajikan acara budaya minangkabau berupa seni pertunjukan "Randai" (drama tradisional Minangkabau), "Saluang" (musik tradisional minang diiringi dengan tukang dendang), dan "rabab" (musik tradisional Minangkabau diiringi dengan tukang *kaba*).

Dua acara khas Musik Minang yang menggambarkan budaya minang juga diprogramkan oleh TVRI Stasiun Padang, yaitu "Badendang" yang menyajikan nyanyi-nyanyi Minangkabau yang sedang dan pernah berjaya di bumi nusantara, serta "Gamad" yang menyajikan musik Melayu Minang.

D. Kebermanfaat Bahasa Minangkabau pada Media Masa di Padang Sumatera Barat

Bahasa Minangkabau yang digunakan dalam media masa di Padang adalah BM sebagai alat komunikasi, yaitu mengkomunikasikan informasi-informasi aktual dan hiburan kepada masyarakat pendengarnya, yaitu masyarakat Minangkabau. Setiap media masa mencoba menyeleksi program acara apa saja yang layak disampaikan dalam BM.

Surat kabar sebagai media cetak memilih menyampaikan opini, berita, dan hiburan untuk disampaikan dalam BM. Radio sebagai media audio memilih berita, dialog, dan hiburan sebagai acara yang perlu disampaikan dalam BM. Sementara televisi memilih dialog dan hiburan sebagai acara yang perlu disampaikan dalam BM. Ini semua mengindikasikan kebermanfaatan program berbahasa Minang untuk dibaca, didengar, dan ditonton dengan nyaman dan santai. Opini, berita dan hiburan enak dibaca pada suasana santai. Berita, dialog dan hiburan juga enak didengar dalam waktu senggang. Demikian pula dialog yang disampaikan dalam bentuk hiburan, dan hiburan itu sendiri enak ditonton dalam suasana yang santai juga. Jadi, pemilihan acara ini dengan mempertimbangkan suasana yang memungkinkan dihadapi pembaca, pendengar dan pemirsa. Apabila suasana ini diperhatikan oleh pemilih program, maka pembaca, pendengar dan pemirsa tentu akan merasakan manfaat semuanya ini bagi mereka.

Kebermanfaatan bahasa Minangkabau dalam media masa ini dapat pula dilihat dari fungsi bahasa yang digunakan dalam penggunaan BM ini. Secara umum ada tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Sudaryanto, 1990). Fungsi ideasional berkaitan dengan peran bahasa untuk mengungkapkan 'isi', pengungkapan pengalaman penutur tentang dunia nyata. Fungsi interpersonal berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan menjaga hubungan sosial. Fungsi tekstual berkaitan dengan fungsi bahasa untuk membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh pemakainya. Bahasa Minangkabau yang digunakan oleh media masa

di Padang menggunakan ketiga fungsi bahasa di atas. Hal ini dapat dilihat dari jenis acara, program, dan rubrik yang disajikan media masa ini.

E. Kebermaknaan Bahasa Minangkabau pada Media Masa di Padang Sumatera Barat

Kebermaknaan maksudnya di sini adalah sejauh mana rubrik, acara atau program berbahasa Minangkabau pada media surat kabar, radio dan televisi tersebut bermakna dalam memelihara bahasa dan budaya Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari jenis bahasa yang digunakan dan jenis budaya yang ditulis, disiarkan, dan ditayangkan pada media masa di Padang.

Bahasa Minangkabau yang digunakan oleh media masa di Padang ini bervariasi, mulai dari BM informal, BM formal, sampai BM *frozen*. Rubrik opini pada surat kabar, misalnya, disajikan dalam bentuk BM informal, demikian juga pada acara dialog dan hiburan. Sementara pada beberapa tulisan, misalnya pada kolom "Raso jo Pareso", ada rubrik "Lamak dek Awak Katuju dek Urang", "Nan Takana-takana Juo", dan "Camin Situasi" digunakan BM formal. BM klasik yang cenderung berupa BM *frozen* digunakan dalam dialog "randai".

Jenis budaya yang digunakan adalah sastra Minangkabau, seperti *carito*, kaba, dan pantun; kesenian tradisional, seperti tari Minang, musik saluang, rabab dan talempong, serta drama tradisional Minangkabau, yaitu *Randai*. Kebiasaan lelaki Minang duduk dilapau sambil bertukar pikiran juga dikemas untuk menyampaikan dialog tentang masalah yang hangat dibicarakan dan dikemas dengan menarik oleh TVRI Stasiun Padang.

Semua acara di atas menggambarkan betapa bermaknanya bahasa Minangkabau yang digunakan oleh media masa di Padang dalam memelihara kebudayaan Minangkabau. Tidak hanya jenis bahasa Minangkabau informal yang digunakan, bahasa Minangkabau formal dan sastra juga digunakan, baik di surat kabar, radio maupun televisi. Demikian juga, kebudayaan Minangkabau disajikan dalam kemasan bahasa tulis dan bahasa lisan yang mencerminkan kebudayaan Minangkabau secara menyeluruh.

F. Simpulan

Bahasa Minangkabau digunakan oleh media masa yang terbit di Padang untuk memelihara budaya Minangkabau. Hal ini dapat dibuktikan dengan digunakannya bahasa Minangkabau dalam berbagai

jenis rubrik, program dan acara baik pada surat kabar, radio, maupun televisi. Pada media surat kabar, BM digunakan untuk menyampaikan opini, judul berita, judul halaman, judul kolom dan menyampaikan cerita berupa cerita pendek dan cerita bersambung. Disamping itu, BM juga digunakan untuk menyampaikan pengalaman yang tak terlupakan. Pada media radio, BM digunakan untuk menyampaikan berita, iklan, dialog informal, dan hiburan musik. Sementara pada media televisi, BM digunakan untuk menyampaikan budaya Minang berupa dialog spesifik Minangkabau “curito lapau” dan kesenian tradisional berupa randai, saluang, rabab, dan musik tradisional minang lainnya.

Tersedianya sarana berbahasa Minangkabau pada media cetak, audio, dan audio visual ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan dianggap lebih informatif karena disampaikan dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Demikian juga untuk budaya Minangkabau, dengan disiarkannya kesenian-kesenian tradisional (tari, nyanyi, rabab, saluang, randai) pada TVRI Stasiun Padang, masyarakat merasa masih mempunyai jenis-jenis kesenian seperti ini yang mulai kurang diminati generasi muda Minangkabau.

Kebermaknaan acara ini dapat dilihat dari antusias pembaca, pendengar, dan penonton membaca, mendengar, dan menonton acara-acara berbahasa Minang ini. Secara umum masyarakat merasa tergugah hatinya untuk menikmati sajian-sajian acara ini setiap kali acara ini muncul baik di surat kabar, radio, maupun televisi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djamaris, Edward. 2002. **Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Koentjaraningrat. 1990. **Pengantar Ilmu Antropologi**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryanto. 1990. **Menguak Fungsi Hakiki Bahasa**. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suriasumantri, Jujun (1998) **Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

**PERAN MEDIA MASSA
DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
MELALUI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
YANG BAIK DAN BENAR:
PEMBERDAYAAN RAGAM BAHASA INDONESIA**

Imelda Yance
Balai Bahasa Pekanbaru

Pendahuluan

Media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai kemampuan besar untuk mempengaruhi masyarakat. Berita-berita yang disampaikan media massa merupakan informasi yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat. Di samping itu, cara media massa menyampaikan informasi (perilaku berbahasa) juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam berbahasa.

Akhir-akhir ini media massa sering mendapat kritikan baik karena isi berita maupun karena bahasa yang digunakan. Media massa sering dikatakan tidak mendidik, juga dikatakan sebagai pencetus dan pemicu perpecahan karena berita-berita yang diturunkannya. Individu dengan individu, individu dengan institusi, institusi dengan institusi saling tuntutan atau saling mengajukan somasi setelah mendengar atau membaca pemberitaan media massa. Di samping itu, para pemerhati bahasa Indonesia menilai bahasa yang digunakan oleh media massa belum sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbagai kesalahan kebahasaan ditemukan seperti kesalahan morfologis, kesalahan sintaksis, kesalahan penyerapan istilah, dan kesalahan ejaan (media massa cetak).

Dalam situasi yang dipenuhi rasa curiga dan isu perpecahan saat ini, dibutuhkan ikhtiar seluruh elemen bangsa termasuk media massa untuk membangkitkan kembali kepekaan perasaan kemanusiaan. Salah satu upaya untuk membangkitkan kepekaan tersebut dari pihak media massa adalah menyampaikan berita dengan bahasa Indonesia yang sesuai ragam dan kaidah serta mempertimbangkan kondisi psikologis sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi perpecahan, saling curiga, jatuh-menjatuhkan martabat, dan sebagainya. Iklim yang harus ditumbuhkan adalah kebebasan mengemukakan pendapat secara bermartabat: boleh berbeda

pendapat, tapi tidak dengan menjatuhkan martabat orang lain.

Kesalahan-kesalahan berbahasa media massa yang diperbincangkan pemerhati bahasa Indonesia di atas cenderung tertuju pada penggunaan bahasa Indonesia ragam formal (dan beku). Padahal, bahasa Indonesia tidak hanya memiliki ragam formal, tapi juga memiliki ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Apakah ragam-ragam tersebut tidak mendapat tempat di media massa sehingga agak luput dari perhatian pemerhati bahasa?

Makalah ini ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah di atas dalam kerangka tugas media massa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Media Massa dan Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Media massa selain sebagai media informasi juga merupakan media hiburan. Kelihantannya, karena fungsinya yang terakhir inilah media massa lebih diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Informasi-informasi dan hiburan yang disajikan diharapkan dapat menjadi makanan bagi kognisi dan juga bagi afeksi masyarakat. Dengan kata lain informasi dan hiburan yang disampaikan oleh media massa dapat mencerdaskan bangsa Indonesia baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

Kecerdasan merupakan faktor yang sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan manusia. Selama ini konsep kecerdasan lebih terfokus pada kecerdasan intelektual (IQ), terutama mengenai kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal dengan sangat baik (sempurna), tidak termasuk di dalamnya kemampuan berbahasa. Penelitian-penelitian terakhir menunjukkan bahwa manusia tidak hanya memiliki kecerdasan tunggal (IQ), tapi memiliki kecerdasan yang multi dan dapat ditingkatkan (Gardner dalam Nggermanto, 2002). Secara garis besar kecerdasan yang multi tersebut dan yang sangat berperan dalam kehidupan dapat dikelompokkan atas kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ).

Dalam IQ terkandung kecerdasan linguistik dan matematis, dalam EQ terkandung kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Sementara itu, SQ lebih terfokus pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Nggermanto, 2002). Penelitian yang dikembangkan oleh Daniel Goleman (dalam Nggermanto, 2002) menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang dalam kehidupan hanya 4% ditentukan oleh IQ

dan 75% ditentukan oleh EQ.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa IQ memiliki dimensi kecerdasan linguistik dan kecerdasan matematis. Kecerdasan linguistik banyak terlibat dalam aktivitas membaca, menulis, berbicara dan mendengar. Kecerdasan matematik-logis digunakan untuk memecahkan masalah berbentuk logika simbolis dan matematika abstrak.

Daniel Goleman mengadaptasi EQ menjadi sebagai berikut:

Kesadaran diri; mengetahui apa yang kita rasakan suatu saat dan menggunakannya untuk mengambil keputusan diri sendiri; memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.

Pengaturan diri; menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas; peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu pulih kembali dari tekanan emosi

Motivasi; menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi.

Empati; merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang.

Keterampilan sosial; menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi dengan lancar; menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim (Nggermanto, 2002)

Kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi merupakan dimensi kecerdasan intrapersonal dalam EQ. Sementara itu, empati dan keterampilan sosial merupakan dimensi kecerdasan interpersonal dalam EQ. Kecerdasan intrapersonal dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Kecerdasan tersebut merupakan kepekaan seseorang mengenai suasana hati dan kecakapannya sendiri. Di lain pihak, kecerdasan interpersonal dibutuhkan dalam komunikasi dan juga dalam memahami orang lain.

Dari uraian di atas, ternyata baik IQ maupun EQ berkaitan dengan kemampuan penggunaan bahasa. Artinya, kemampuan penggunaan bahasa termasuk salah satu kecerdasan.

Pada akhirnya, jika dihubungkan dengan tugas media massa

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka media massa diharapkan dapat meningkatkan berbagai kecerdasan tersebut, baik melalui informasi yang diberikan maupun melalui cara memberikan informasi tersebut (perilaku berbahasa).

Media Massa dan Penggunaan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat juga diartikan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar tidak hanya berbahasa sesuai dengan kaidah. Konsep tersebut dapat disederhanakan pengertiannya menjadi menggunakan ragam bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi komunikasi dan sesuai dengan kaidah masing-masing ragam tersebut.

Dari pengkajian terhadap ragam bahasa dari sudut pandang produksi, bahasa memiliki ragam lisan dan ragam tulisan. Begitu juga halnya dengan bahasa Indonesia. Dari sudut pandang penggunaan berdasarkan situasi dan kondisi, maka akan terdapat bahasa ragam beku, ragam formal, ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Baik bahasa Indonesia ragam lisan maupun bahasa Indonesia ragam tulis, keduanya memiliki ragam sesuai situasi dan kondisi pemakaiannya.

Bahasa Indonesia yang digunakan oleh media massa memang memiliki karakteristik tersendiri. Bahasa tersebut memiliki ciri singkat, jelas, lugas, menarik. Ciri yang demikian disebabkan oleh sifat media massa sebagai media informasi sehingga fokusnya adalah bagaimana informasi dapat disampaikan dengan bahasa yang singkat dan menarik minat pemirsa/pendengar atau pembaca. Akan tetapi, media massa juga harus menyadari bahwa ia juga merupakan media hiburan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan tidak hanya untuk pemberitaan, tapi juga acara-acara hiburan dalam media elektronik dan rubrik-rubrik hiburan dalam media cetak.

Pada media elektronik, terdapat beragam acara. Ada acara berita dengan berbagai jenis bentuk dan judul, acara dialog yang mengulas topik-topik yang biasanya sedang hangat diperbincangkan, sinetron, musik, olahraga, infotainment, dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan media cetak, terdapat berbagai jenis rubrik atau tulisan. Ada juga berita dengan berbagai macam bentuk dan judulnya, tajuk rencana yang merupakan ulasan atau tanggapan redaksi terhadap situasi, kritik, dan koreksi terhadap sesuatu yang kurang baik, ulasan tentang suatu

masalah atau artikel tentang salah satu cabang ilmu, iklan tempat dunia usaha menawarkan usahanya dan sebagainya. Masing-masing jenis acara dan tulisan itu menggunakan pengungkapan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan sifat khas kebutuhan pemakainya. Bahasa berita lain dengan bahasa iklan, bahasa iklan berbeda dengan bahasa tajuk. Bahasa tajuk tidak sama dengan bahasa pojok, bahasa pojok lain pula dengan bahasa artikel dan lain sebagainya.

Acara berita pada media massa elektronik, misalnya, memang menggunakan bahasa Indonesia ragam lisan formal. Acara wawancara atau dialog menggunakan bahasa Indonesia ragam lisan konsultatif. Acara konsultasi kesehatan, kecantikan, masakan, musik akan lebih cocok dan mengena jika menggunakan bahasa Indonesia ragam santai.

Rubrik pojok atau iklan pada media cetak tidak menggunakan bahasa Indonesia ragam tulis resmi. Kelihatannya akan sangat lucu jika acara atau rubrik tersebut menggunakan bahasa Indonesia ragam baku atau ragam resmi. Kesan yang akan sampai kepada pembaca adalah ketidaktepatan penggunaan bahasa untuk isi yang disampaikan dalam rubrik tersebut.

Media Massa, EQ, dan Pemberdayaan Ragam Bahasa Indonesia

Selama ini dalam penggunaan bahasa atau dalam suatu peristiwa tutur (speech event), penutur yang ingin komunikasinya berhasil akan selalu mempertimbangkan faktor-faktor baik yang bersifat linguistik maupun nonlinguistik. Faktor nonlinguistik tersebut biasanya bersifat sosial-situasional. Hymes (dalam Nababan, 1993) menyingkat faktor nonlinguistik tersebut dengan SPEAKING, yang merupakan singkatan dari: *S(etting and Scene)*, *P(articipants)*, *E(nds) (purpose and goal)*, *A(ct sequences)*, *K(ey) (tone or spirit of act)*, *I(nstrumentalities)*, *N(orms) (of interaction and interpretation)*, dan *G(enres)*. Tidak jauh berbeda dengan peristiwa tutur, tindak tutur (speech event) walaupun cenderung bersifat individual, namun masih mempertimbangkan faktor linguistik dan faktor nonlinguistik yang bersifat sosial-situasional. Faktor-faktor nonlinguistik tersebut adalah posisi penutur (kepada siapa menyampaikan tuturan) dan situasi tuturan (dalam situasi bagaimana tuturan tersebut disampaikan). Faktor kepada siapa menyampaikan tuturan bersifat sosial, yaitu berbicara kepada anak kecil, kepada teman seprofesi, kepada atasan, dan sebagainya.

Saat ini kenyataan-kenyataan komunikasi yang terdapat di tengah masyarakat kita beserta segala dampaknya memperlihatkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas belum cukup

menentukan komunikasi akan lebih berhasil. Hudson (1980) pernah menyinggung faktor kecerdasan ikut menentukan komunikasi yang lebih berhasil, tapi Hudson tidak menjelaskan kecerdasan yang bagaimana yang dimaksudkannya.

Jika dihubungkan dengan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki manusia, maka faktor EQ-lah yang akan sangat membantu komunikasi yang lebih berhasil di samping faktor-faktor linguistis dan sosial-situasional yang telah disebutkan di atas. Agar komunikasi lebih berhasil, media massa selaku pengguna bahasa Indonesia (apa pun ragam bahasa Indonesia yang dipilih) harus mempertimbangkan hal yang dalam EQ disebut kemampuan untuk berempati.

Kemampuan untuk berempati dalam EQ tersebut akan menuntun pengguna bahasa dalam hal ini media massa Indonesia untuk memilih dan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat serta intonasi (bahasa ragam lisan) secara tepat sehingga pihak yang dituju atau orang-orang yang dibicarakan tidak tersinggung, pertanyaan tidak diinterpretasikan sebagai pernyataan, dan juga pendengar/pemirsa dapat memperoleh informasi yang mencerdaskan nalar dan emosi mereka.

Peran Media Massa dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar

Peran yang diharapkan dari media massa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat berupa sebagai berikut. Pertama, tertib menggunakan bahasa Indonesia (ragam bahasa Indonesia) dalam mata acara untuk media elektronik dan dalam rubrik untuk media cetak. Maksudnya, jika situasi dan kondisi mengharapakan penggunaan bahasa Indonesia ragam formal, maka gunakanlah bahasa Indonesia tersebut sebagaimana mestinya baik menyangkut pilihan kata, kalimat, ejaan maupun lafal (bahasa Indonesia ragam lisan). Begitu juga halnya dengan bahasa Indonesia ragam lainnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan tertib sesuai ragam dan kaidah merupakan cermin tertib dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, diharapkan informasi atau maksud yang ingin disampaikan dapat cepat ditangkap oleh pemirsa/pendengar atau pembaca media massa. Lebih jauh, jika informasi itu berisi pengetahuan yang dapat mencerdaskan bangsa Indonesia, maka tentu pengetahuan tersebut dapat cepat diterima oleh pemirsa/pendengar dan pembaca media massa.

Kedua, teladan menggunakan bahasa Indonesia (ragam bahasa Indonesia) dalam mata acara untuk media elektronik dan dalam rubrik

untuk media cetak. Media massa diharapkan mampu memberi contoh bagaimana menggunakan ragam-ragam bahasa Indonesia dengan tepat dalam masing-masing acara atau rubrik. Pemakaian ragam bahasa yang tercermin dalam masing-masing acara atau rubrik tersebut akan melatih pemirsa atau pembaca untuk juga memahami dan menggunakan ragam bahasa Indonesia untuk situasi dan kondisi yang berbeda-beda sifatnya. Di samping itu, media massa dapat mempertimbangkan faktor EQ dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian kemampuan untuk berkomunikasi yang termasuk ke dalam EQ dapat dimiliki dan diterapkan oleh pemirsa/pendengar atau pembaca. Selanjutnya, mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Ketiga, penyediaan ruang bahasa Indonesia sebagai mata acara tersendiri bagi media elektronik dan rubrik tersendiri untuk media cetak. Ide ini sudah lama disinggung oleh para pemerhati bahasa Indonesia. Tampaknya sampai saat ini belum mendapat sambutan yang baik dari media massa baik elektronik maupun cetak. Padahal, upaya tersebut dapat menjadi ruang konsultasi dan informasi masalah kebahasaan. Semoga akan terwujud.

Segala pekerjaan pedang itu
 boleh dibuat dengan kalam
 Adapun pekerjaan kalam itu
 tiada boleh dibuat dengan pedang
 Maka itulah ibarat yang terlebih nyatanya
 Dan beberapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus
 dengan segores kalam jadi tersarung

(Raja Ali Haji)

Setetes air yang sadar emosi diri
 Derajatnya meninggi bagai mutiara
 Setangkai rumput yang sadar emosi diri
 Berkembang memenuhi taman

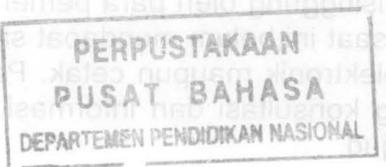
(Muhammad Iqbal)

Daftar Pustaka

Hudson, R.A. 1980. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Nababan, P.W.J. 1993. Sosiolinguistik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia

Nggermato, Agus. 2002. Quantum Quotient (Kecerdasan Emosi): Cara Cepat Melejitkan IQ, EQ, dan SQ secara Harmonis. Bandung: Penerbit Nuansa.



Segala pekerjaan bidang ini
 boleh dibuat dengan kalam
 Adapun pekerjaan kalam itu
 tiada boleh dibuat dengan pedang
 Maka itulah ibarat yang terdapat nystanya
 Dan beberapa ribu dan lakas pedang yang sudah terhunus
 dengan segores kalam jadi terstung
 (Raja Ali Haji)

Berkembang memenuhi taman
 Setangkai rumput yang sadar emosi diri
 Bertajanya meninggi padar mutiara
 Golotes air yang sadar emosi diri
 (Muhammad Idris)

499

F